

**LAPORAN PEREKONOMIAN
PROVINSI ACEH
FEBRUARI 2022**



VISI

Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas BI dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

MISI

Menjalankan kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

FUNGSI

1. Fungsi *Advisory* Kebijakan
2. Fungsi Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
3. Fungsi Sistem Pembayaran
4. Fungsi Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif
5. Fungsi *Regional Financial Surveillance* (RFS)
6. Fungsi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)
7. Fungsi Pengawasan SP dan PUR
8. Fungsi Komunikasi Kebijakan

TUGAS POKOK

1. Memberikan masukan kepada Dewan Gubernur kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya.
2. Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian/riset serta memfasilitasi pengendalian inflasi, pemberdayaan sektor riil dan UMKM
3. Melaksanakan kegiatan perizinan dan pengawasan serta operasionalisasi sistem pembayaran tunai dan non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya.
4. Melaksanakan kebijakan stabilitas keuangan, program perluasan dan pemerataan akses dan keterjangkauan keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung fungsi-fungsi utama.

Kalender Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Mei	Agustus	November	Februari

Penerbit :

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh
Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia
Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116
Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku "Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2022" ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Aceh pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh 7,39% (yoy), membaik dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,01% (yoy). Ditinjau dari sisi permintaan, meningkatnya perekonomian Aceh utamanya disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Sementara itu dari sisi Lapangan Usaha (LU), perbaikan ekonomi utamanya disumbang oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Konstruksi.
2. Laju inflasi Aceh pada triwulan IV 2021 tercatat terakselerasi. Pada periode laporan, Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 2,24% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,12% (yoy).
3. Pertumbuhan perekonomian Aceh pada tahun 2022 diperkirakan meningkat dibanding tahun 2021. Kondisi tersebut utamanya diperkirakan oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Lebih lanjut, program vaksinasi massal dan vaksin *booster* tahap ketiga juga diperkirakan akan mendongkrak aktivitas dan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, optimalisasi realisasi belanja pemerintah daerah perlu terus didorong.

Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah tercipta dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, Februari 2022
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Achris Sarwani
Kepala Perwakilan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xi
BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH.....	1
1.1. GAMBARAN UMUM.....	2
1.2. SISI PERMINTAAN.....	3
1.3. SISI LAPANGAN USAHA.....	8
BAB 2. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH.....	14
2.1. GAMBARAN UMUM.....	15
2.2. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH.....	15
2.3. BELANJA PEMERINTAH PUSAT.....	17
BAB 3. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH.....	19
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI.....	20
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI.....	20
3.3. <i>TRACKING</i> INFLASI TRIWULAN I 2021.....	26
3.4. AKTIVITAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) ACEH.....	27
BAB 4. STABILITAS KEUANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN UMKM.....	33
4.1. KINERJA PERBANKAN.....	34
4.2. INTERMEDIASI PERBANKAN.....	35
4.3. KINERJA KORPORASI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN.....	41
4.4. KINERJA PEMBIAYAAN/KREDIT RUMAH TANGGA.....	42
4.5. LANGKAH PENINGKATAN AKSES KEUANGAN UMKM.....	43
BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.....	47
5.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI.....	48
5.2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI.....	50
5.3. KEGIATAN KUPVA BB.....	53
5.4. INKLUSI KEUANGAN.....	54
BAB 6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN.....	58
6.1. KETENAGAKERJAAN.....	59
6.2. KEMISKINAN.....	61
BAB 7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH.....	64
7.1. PROSPEK MAKROEKONOMI.....	65
7.2. PROSPEK INFLASI.....	67
7.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Tw I 2021	2
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	2
Grafik 1.3 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan dari Sisi Permintaan	3
Grafik 1.4 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga.....	3
Grafik 1.5 Perkembangan Kredit Konsumsi	4
Grafik 1.6 Perkembangan Hasil Survei Konsumen.....	4
Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah.....	5
Grafik 1.8 Pertumbuhan Investasi.....	5
Grafik 1.9 Realisasi Investasi.....	6
Grafik 1.10 SKDU Investasi.....	6
Grafik 1.11 Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri.....	6
Grafik 1,12 Perkembangan Ekspor Batubara	7
Grafik 1.13 Pertumbuhan Impor Luar Negeri Aceh	7
Grafik 1.14 Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah	8
Grafik 1.15 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Aceh dari Sisi LU Utama	8
Grafik 1.16 Perkembangan Penumpang Angkutan Udara dan Laut.....	9
Grafik 1.17 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	9
Grafik 1.18 Nilai Tukar Petani	9
Grafik 1.19 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan.....	10
Grafik 1.20 Pertumbuhan Penjualan Kendaraan.....	10
Grafik 1.21 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi.....	11
Grafik 1.22 Pertumbuhan Pengadaan Semen.....	11
Grafik 1.23 Pertumbuhan LU Pertambangan	12
Grafik 2.1 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Aceh.....	18
Grafik 3.1 Perbandingan Inflasi Sumatera Tw I 2021	20
Grafik 3.2 Perkembangan Harga Uang Basah.....	21
Grafik 3.3 Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit.....	21
Grafik 3.4 Produksi Cabai Merah	21
Grafik 3.5 Perkembangan Harga Bawang Merah	22
Grafik 3.6 Perkembangan Harga Emas Dunia	26
Grafik 3.7 Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh	27
Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh.....	32
Grafik 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) (% , yoy).....	33
Grafik 4.3 Realisasi Belanja APBD dan Perkembangan Giro	33
Grafik 4.4 Perkembangan Nilai Tabungan	33
Grafik 4.5 Jumlah Rekening per Saldo	34
Grafik 4.6 Proporsi DPK per Jenis.....	34
Grafik 4.7 Proporsi DPK per Kepemilikan	35

Grafik 4.8 DPK Spasial	35
Grafik 4.9 Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Proyek dan Jenis Penggunaan	35
Grafik 4.10 Penyaluran Kredit Spasial	37
Grafik 4.11 Perkembangan NPL/NPF	37
Grafik 4.12 Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM	38
Grafik 4.13 Penyaluran Pembiayaan UMKM Spasial	38
Grafik 4.14 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Korporasi	39
Grafik 4.15 Tenaga Kerja Berdasarkan LU	40
Grafik 4.16 Proporsi Kredit RT	41
Grafik 5.1 <i>Netflow</i> Kas	46
Grafik 5.2 Pertumbuhan Inflow dan Outflow	46
Grafik 5.3 Transaksi Kas Titipan Triwulanan	47
Grafik 5.4 Transaksi Kas Titipan	47
Grafik 5.5 Nominal SKNBI	48
Grafik 5.6 Volume SKNBI	48
Grafik 5.7 Nominal BI RTGS	48
Grafik 5.8 Volume BI RTGS	49
Grafik 5.9 Transaksi ATM debit	49
Grafik 5.10 Transaksi Kartu Kredit	50
Grafik 5.11 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	50
Grafik 5.12 Pertumbuhan <i>Merchant</i> QRIS	50
Grafik 5.13 Transaksi KUPVA BB	51
Grafik 5.14 Disagregasi Transaksi UKA	52
Grafik 5.15 Penyaluran PKH (KPM)	53
Grafik 5.16 Penyaluran PKH (Nominal)	53
Grafik 5.17 Perkembangan Program Sembako (Nominal)	53
Grafik 5.18 Perkembangan Program Sembako (KPM)	54
Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera	58
Grafik 6.2 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota	60
Grafik 6.3 Penduduk Miskin Provinsi di Sumatera	61
Grafik 6.4 Perkembangan Rasio Gini di Aceh	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBD Triwulan I 2021	15
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Transfer dan Dana Desa Triwulan I 2021.....	16
Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan I 2021.....	16
Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN di Aceh Triwulan I 2021	17
Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan APB di Provinsi Aceh Triwulan I 2021.....	17
Tabel 2.6 Data Realisasi APBD se-Provinsi Aceh	18
Tabel 2.7 Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh	18
Tabel 3.1 Inflasi Kelompok Barang	20
Tabel 3.2 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	20
Tabel 3.3 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	22
Tabel 3.4 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	22
Tabel 3.5 Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga	23
Tabel 3.6 Inflasi Kelompok Kesehatan.....	23
Tabel 3.7 Inflasi Kelompok Transportasi.....	24
Tabel 3.8 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Keuangan.....	24
Tabel 3.9 Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya.....	25
Tabel 3.10 Inflasi Kelompok Pendidikan	25
Tabel 3.11 Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.....	25
Tabel 3.12 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.....	25
Tabel 5.1 Rasio Ketersediaan Layanan Lembaga Keuangan Formal	52
Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	58
Tabel 6.2 Perkembangan TPT.....	58
Tabel 6.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor	59
Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Pendidikan.....	59
Tabel 6.5 Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan	59
Tabel 6.6 Nilai Tukar Petani	60
Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	61
Tabel 6.8 Indeks Kemiskinan	61

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

A. PDRB

PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Sektoral)

Sektoral (Rp Triliun)	2018				2019				2020				2021			
	I	II	III	IV												
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.76	8.82	8.91	8.94	9.06	9.18	9.26	9.13	9.64	9.23	9.78	9.25	9.17	9.47	9.46	9.61
Pertambangan dan Penggalian	2.25	2.27	2.39	2.24	2.41	2.35	2.5	2.43	2.33	2.98	2.73	2.45	2.49	2.15	2.98	2.76
Industri Pengolahan	1.52	1.68	1.7	1.52	1.47	1.67	1.64	1.55	1.39	1.61	1.62	1.44	1.53	1.62	1.65	1.42
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Konstruksi	2.87	2.68	3.08	3.31	2.81	2.66	3.18	3.91	3.35	3.3	3.64	3.61	3.32	3.21	3.53	3.77
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.8	4.94	4.94	5.06	5.01	5.27	5.01	5.03	4.74	4.78	4.69	5.03	4.48	5.18	4.96	5.41
Transportasi dan Pergudangan	2.31	2.44	2.37	2.45	2.43	2.39	2.54	2.49	2.32	1.18	1.76	1.8	2.12	1.93	2.06	2.31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.4	0.42	0.42	0.44	0.43	0.46	0.45	0.45	0.41	0.39	0.4	0.44	0.36	0.34	0.35	0.50
Informasi dan Komunikasi	1.1	1.11	1.1	1.1	1.12	1.15	1.16	1.19	1.28	1.35	1.29	1.26	1.34	1.33	1.45	1.46
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.51	0.51	0.53	0.53	0.57	0.57	0.58	0.62	0.62	0.6	0.58	0.57	0.57	0.55	0.58	0.53
Real Estate	1.27	1.28	1.29	1.32	1.34	1.38	1.39	1.4	1.41	1.35	1.35	1.34	1.37	1.37	1.53	1.40
Jasa Perusahaan	0.2	0.2	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	0.23	0.21	0.2	0.21	0.22	0.20	0.19	0.23	0.22
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.41	3.04	3.02	3.02	2.56	3.02	3.01	3.26	2.67	2.94	2.81	3.05	2.62	3.30	2.98	3.29
Jasa Pendidikan	0.73	0.82	0.82	0.87	0.78	0.89	0.92	0.94	0.84	0.91	0.92	0.99	0.88	0.84	0.88	1.10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.85	0.94	0.94	0.99	0.9	1.02	1.03	1.04	0.97	0.95	1.06	1.18	1.07	1.09	1.16	1.25
Jasa lainnya	0.43	0.44	0.45	0.44	0.45	0.47	0.48	0.48	0.48	0.45	0.48	0.51	0.48	0.44	0.47	0.56
PDRB	30.45	31.64	32.24	32.5	31.62	32.8	33.43	34.23	32.71	32.27	33.4	33.21	32.07	33.10	33.34	35.66
PDRB Non Migas	28.2	29.37	29.84	30.26	29.21	30.44	30.93	31.8	30.38	29.3	30.67	30.75	29.58	30.95	31.36	32.89

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran

Komponen (Rp Triliun)	2018				2019				2020				2021			
	I	II	III	IV												
- Konsumsi Rumah Tangga	17.61	17.77	17.78	17.88	18.01	18.5	18.58	18.65	18.67	18.5	18.28	17.82	17.72	18.55	18.83	19.04
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0.55	0.58	0.63	0.64	0.68	0.69	0.64	0.65	0.65	0.65	0.66	0.61	0.60	0.58	0.63	0.63
- Konsumsi Pemerintah	1.79	5.93	5.75	8.26	3.03	5.94	6.12	8.26	3.24	5.95	5.85	6.44	5.24	6.54	5.87	7.56
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	9.74	9.45	10.38	11.19	10.02	10.02	11.35	12.13	10.92	10.78	11.53	11.92	10.32	10.97	11.36	11.88
- Perubahan Inventori	0.02	0	-0.01	0	-0.01	0.01	0	0	-0.11	-0.29	0.05	0.28	0.18	-0.05	0.01	0.03
- Ekspor Luar Negeri	0.64	0.85	0.84	0.96	0.95	1.09	1.06	1.12	1.33	0.76	0.74	0.78	1.27	0.94	1.00	1.75
- Impor Luar Negeri	0.49	0.43	0.43	0.43	0.37	0.77	1.12	0.52	0.27	0.07	0.06	0.2	0.08	0.19	0.12	0.15
- Net Ekspor Antarprovinsi	0.6	-2.5	-2.72	-6	-0.7	-2.68	-3.21	-6.06	-1.72	-4	-3.64	-4.45	-3.17	-4.24	-3.26	-5.03
PDRB	30.45	31.64	32.24	32.5	31.62	32.8	33.43	34.23	32.71	32.27	33.4	33.21	32.07	33.10	33.34	35.66
PDRB Non Migas	28.2	29.37	29.84	30.26	29.21	30.44	30.93	31.8	30.38	29.3	30.67	30.75	29.58	30.95	31.36	32.89

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

B. Inflasi

Inflasi (%, yoy)	2018				2019				2020				2021			
	I	II	III	IV												
Banda Aceh	3,88	3,78	2,20	1,97	2,01	2,77	2,22	1,38	3,72	1,31	1,90	3,46	1,25	1,87	2,07	2,41
Lhokseumawe	4,42	4,64	2,30	2,05	1,50	1,97	1,89	1,20	3,36	1,08	1,67	3,55	2,31	3,18	2,52	1,97
Meulaboh	2,83	3,05	2,94	0,96	1,74	4,38	5,21	4,28	5,49	2,13	2,30	4,23	1,62	2,86	1,48	2,08
Aceh	3,90	3,94	2,33	1,84	1,82	2,73	2,51	1,69	3,84	1,36	1,89	3,59	1,61	2,37	2,12	2,24

Kota	Kelompok (% , yoy)												Total
	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar RT	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Trans.	Infokom, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya		
Banda Aceh	3,14	-0,62	1,72	2,44	1,82	7,07	0,52	0,35	0,41	0,63	0,85	2,41	
Lhokseumawe	3,36	2,94	1,48	1,35	1,22	0,38	0,25	0,25	1,44	0,05	1,63	1,97	
Meulaboh	2,83	0,26	2,40	5,09	0,24	0,30	0,26	3,01	2,18	3,73	-0,55	2,07	
Aceh	3,16	0,65	1,74	2,43	1,46	4,77	0,41	0,68	0,74	0,86	0,92	2,24	

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

C. Perbankan

Indikator Umum

Indikator	2018				2019				2020				2021			
	I	II	III	IV												
Total Aset (Rp Triliun)	48,97	53,44	53,45	54,82	52,73	57,79	54,64	58,01	55,23	56,85	59,96	58,14	55,08	52,85	50,47	52,25
Pertumbuhan (yoy)%	8,23	4,34	5,79	6,17	7,69	8,12	2,23	5,82	4,74	-1,61	9,73	0,22	-0,27	-7,04	-15,83	-10,13
Pertumbuhan (mtm)%	0,46	4,14	6,01	3,19	0,66	9,40	0,91	2,64	3,74	8,93	-0,46	1,57	-0,74	-5,47	0,61	3,52
DPK (Rp Triliun)	36,45	39,45	39,90	39,67	38,46	42,45	39,68	42,24	39,02	40,23	43,39	41,72	38,46	38,96	39,90	39,50
Pertumbuhan (yoy)%	17,15	6,85	3,94	2,80	5,49	7,60	-0,58	6,48	1,45	-5,23	9,37	-1,25	-1,43	-3,17	-8,04	-5,47
Pertumbuhan (mtm)%	-0,76	2,59	7,58	0,80	-0,59	13,85	1,80	1,45	1,90	7,95	-0,60	-0,41	-1,61	-0,55	6,38	6,21
Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)	33,58	34,01	35,08	35,89	36,37	36,63	37,92	38,27	37,62	37,66	37,32	36,84	35,12	33,82	33,16	31,02
Pertumbuhan (yoy)%	9,26	6,67	9,77	8,23	8,29	7,69	8,07	6,62	3,42	2,83	-1,57	-3,74	-6,63	10,12	-11,15	-15,30
Pertumbuhan (mtm)%	2,67	0,18	1,49	1,88	2,19	0,22	1,25	2,61	2,56	7,65	-1,30	1,95	-1,04	-3,30	0,71	-6,45
LDR %	92,13	86,21	87,91	90,47	94,58	86,28	95,56	90,59	96,42	93,61	86,00	88,30	91,33	86,81	83,09	78,99
NPL-gross %	2,05	2,07	1,95	1,54	1,61	1,71	1,63	1,01	1,44	1,87	2,50	2,26	1,84	2,25	2,86	1,94
NPL-Nominal (Rp Triliun)	0,68	0,70	0,68	0,55	0,58	0,63	0,62	0,39	0,54	0,70	0,93	0,83	0,65	0,76	0,95	0,60

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)/Simpanan

Simpanan	2018				2019				2020				2021			
	I	II	III	IV												
Total (Rp Triliun)	36,45	39,45	39,90	39,67	38,46	42,45	39,68	42,24	39,02	40,23	43,39	41,72	38,46	38,96	39,90	39,50
Pertumbuhan (yoy)%	17,15	6,85	3,94	2,80	5,49	7,60	-0,58	6,48	1,45	-5,23	9,37	-1,25	-1,43	-3,17	-8,04	-5,32
Giro (Rp Triliun)	7,01	9,37	10,51	7,04	8,70	12,01	9,15	8,63	7,80	8,25	11,20	9,23	7,30	7,97	7,99	9,05
Pertumbuhan (yoy)%	2,84	-3,87	0,38	10,97	24,04	28,12	-12,96	22,49	-10,32	-31,21	22,39	6,97	-6,33	-3,54	-28,71	-1,95
Tabungan (Rp Triliun)	18,36	19,12	18,97	22,21	18,98	19,92	20,21	24,41	20,54	21,19	21,81	23,33	19,4	19,33	21,04	22,09
Pertumbuhan (yoy)%	14,29	12,60	9,01	4,18	3,38	4,20	6,52	9,88	8,20	6,38	7,92	-4,41	-5,54	-8,77	-3,51	-5,31
Deposito (Rp Triliun)	11,08	10,96	10,42	10,41	10,78	10,52	10,32	9,21	10,67	10,77	10,38	9,16	11,75	11,66	10,88	8,15
Pertumbuhan (yoy)%	34,57	7,51	-0,89	-4,65	-2,75	-4,00	-1,03	-11,60	-0,95	2,42	0,66	-0,57	10,03	8,14	4,74	-11,02

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pinjaman	2018				2019				2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	III
Total Kredit (Rp Triliun)	33,58	34,01	35,08	35,89	36,37	36,63	37,92	38,27	37,62	37,66	37,32	36,84	35,12	33,82	33,16	31,20
Pertumbuhan (yoy) %	9,26	6,67	9,77	8,23	8,29	7,69	8,07	6,62	3,42	2,83	-1,57	-3,74	-6,63	-10,21	-11,15	-15,30
Modal Kerja (Rp Triliun)	9,93	10,22	10,65	11,30	10,95	10,96	11,76	11,14	9,87	11,17	10,74	10,32	9,63	8,47	8,26	7,36
Pertumbuhan (yoy)%	9,36	2,63	8,59	11,54	10,20	7,16	10,40	-1,36	-9,82	1,95	-8,69	-7,41	-2,48	-24,21	-23,06	-28,68
Investasi (Rp Triliun)	3,83	3,93	4,03	3,83	4,47	4,53	4,60	4,50	4,17	3,81	3,67	3,52	2,63	2,61	2,50	2,59
Pertumbuhan (yoy)%	-1,97	4,67	7,60	1,00	16,62	15,12	13,99	17,54	-6,66	-15,77	-20,28	-21,92	-36,90	-31,58	-31,77	-26,42
Konsumsi (Rp Triliun)	19,81	19,84	20,39	20,75	20,95	21,13	21,55	22,61	23,57	22,66	22,91	23,00	22,86	22,73	22,39	21,24
Pertumbuhan (yoy)%	11,67	9,30	10,84	7,92	5,73	6,49	5,68	8,96	12,50	7,27	6,31	1,70	-3,01	0,29	-2,26	-7,65

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Pinjaman	2018				2019				2020				2021			
	I	II	III	IV												
Total Kredit (Rp Triliun)	39.91	41.63	43.30	42.20	42.57	42.78	43.51	43.98	43.88	43.00	43.54	41.64	40.62	42.37	44.86	45.87
Pertumbuhan (yoy) %	17.26	18.67	21.87	12.43	6.69	2.76	0.49	4.21	3.07	0.52	0.07	(5.32)	(7.43)	(1.48)	3.03	10.15
Modal Kerja (Rp Triliun)	11.69	12.69	13.44	12.82	12.42	12.59	13.48	12.55	12.16	13.20	13.73	12.13	11.77	11.49	14.38	12.99
Pertumbuhan (yoy)%	19.18	18.47	28.54	15.43	6.25	(0.75)	0.25	(2.10)	(2.05)	4.82	1.86	(3.30)	(3.24)	(12.98)	4.73	7.08
Investasi (Rp Triliun)	7.00	7.56	7.88	7.10	7.77	7.66	7.22	7.32	7.07	6.40	6.27	5.86	5.17	6.86	5.93	9.03
Pertumbuhan (yoy)%	33.62	52.85	45.87	19.99	10.98	1.26	(8.42)	3.12	(9.00)	(16.36)	(13.10)	(19.87)	(26.89)	7.08	(5.46)	54.09
Konsumsi (Rp Triliun)	21.22	21.38	21.97	22.29	22.39	22.53	22.81	24.11	24.65	23.40	23.54	23.64	23.68	24.02	24.55	23.83
Pertumbuhan (yoy)%	11.75	10.08	11.73	8.61	5.51	5.37	3.83	8.20	10.10	3.85	3.19	(1.95)	(3.92)	2.67	4.29	0.80

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor (Rp Triliun)	2018				2019				2020				2021			
	I	II	III	IV												
Pertanian	2,65	2,72	2,79	2,99	3,02	3,05	3,59	3,55	3,29	3,60	3,47	2,63	1,78	1,99	1,81	1,29
Pertambangan	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
Industri Pengolahan	2,63	2,53	2,66	2,75	3,00	2,73	2,72	1,99	1,68	1,77	1,45	2,29	1,94	1,02	0,69	0,81
Listrik Gas dan Air	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
Konstruksi	0,69	0,82	0,94	0,95	0,84	0,92	1,08	1,09	0,88	0,94	0,98	0,98	0,82	0,68	0,72	0,56
Perdagangan	6,12	6,35	6,48	6,38	6,67	6,59	6,62	6,54	5,78	5,83	5,64	5,19	4,97	4,90	5,04	4,39
Pengangkutan	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,25	0,22	0,33	0,21	0,20	0,18	0,17	0,17	0,16
Jasa Dunia Usaha	0,31	0,32	0,34	0,25	0,36	0,35	0,36	0,37	0,36	0,37	0,30	0,33	0,32	0,15	0,14	0,12
Jasa Masyarakat	0,99	1,04	1,06	0,92	0,94	0,96	0,99	0,66	0,60	0,63	0,63	0,58	0,56	0,56	0,4	0,77
Lainnya	19,83	19,85	20,39	20,76	20,95	21,13	22,15	22,54	24,66	24,04	24,47	24,49	24,41	24,21	24,06	21,24
Total	33,59	34,01	35,08	35,55	35,55	36,63	37,92	38,27	37,62	37,66	37,32	36,84	35,12	33,82	33,16	31,20

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Sektor (Rp Triliun)	2019				2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian	3.76	3.82	3.75	3.95	3.74	3.83	3.82	3.66	2.89	2.55	3.53	2.47
Perikanan	0.11	0.11	0.14	0.16	0.19	0.33	0.36	0.34	0.40	0.40	0.39	0.76
Pertambangan	1.55	1.38	1.51	1.19	1.35	1.16	1.24	0.98	1.08	1.06	0.87	3.91
Ind. Pengolahan	3.75	3.45	3.71	3.03	3.27	3.28	3.76	2.87	2.62	2.55	2.34	1.47
Listrik, Gas & Air	0.63	0.65	0.50	0.49	0.52	0.62	0.63	0.60	0.60	2.63	0.78	0.49
Konstruksi	0.99	1.24	1.43	1.50	1.51	1.53	1.60	1.55	1.38	1.38	1.43	1.02
Perdagangan	7.10	7.23	7.23	7.14	6.34	6.30	6.02	5.54	5.53	5.45	6.70	6.31
Hotel & Restoran	0.32	0.34	0.37	0.39	0.39	0.47	0.48	0.45	0.48	0.46	0.72	0.65
Transportasi, Gudang & Kom.	0.49	0.50	0.50	0.52	0.49	0.45	0.44	0.40	0.38	0.33	0.98	0.92
Perantara Keuangan	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04
Perumahan, usaha sewa & Js. Perusahaan	0.37	0.40	0.39	0.40	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.34	1.22	3.31
Adm Pemerintahan,	0.09	0.08	0.08	0.05	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jasa Pendidikan	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	0.17	0.17	0.21	0.21	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19
Jasa Masyarakat	0.72	0.73	0.74	0.72	0.65	0.66	0.66	0.60	0.59	0.59	0.47	0.81
Jasa Perseorangan	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.22	0.15
Badan Internasional	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Keg. Yg. Blm Jelas Keg-nya	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.20	0.26	0.27	0.28	0.27	0.39	-
Penerima Kredit Bukan Lap. Usaha	22.39	22.53	22.81	24.11	24.65	23.40	23.54	23.64	23.68	24.02	24.55	23.86
Total	42.57	42.78	43.51	43.98	43.88	43.00	43.54	41.64	40.62	42.37	44.86	46.46

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi Daerah

Ekonomi triwulan IV 2021 tercatat tumbuh 7,39% (yoy) atau melanjutkan tren perbaikan setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 3,01% (yoy).

Pada triwulan IV 2021 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 7,39% (yoy), meningkat cukup tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,01% (yoy). Pada sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan didorong oleh konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Sementara, pada sisi Lapangan Usaha (LU), perbaikan ekonomi utamanya disumbangkan oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Konstruksi.

Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah se-Provinsi Aceh mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Kinerja keuangan daerah pada triwulan IV 2021 secara umum mengalami perlambatan, utamanya didorong oleh penurunan realisasi anggaran APBD. Di sisi lain, realisasi pendapatan serta belanja APBN mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase. Seluruh komponen belanja pemerintah tidak mengalami peningkatan pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 2,24% (yoy) atau lebih tinggi dibanding triwulan

Pada triwulan IV 2021 inflasi Aceh mengalami peningkatan utamanya disebabkan oleh kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Lebih lanjut pada triwulan I 2022, laju inflasi

sebelumnya yang tercatat sebesar 2,12% (yoy).

Aceh diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh meningkatnya permintaan dalam menyambut hari raya Ramadan serta tren meningkatnya harga emas dunia sejalan dengan ketidakpastian global akibat covid-19 varian omicron.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 tetap terjaga.

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 tetap terjaga. Meskipun dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan masih mengalami kontraksi, namun pertumbuhan pembiayaan berdasarkan lokasi proyek mulai tumbuh dan tercatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, terdapat penurunan kualitas pembiayaan yang tergambar dari peningkatan NPF, namun masih berada pada level yang relatif terjaga.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan IV 2021, peredaran uang kartal di Provinsi Aceh mengalami *Net Outflow*.

Selama triwulan IV 2021, perkembangan sistem pembayaran konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan sesuai dengan pola historisnya dimana *net outflow* pada triwulan IV lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III. Kemudian, sistem pembayaran nontunai baik nilai besar ataupun ritel mengalami perlambatan secara tahunan yang mengindikasikan konsumsi masyarakat masih tertahan ditengah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Di sisi lain, penggunaan uang elektronik *chip based* maupun *server based* terus mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Terkait dengan Bansos Non Tunai, Pemerintah menambah intensitas penyaluran Program Sembako pada Desember 2021 sebagai respons untuk melindungi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh menurun dibandingkan periode sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan aspek kemiskinan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh berada

pada urutan keempat sedangkan kemiskinan berada pada peringkat pertama.

Prospek Perekonomian

Perekonomian Aceh pada tahun 2022 diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya.

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 3,42%-4,22%(yoy) atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (2,79%, yoy). Kondisi tersebut utamanya diperkirakan oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Laju inflasi tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dibanding dari sasaran inflasi nasional dan lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar 2,25% (yoy), dengan perkiraan peningkatan inflasi didorong oleh komponen *volatile food* dan *administered prices*.



BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

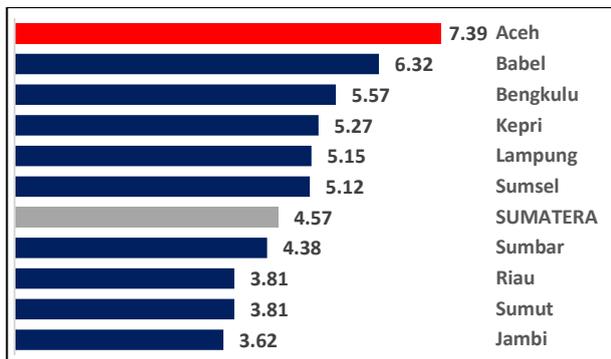
Pada triwulan IV 2021 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 7,39% (yoy), meningkat cukup tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,01% (yoy). Pada sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan didorong oleh konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Sementara, pada sisi Lapangan Usaha (LU), perbaikan ekonomi utamanya disumbangkan oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Konstruksi. Pertumbuhan ekonomi Aceh secara tahunan pada 2021 sebesar 2,79% (yoy) meningkat dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi sebesar -0,37% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi swasta, pemerintah, dan investasi.

1.1. Gambaran umum

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2021 melanjutkan kinerja yang positif dari triwulan sebelumnya. Perekonomian nasional mampu tumbuh sebesar 5,02% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,51% (yoy).

Sejalan dengan nasional, perekonomian Sumatera pada triwulan IV 2021 juga tumbuh positif sebesar 4,57% (yoy), meningkat dari periode sebelumnya yang tumbuh 3,80% (yoy). Berdasarkan wilayah regional Sumatera (Grafik 1.1), semua wilayah mengalami pertumbuhan yang positif diatas 3,0% (yoy). Provinsi Aceh mengalami pertumbuhan tertinggi di Sumatera sebesar 7,39% (yoy), disusul oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6,32% (yoy), dan Provinsi Bengkulu sebesar 5,57% (yoy). Provinsi yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah Provinsi Jambi (3,62%, yoy).

Grafik 1.1. Pert. Ekonomi Prov. di Sumatera Tw IV 2021 (% ,yoy)

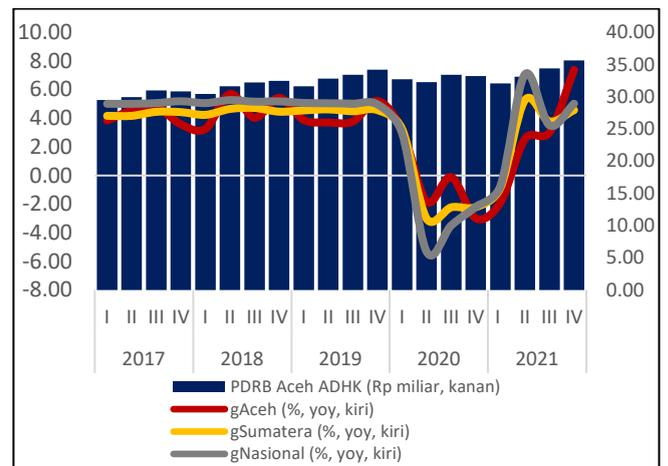


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Jika dilihat secara spasial, Aceh tercatat memiliki kontribusi sebesar 5,03% terhadap perekonomian Sumatera. Sumbangan tersebut relatif tidak mengalami perubahan dibanding periode-periode sebelumnya. Dengan proporsi tersebut, Aceh masih menjadi provinsi dengan perekonomian ketiga terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (2,16%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,24%). Sementara itu, Sumatera Utara (23,37%), Riau (22,92%), dan Sumatera Selatan (13,36%) masih menjadi provinsi dengan sumbangan ekonomi paling dominan di Sumatera dengan pangsa dari ketiga provinsi tersebut mencapai lebih dari 50% dari total ekonomi Sumatera.

Ekonomi Aceh tercatat tumbuh sebesar 7,39% (yoy) (Grafik 1.2), meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,01% (yoy). Ditinjau dari sisi permintaan, meningkatnya perekonomian Aceh pada triwulan laporan utamanya disebabkan oleh peningkatan konsumsi pemerintah, dan ekspor luar negeri. Sementara itu dari sisi lapangan usaha, LU transportasi dan pergudangan serta LU perdagangan menjadi pendorong utama perbaikan pertumbuhan perekonomian Aceh.

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pertumbuhan ekonomi Aceh secara tahunan pada 2021 adalah sebesar 2,79% (yoy) meningkat dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi sebesar -0,37% (yoy). Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2021 (c-to-c), komponen pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 1,33 %. Sumber pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah berasal dari komponen ekspor luar negeri yaitu sebesar 1,32 %, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 0,65 %. Komponen PMTB juga memberikan sumber pertumbuhan positif yaitu sekitar 0,13 %. Sementara itu komponen pengeluaran konsumsi LNPRT memberikan sumber pertumbuhan negatif yaitu sebesar 0,08 % dan impor luar negeri sebagai komponen pengurang pada PDRB juga menyumbang sumber pertumbuhan negatif yaitu sekitar 0,05%.

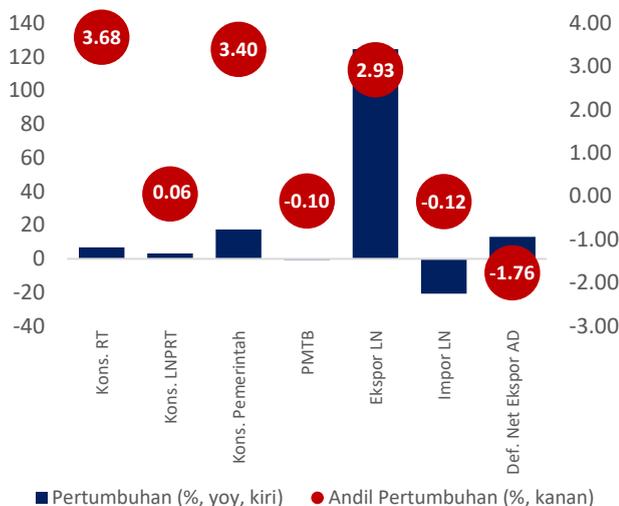
Dari sisi Lapangan usaha, LU yang mengalami

pertumbuhan tertinggi (c-to-c) diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 19,51 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,71 persen, informasi dan komunikasi sebesar 7,57 persen. Sebaliknya beberapa lapangan usaha masih mengalami kontraksi dengan kontraksi tertinggi diantaranya penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 6,11 persen dan jasa keuangan sebesar 5,08 persen.

1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, peningkatan ekonomi Aceh pada triwulan IV 2021 utamanya didorong oleh terakselerasinya konsumsi rumah tangga. Komponen konsumsi rumah tangga menjadi komponen yang memberikan andil akselerasi tertinggi sebesar (3,68%) pada triwulan laporan yang diikuti konsumsi pemerintah (3,40%), ekspor luar negeri (2,93%), dan konsumsi LNPRT (0,06%) (Grafik 1.3).

Grafik 1.3. Pert. dan Andil Pert. Sisi Permintaan Tw IV 2021



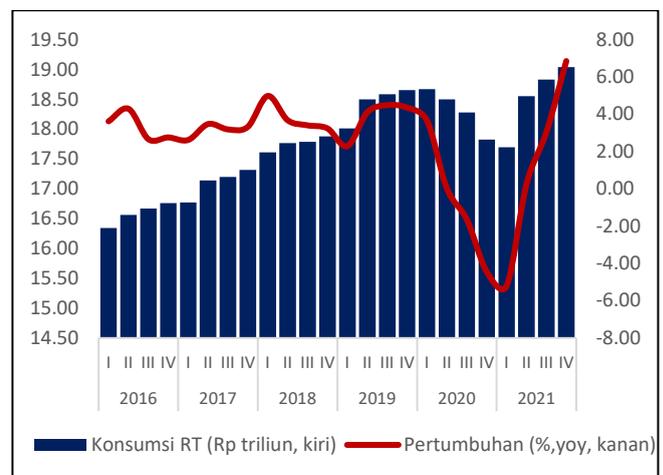
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2021, konsumsi rumah tangga tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,85% (yoy) atau meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 3,04% (yoy). Dengan laju pertumbuhan positif tersebut, konsumsi rumah tangga memberikan andil sebesar 3,68%. (Grafik 1.4). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga melanjutkan kinerja

positif pada triwulan III 2021. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kondisi perekonomian yang mulai berangsur pulih pasca COVID-19, sehingga berdampak pada peningkatan permintaan secara agregat. Kenaikan pada komponen ini dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan masyarakat yang sudah lebih banyak beraktivitas diluar rumah terutama pada subkomponen rekreasi dan budaya, dan transportasi. Selain itu, pada triwulan IV, sebagian sekolah di Aceh melanjutkan sekolah tatap muka membuat konsumsi rumah tangga untuk pendidikan masih mengalami peningkatan. Lebih lanjut, peningkatan konsumsi rumah tangga juga sejalan dengan indeks keyakinan konsumen. Hal tersebut tergambarkan dari indeks penghasilan saat ini (74,84) dan indeks pengeluaran untuk konsumsi (105,83) yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 64,67 dan 99,52.

Grafik 1.4. Pertumbuhan Konsumsi RT



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga sejalan dengan peningkatan kinerja penyaluran pembiayaan kepada rumah tangga. Pada periode laporan, pembiayaan kepada rumah tangga tercatat meningkat sebesar 0,95% (yoy), atau lebih tinggi dari triwulan III 2021 yang berkontraksi -5,06% (yoy) (Grafik 1.5). Peningkatan kinerja pembiayaan rumah tangga terjadi pada seluruh jenis pembiayaan, terutama pembiayaan dengan penggunaan yang bersifat multiguna.

Grafik 1.5. Perkembangan Kredit Konsumsi



Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

Lebih lanjut, kinerja konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif sejalan dengan peningkatan optimisme masyarakat pada triwulan IV 2021. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) (Grafik 1.6) mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, pada triwulan IV 2021 IKK sebesar 117,6, sementara itu pada triwulan III 2021, IKK sebesar 84,4.

Grafik 1.6. Perkembangan Hasil Survei Konsumen



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

Secara tahunan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 1,16% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,64% (yoy). Kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dan masyarakat yang sudah banyak melakukan aktivitas diluar rumah juga sangat mempengaruhi pertumbuhan pada komponen ini.

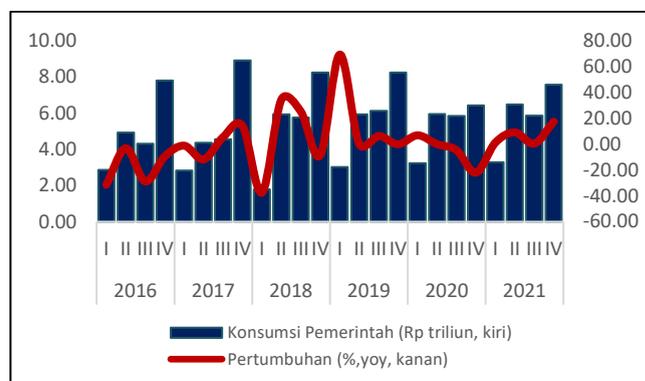
Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 17,51% (yoy), meningkat cukup tinggi dibandingkan dari triwulan sebelumnya yang tercatat 0,49% (yoy)

(Grafik 1.7). Peningkatan yang cukup besar hal ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan realisasi APBA dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah melalui alokasi APBA dan APBK hingga triwulan IV 2021 mencapai 73,90% dari total pagu belanja (Rp36,91 triliun) atau sebesar Rp27,28 triliun.

Realisasi belanja transfer mengalami perlambatan dibanding triwulan IV 2020 dengan nominal Rp8,27 triliun atau 85,62% dari pagu periode laporan. Komponen belanja transfer terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil. Pada triwulan laporan, Belanja Bantuan Keuangan berhasil direalisasikan Rp7,51 triliun atau sebesar 85,43% dari pagu Belanja Bantuan Keuangan 2021, menurun dari triwulan IV 2020 yang terealisasi 97,10% dari pagu Belanja Bantuan Keuangan 2020. Belanja Bagi Hasil juga mengalami hal yang sama, dengan realisasi sebesar 87,59% pada triwulan IV 2021 dari pagu Belanja Bagi Hasil 2021. setelah pada periode yang sama di tahun 2020 berhasil merealisasikan 88,97% dari pagu Belanja Bagi Hasil 2020.

Grafik 1.7. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, komponen belanja pemerintah tumbuh sebesar 8,34% (yoy), meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan periode tahun lalu yang berkontraksi sebesar -8,06% (yoy). Peningkatan secara tahunan disebabkan *baseline* konsumsi pemerintah pada tahun 2020 yang rendah (hanya mencapai 70% dari total pagu). Proses *refocusing* anggaran sudah diselesaikan pada awal triwulan III 2021, sehingga belanja lebih optimal pada triwulan IV 2021.

Pada triwulan I 2022, konsumsi pemerintah diperkirakan akan tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain disebabkan oleh siklus belanja pemerintah yang relatif lebih rendah pada awal tahun, karena proses pengadaan dan sebagainya, faktor *baseline* pertumbuhan yang sangat tinggi pada triwulan IV 2021 (17,51%,yoy) juga berpengaruh terhadap arah pertumbuhan untuk konsumsi pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan, per 19 Februari 2022, realisasi belanja APBD baru mencapai 0,68% atau sebesar 109,71 miliar dari total pagu 2022. Lebih lanjut, peningkatan kasus omicron berpotensi menjadi pemicu *refocusing* anggaran pemerintah.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi

Pada triwulan IV 2021, PMTB/investasi di wilayah Aceh berkontraksi sebesar -0,29% (yoy) sedikit membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,45% (yoy) (Grafik 1.8).

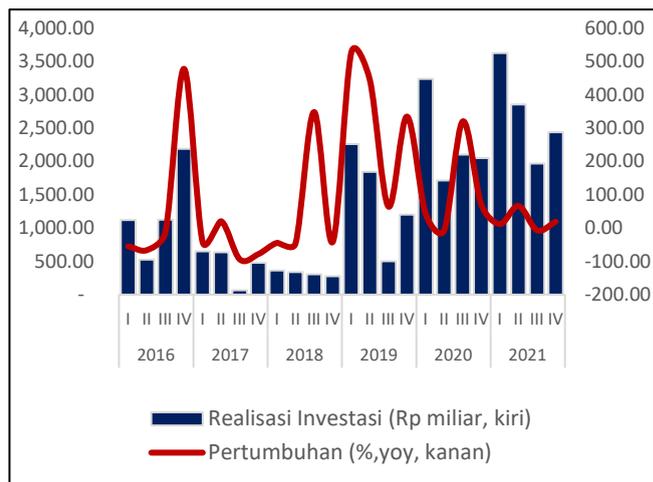
Grafik 1.8. Pertumbuhan PMTB/Investasi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan komponen PMTB tersebut sejalan dengan peningkatan realisasi penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh telah melakukan rilis realisasi investasi sampai dengan triwulan IV 2021. Pada triwulan laporan, realisasi investasi tercatat sebesar Rp2.440,5 miliar atau naik sebesar 19,00% (yoy) (Grafik 1.9).

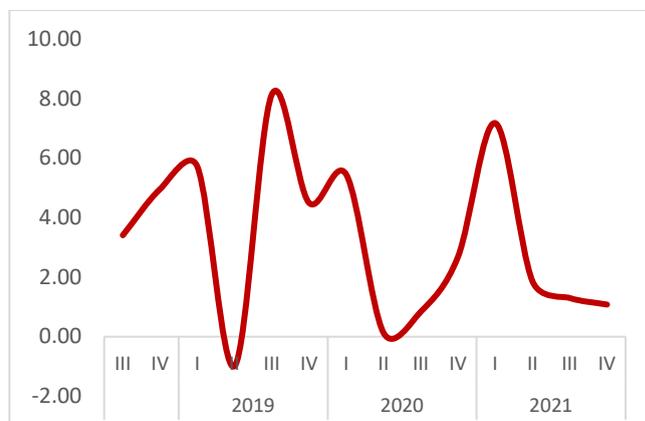
Grafik 1.9. Realisasi Investasi



Sumber: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), diolah

Di sisi lain, berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) untuk sektor investasi, terjadi penurunan saldo bersih tertimbang menjadi 1,08 dari sebelumnya 1,30 pada triwulan III 2021, nilai ini juga lebih rendah daripada realisasi di triwulan IV 2021 sebesar 2,69 (Grafik 1.10). Hal ini menggambarkan realisasi investasi yang mengalami penurunan di kalangan pelaku usaha.

Grafik 1.10. SKDU Investasi



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia, diolah.

Secara keseluruhan tahun 2021, komponen PMTB tumbuh 0,38% (yoy), turun dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar 3,75% (yoy). Belum optimalnya belanja modal pemerintah di 2021 serta kondisi ketidakpastian yang masih berlanjut menjadi faktor penghambat kinerja investasi. Kinerja PMTB terutama pada subkomponen nonbangunan yaitu dipengaruhi oleh pengadaan barang modal berupa mesin-

mesin pendukung pembangunan pembangkit listrik.

Ekspor Luar Negeri

Ekspor luar negeri Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh tinggi dengan laju 124,62% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berada pada 36,01% (yoy) (Grafik 1.11).

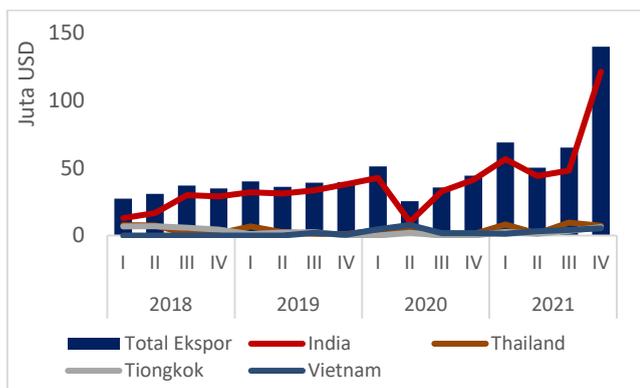
Grafik 1.11. Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 179,15 juta USD meningkat dibandingkan realisasi pada triwulan III yang sebesar 117,93 juta USD. Secara kumulatif, total nilai ekspor barang asal Aceh dari Januari hingga Desember 2021 adalah sebesar 502,95 juta USD. Dari nilai tersebut, nilai ekspor migas secara kumulatif hingga Desember 2021 hanya senilai 16 USD. Dengan laju tersebut, ekspor luar negeri Aceh memberikan andil positif sebesar 2,93% terhadap kinerja ekonomi Aceh secara keseluruhan pada triwulan IV 2021.

Grafik 1.12. Perkembangan Ekspor Batubara



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

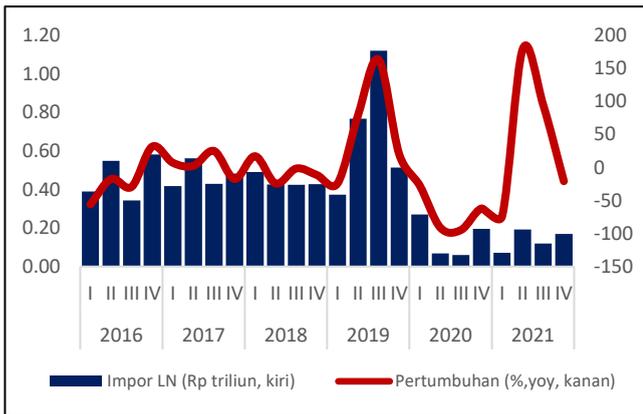
Secara umum, kinerja ekspor masih ditopang oleh komoditas batubara dan kopi, yang merupakan komoditas unggulan di Provinsi Aceh. Ekspor komoditas batubara pada triwulan IV mencapai 139 juta USD, meningkat signifikan dibandingkan dengan realisasi ekspor pada triwulan III sebesar 65 juta USD (Grafik 1.12).

Secara keseluruhan tahun 2021, kinerja komponen ekspor luar negeri meningkat signifikan sebesar 41,24% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar -14,72% (yoy). Arah perbaikan ekspor beberapa komoditas utama seperti kopi dan batu bara setelah dibukanya kembali aktivitas di beberapa negara tujuan menjadi faktor pendorong kinerja ekspor. Secara kumulatif, total nilai ekspor barang asal Aceh dari Januari hingga Desember 2021 adalah sebesar 502,95 juta USD, meningkat dibandingkan dengan kumulasi total nilai ekspor sepanjang tahun 2020 yang sebesar 300,42 juta USD. Kelompok ekspor nonmigas yang pangsa terbesar adalah bahan bakar mineral terutama batubara sebesar 68,63%, kelompok kopi, teh, dan rempah-rempah sebesar 14,39%, dan kelompok buah-buahan (pinang) sebesar 5,00%.

Impor Luar Negeri

Komponen impor luar negeri pada triwulan IV 2021 tercatat terkontraksi sebesar -20,58% (yoy), turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 94,74% (yoy). Nilai impor ke Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 sebesar USD77,30 juta turun jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, Secara kumulatif, dari Januari hingga Desember 2021 nilai impor nonmigas sebesar 114,34 juta USD, atau naik sebesar 470,06% dibandingkan Januari hingga Desember 2020. Selama triwulan IV 2021 nilai impor seluruhnya berupa komoditas nonmigas. Nilai impor terbesar berupa Mesin/Pesawat Mekanik senilai 64,61 juta USD, diikuti oleh impor mesin/peralatan listrik sebesar 10,42 juta USD, dan bahan kimia organik sebesar 1,04 juta USD.

Grafik 1.13. Pertumbuhan Impor Luar Negeri



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara keseluruhan tahun 2021, impor luar negeri berkontraksi sebesar -10,06% (yoy) membaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam sebesar -78,53% (yoy). Secara umum, perbaikan kinerja impor didorong oleh peningkatan konsumsi swasta dan pemerintah yang meningkat pada tahun 2021. Nilai impor Aceh secara kumulatif Januari hingga Desember 2021 adalah sebesar 114,35 juta USD meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 20,06 juta USD. Negara asal impor didominasi oleh Tiongkok besar 96,59%, disusul oleh Singapura dan Thailand dengan pangsa masing-masing sebesar 2,43% dan 0,98%. Lebih lanjut, barang-barang yang diimpor utamanya berasal dari kelompok mesin/pesawat organik sebesar 87,14%, kelompok mesin/peralatan listrik dan kelompok bahan kimia organik sebesar masing-masing sebesar 9,30% dan 2,43%. Barang yang utamanya diimpor adalah turbin uap, kondensor pendingin, dan fenol.

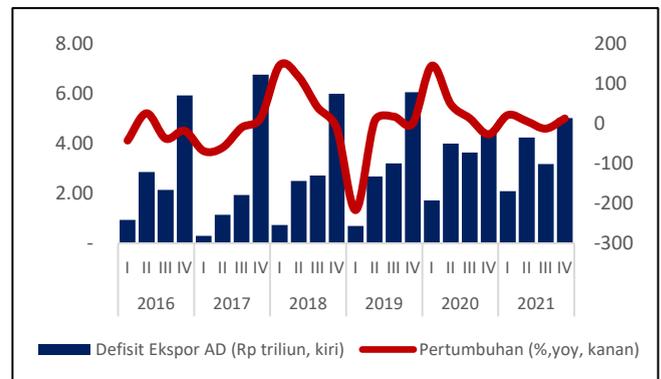
Net Ekspor Antar Daerah

Defisit neraca ekspor antar daerah Provinsi Aceh kembali meningkat. Pada triwulan IV 2021, defisit neraca ekspor antar daerah tercatat meningkat sebesar 13,13% (yoy), setelah sebelumnya turun sebesar 12,72% (yoy) (Grafik 1.15).

Pada triwulan IV 2021, defisit neraca ekspor antar daerah Aceh tercatat sebesar Rp5,03 triliun (ADHK), menurun dibandingkan dengan rata-rata triwulan IV dalam 3 tahun terakhir dimana defisit tercatat

sebesar Rp5,50 triliun. Defisit pada triwulan laporan secara nominal tersebut sejalan dengan belanja modal pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Grafik 1.14. Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

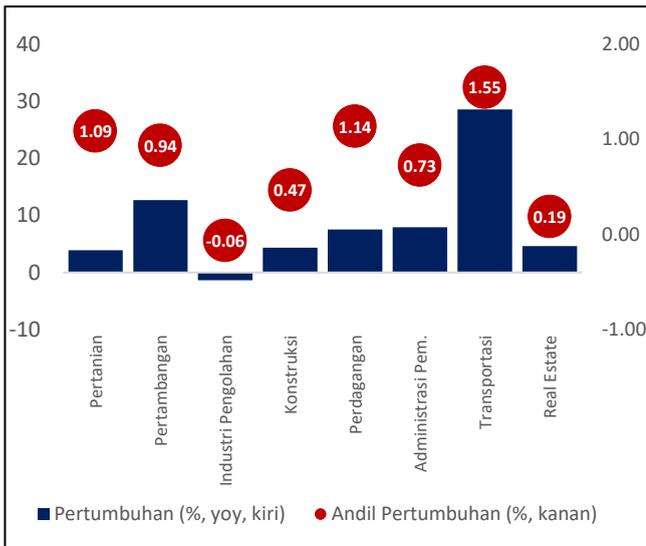
Dengan defisit yang meningkat pada triwulan laporan, maka net ekspor antar daerah Aceh memberikan kontribusi negatif sebesar -1,76% terhadap kinerja ekonomi Aceh secara keseluruhan pada triwulan IV 2021. Hal tersebut membuat net ekspor antar daerah menjadi komponen utama yang menahan kinerja ekonomi Aceh pada periode laporan dari sisi permintaan, selain impor.

Secara tahunan, pada tahun 2021 terdapat peningkatan laju pertumbuhan neraca ekspor antar daerah sebesar 5,35% (yoy). Peningkatan defisit perdagangan antar daerah sejalan dengan peningkatan konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, dan investasi. Sebagian besar barang konsumsi masyarakat banyak didatangkan dari daerah lain terutama barang-barang jadi seperti kendaraan bermotor dan produk konsumsi olahan lainnya seperti minyak goreng, gula, dan sebagainya.

1.3. Sisi Lapangan Usaha

Dilihat dari sisi lapangan usaha, peningkatan perekonomian Aceh pada triwulan IV 2021 utamanya disebabkan oleh meningkatnya kinerja beberapa lapangan usaha utama, seperti LU transportasi dan pergudangan, LU Perdagangan, dan LU Pertanian pada periode laporan.

Grafik 1.15. Pert. dan Kontribusi Sisi LU Utama

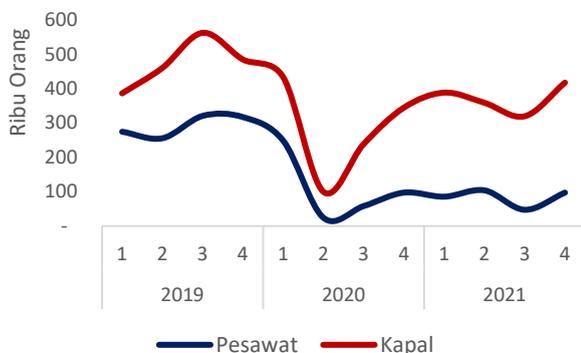


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan pada lapangan usaha transportasi dan perdagangan, serta lapangan usaha perdagangan secara umum didukung oleh peningkatan aktivitas masyarakat sejalan dengan tren rendahnya kasus COVID-19 sampai dengan akhir tahun 2021. Sementara itu, peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian disebabkan oleh produksi padi pada triwulan IV mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III karena terjadi pergeseran puncak panen.

Peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi tercermin dari meningkatnya jumlah penumpang baik untuk angkutan udara maupun laut pada triwulan IV 2021.

Grafik 1.16. Perkembangan Penumpang Angkutan Udara dan Laut



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

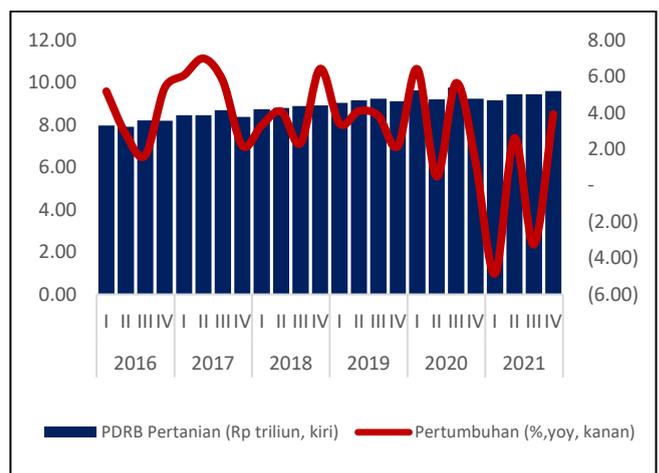
Pada triwulan IV 2021, jumlah penumpang kapal tercatat sebanyak 417.872 orang, mengalami peningkatan sebesar 21,06% dibandingkan

periode yang sama tahun lalu. Dari sisi angkutan udara, jumlah penumpang pesawat tercatat sebanyak 97,558 orang, atau mengalami sedikit penurunan sebesar -0,02% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kinerja lapangan usaha pertanian (27,34% dari total PDRB) pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,94% (yoy) setelah sebelumnya terkontraksi sebesar -2,74% (yoy) (Grafik 1.17). Peningkatan kinerja tersebut didorong oleh membaiknya subsektor pertanian dan kehutanan. Berdasarkan data KSA (Kerangka Sampel Area), produksi padi pada triwulan IV mengalami kenaikan akibat terjadinya pergeseran puncak panen dari triwulan III ke triwulan IV 2022. Selanjutnya, data statistik pemenuhan kayu bulat, pada triwulan laporan terjadi peningkatan produksi kayu dibandingkan triwulan lalu. Meskipun demikian, subsektor peternakan mengalami penurunan dibandingkan triwulan III karena pada triwulan tersebut jatuh Hari Raya Qurban.

Grafik 1.17. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian

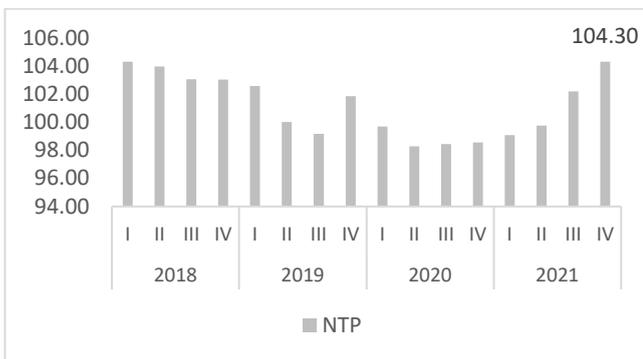


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian juga tercermin pada peningkatan nilai tukar petani (NTP). Pada triwulan laporan, nilai NTP sebesar 104,3, meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 102,19, serta mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama

tahun lalu. Kenaikan NTP terjadi pada semua subsektor kecuali subsektor tanaman pangan. Periode Desember 2021, harga gabah kualitas GKP di tingkat petani mengalami kenaikan sebesar 3,53 persen atau senilai Rp. 165 menjadi 4.837 rupiah per kilogram. Kenaikan harga disebabkan persediaan gabah berkurang karena sudah diluar musim panen. Demikian juga di tingkat penggilingan harga gabah GKP naik sebesar 3,41 persen atau sebesar Rp. 162 menjadi 4.912 rupiah per kilogram.

Grafik 1.18. Nilai Tukar Petani



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara keseluruhan tahun 2021, LU pertanian mengalami penurunan dibandingkan kinerja tahun 2020. Lapangan usaha pertanian mengalami deselerasi sebagai dampak cuaca di beberapa titik yang mengalami banjir sehingga mengganggu hasil panen. Berdasarkan data BPS, Luas panen padi pada 2021 sebesar 297.01 ribu hektar, mengalami penurunan sebanyak 20,86 ribu hektar atau 6,56 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 317,87 ribu hektar. Produksi padi pada 2021 sebesar 1,66 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 0,1 juta ton atau 5,68 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 1,76 juta ton GKG. Selain itu, anomali cuaca yang diperkirakan berlangsung dari triwulan I 2021 hingga pertengahan triwulan III mengakibatkan penurunan drastis pada sub LU perikanan tangkap.

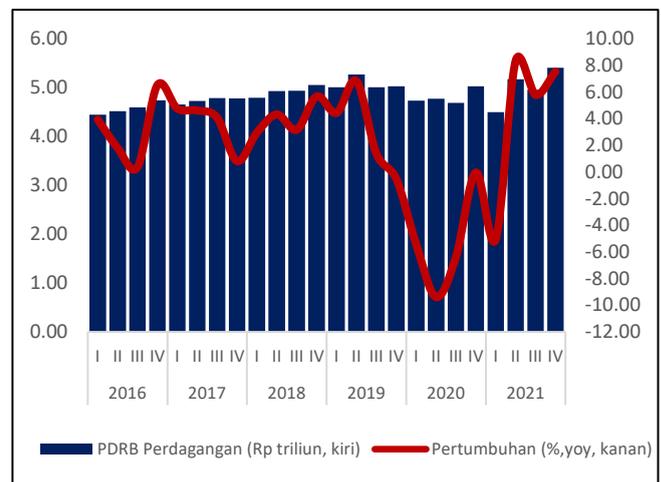
⁴ Indikator mobilitas yang digunakan adalah Google Community Mobility Reports yang tren pergerakan dari waktu ke waktu berdasarkan geografi, di berbagai kategori

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan (15,13% dari total PDRB) pada triwulan laporan tercatat tumbuh 7,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh lebih rendah sebesar 5,80% (yoy) (Grafik 1.19).

Meningkatnya kinerja LU perdagangan tersebut utamanya didorong oleh belanja masyarakat pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut sejalan dengan indikator mobilitas⁴ yang memperlihatkan bahwa rata-rata tingkat kunjungan masyarakat Aceh ke lokasi retail dan rekreasi (restoran, kafe, pusat perbelanjaan, dll) meningkat, dari triwulan sebelumnya diangka sekitar 8% dari *baseline* menjadi sekitar 13% pada periode laporan. Selain itu, rata-rata kunjungan masyarakat Aceh pada triwulan IV 2021 ke lokasi *groceries and pharmacy* berada di angka sekitar 33% atau meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada level 30% dari *baseline*.

Grafik 1.19. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan



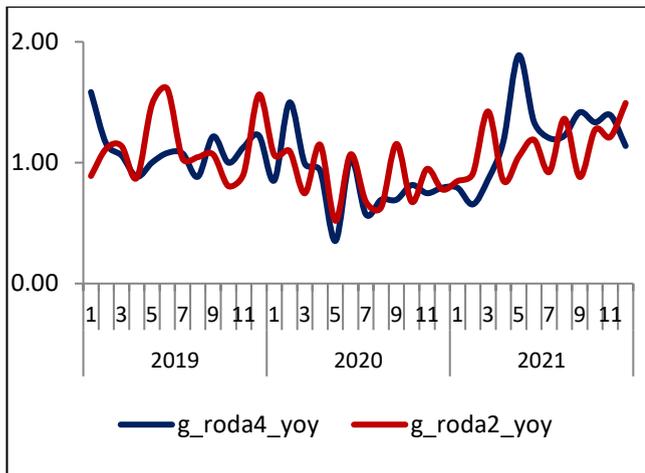
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Meningkatnya kinerja LU perdagangan tersebut terkonfirmasi salah satunya dari angka penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan pada triwulan laporan mengalami kenaikan karena ada

tempat seperti ritel dan rekreasi, toko bahan makanan dan apotek, taman, stasiun transit, tempat kerja, dan perumahan.

launching varian baru, selain itu karena ada promo promo menarik untuk akhir tahun. Penjualan kendaraan roda empat mencapai 2.145 unit meningkat dari realisasi triwulan sebelumnya yang mencapai 1.909 unit. Selanjutnya, untuk penjualan kendaraan roda dua mencapai 29.202 unit meningkat dari realisasi triwulan sebelumnya yang mencapai 26.280 unit.

Grafik 1.20. Pertumbuhan Penjualan Kendaraan



Sumber: BPKA, diolah

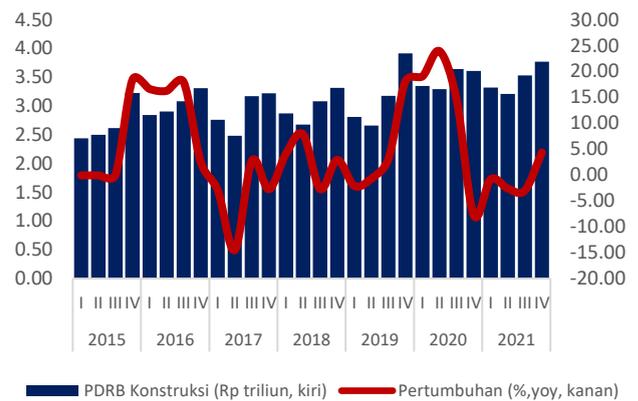
Secara keseluruhan tahun 2021, lapangan usaha perdagangan tumbuh sebesar 4,22% (yoy) meningkatkan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar -5,34% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan membaiknya konsumsi rumah tangga akibat relatif lebih lancarnya mobilitas masyarakat dimana pada tahun 2020 menurun akibat himbauan untuk *stay at home*, *physical distancing* dan kebijakan *Work From Home* (WFH). Menurunnya aktivitas masyarakat ini berdampak langsung terhadap kinerja berbagai sektor yang pada akhirnya mengurangi pendapatan masyarakat dan melemahnya daya beli. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), penjualan semua jenis kendaraan mengalami kenaikan menjadi 112.960 unit, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 103.984 unit, sehingga terjadi kenaikan sebesar 8,63% (yoy).

Lapangan Usaha Konstruksi

Secara umum pada triwulan IV 2021, kinerja lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar 4,35% (yoy), setelah sebelumnya terkontraksi sebesar -

2,99% (yoy).

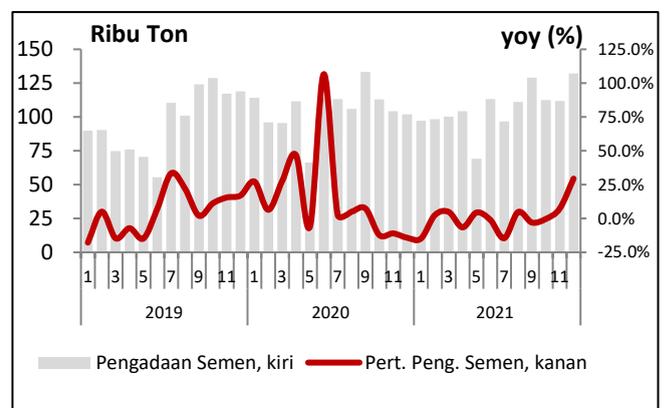
Grafik 1.21. Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kinerja yang meningkat tersebut sejalan dengan data realisasi pengadaan semen di Aceh. Pengadaan semen pada triwulan laporan mencapai 356.484 ribu ton, meningkat jika dibandingkan dengan triwulan III yang sebesar 336.858 ribu ton. Konstruksi secara garis besar pada proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Aceh, seperti pembangunan jalan tol trans sumatera (JTTS), bendungan, dan irigasi. Peningkatan juga didukung oleh realisasi pembangunan gedung-gedung dan perumahan. Berdasarkan data realisasi kinerja fasilitas likuiditas pembayaran perumahan (FLPP), pada bulan Oktober 2021 mencapai 361 unit, meningkat dibandingkan bulan September 2021 yang sebesar 171 unit.

Grafik 1.22. Pertumbuhan Pengadaan Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Lapangan usaha konstruksi pada keseluruhan tahun 2021 terkontraksi sebesar -0,46% (yoy),

turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,61% (yoy). Meskipun pada triwulan IV 2021, LU konstruksi mampu tumbuh positif, namun dari triwulan I hingga triwulan III mencatatkan pertumbuhan negatif. Hal ini didorong oleh terhambatnya realisasi konstruksi proyek-proyek pemerintah akibat *refocusing* anggaran. Penurunan kinerja lapangan usaha konstruksi juga tercermin dari penurunan realisasi pengadaan semen sepanjang tahun 2021 menjadi 1,26 juta ton dari sebelumnya sebesar 1,28 juta ton atau mengalami penurunan sebesar -0,47%.

Lapangan Usaha Pertambangan

Pada triwulan laporan, kinerja lapangan usaha pertambangan (7,13% dari total PDRB) tercatat pertumbuhan sebesar 12.64% (yoy) lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,12% (yoy) (Grafik 1.29). Melalui pertumbuhan tersebut, lapangan usaha pertambangan memberikan andil faktor pendorong pertumbuhan sebesar 0,94%.

Produksi sektor pertambangan dan penggalian secara umum mengalami kenaikan akibat produksi migas dan batubara yang meningkat. Pada triwulan laporan, kinerja Lapangan Usaha pertambangan lebih disumbang oleh subsektor pertambangan minyak dan gas bumi sebesar 52,03%. Lebih lanjut, kinerja subsektor pertambangan minyak dan gas bumi meningkat sebesar 3,92% (yoy) dan subsektor pertambangan dan penggalian nonmigas meningkat sebesar 15,51% (yoy). Selain itu, kinerja pertambangan batubara juga mengalami peningkatan sejalan dengan kenaikan harga batubara.

Grafik 1.23. Pertumbuhan LU Pertambangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kinerja lapangan usaha pertambangan pada keseluruhan tahun 2021 terkontraksi sebesar -0,98 (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,23% (yoy). Penurunan utama nya terjadi pada periode triwulan II 2021 yang terkontraksi sebesar -27,66% (yoy), hal ini terjadi karena produksi migas yang menurun (PT Medco EP Malaka *shutdown* selama sebulan). Hasil ini juga sejalan dengan kontak liason di LU tersebut, dimana penjualan mengalami penurunan, rata-rata produksi minyak mentah perusahaan pada tahun 2021 sebesar 2.500 barrel oil per day (BOPD) atau menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 2.900 barrel oil per day. Realisasi produksi tersebut masih di bawah target sebesar 3.300 BOPD. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya sumur yang dapat memproduksi dikarenakan telah banyak sumur yang telah tergenang air.



BAB II

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja keuangan daerah pada triwulan IV 2021 secara umum mengalami perlambatan, utamanya didorong oleh penurunan realisasi anggaran APBD. Di sisi lain realisasi pendapatan serta belanja APBN mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase.

2.1. Gambaran umum

Realisasi belanja dan pendapatan pemerintah di wilayah Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 tercatat lebih rendah. Realisasi agregat belanja pemerintah di Provinsi Aceh yang terdiri dari belanja pusat, belanja pemerintah Provinsi dan belanja Kabupaten/Kota (APBN + APBD) mengalami penurunan pada triwulan IV 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara nominal, total belanja mencapai Rp49,67 triliun atau setara dengan 81,50% dari pagu agregat belanja tahun 2021. Penurunan utamanya disumbangkan oleh realisasi APBA dengan nilai Rp35,55 triliun (lebih rendah dibanding triwulan IV 2020 dengan selisih sebesar Rp6,23 triliun).

Pada sisi realisasi agregat pendapatan pemerintah (APBN + APBD) mengalami penurunan baik dalam persentase serta nominal realisasi. Secara persentase, realisasi pendapatan pada triwulan IV 2021 berada pada 91,40% dari pagu agregat pendapatan 2021, menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai realisasi 95,63% dari pagu pendapatan 2020. Secara nominal realisasi pendapatan, terdapat penurunan hingga Rp2,93 triliun pada periode laporan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat merupakan jenis pendapatan dengan *share* terbesar dari total realisasi pendapatan APBD di lingkup Provinsi Aceh, dengan persentase sebesar 87,90 persen. Persentase penyaluran pendapatan transfer sampai dengan triwulan IV 2021 tercatat sebesar 92,76 persen dari pagu tahun 2021.

2.2. Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah

Nilai pagu belanja pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Aceh pada tahun 2021 berada pada nilai Rp46,58 triliun dengan pertumbuhan realisasi sebesar -14,91% (yoy). Secara umum, pagu APBD baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota menurun pada tahun

ini. Namun, pada pagu belanja, terjadi peningkatan pagu pada pos Bantuan Sosial. Hal ini dimaksudkan sebagai alokasi anggaran untuk beragam langkah penanganan COVID-19. Selain itu, terjadi peningkatan pada pagu belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

Tabel 2. 1. Realisasi Belanja APBD (APBA+APBK) Triwulan IV 2021

REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TW-IV 2021	
 Belanja Barang & Jasa	78,32%
Belanja Modal	72,19%
Belanja Tidak terduga	20,14%
Belanja Pegawai	73,67%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

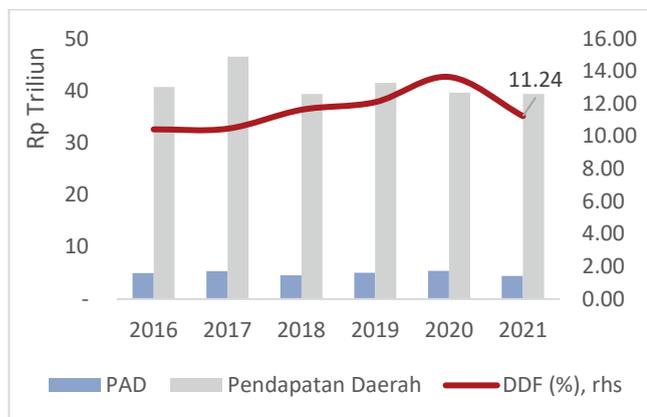
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah melalui alokasi APBA dan APBK hingga triwulan IV 2021 mencapai 73,90% dari total pagu belanja (Rp36,91 triliun) atau sebesar Rp27,28 triliun, realisasi turun 14,07% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian Belanja Pemerintah Daerah ini lebih rendah dibandingkan realisasi belanja di triwulan IV 2020 yang tercatat sebesar 87,07% pagu belanja 2020 dengan nominal realisasi belanja sebesar Rp 31,75 triliun. Seluruh komponen belanja pemerintah tidak mengalami peningkatan pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Belanja bunga terealisasi sangat rendah sampai dengan triwulan IV 2021, yaitu sebesar 0,01%. Selain itu, belanja modal tercatat memiliki realisasi sebesar 72,19% yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah mengingat Belanja Modal adalah jenis belanja yang diharapkan memiliki *multiplier effect* paling besar terhadap perekonomian.

Tabel 2. 2. Realisasi Belanja Transfer Antar Daerah dan Dana Desa Triwulan IV 2021.

REALISASI BELANJA TRANSFER TW-IV 2021	
 Belanja Bantuan Keuangan	85,43%
Belanja Bagi Hasil	87,59%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi belanja transfer mengalami perlambatan dibanding triwulan IV 2020 dengan nominal Rp8,27 triliun atau 85,62% dari pagu. Komponen belanja transfer terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil. Pada triwulan laporan, Belanja Bantuan Keuangan berhasil direalisasikan Rp7,51 triliun atau sebesar 85,43% dari pagu Belanja Bantuan Keuangan 2021, menurun dari triwulan IV 2020 yang terealisasi 97,10% dari pagu Belanja Bantuan Keuangan 2020. Sementara itu, Belanja Bagi Hasil pada triwulan IV 2021 terrealisasi sebesar 87,59% dari pagu, sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2020 dengan realisasi sebesar 88,97%.



Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Grafik 2. 1. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh

Realisasi Pendapatan Daerah terhadap target pendapatan terkontraksi secara persentase maupun nominal pada triwulan IV 2021 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan APBA dan APBK/D pada triwulan IV 2021 mencapai 90,62% dari pagu Pendapatan Daerah 2021, menurun dibandingkan triwulan IV 2020 yang terealisasi 98,56% dari pagu pendapatan 2020. Secara nominal, realisasi mencapai Rp39,3 triliun atau terdapat penurunan sebesar Rp3,65 triliun (secara *year-on-year* menurun 8,49%). Berdasarkan porsi komponen Pendapatan Daerah, mayoritas berasal dari Pendapatan Transfer yang menyumbang 87,90% dari total realisasi pendapatan pada periode laporan atau sebesar Rp34,61 triliun. Sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp4,42 Triliun pada triwulan

IV 2021 hanya menyumbang 11,24% dari total realisasi pendapatan. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh terhadap Transfer Pemerintah Pusat masih tinggi. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menunjukkan perbaikan pada kurun waktu 2017-2020 dengan semakin meningkatnya DDF, namun pada triwulan IV 2021 terdapat penurunan. Penurunan disebabkan oleh turunnya realisasi pajak daerah, terutama di level Provinsi.

Tabel 2. 3. Realisasi Pendapatan APBD (APBA + APBK) se-Provinsi Aceh Triwulan IV 2021

REALISASI PENDAPATAN APBD TW-IV 2021	
Pendapatan Asli Daerah	82,33%
Pendapatan Transfer	92,76%
Lain-Lain	44,12%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Pada triwulan IV 2021, tercatat penurunan realisasi terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain. Realisasi Pendapatan Daerah menurun setelah merealisasikan 98,56% dari pagu Pendapatan 2020, menjadi 90,62% dari pagu Pendapatan pada triwulan IV 2021. Pendapatan Transfer mampu terealisasi 92,76% pada periode laporan. Pendapatan lain-lain mengalami penurunan realisasi paling tinggi, turun sebesar 60,45% dibanding periode sebelumnya ditahun 2020 dengan realisasi nominal sebesar Rp333,1 miliar pada triwulan IV 2021. Secara nominal, terdapat penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp3,65 triliun pada periode laporan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan realisasi yang terjadi juga diakibatkan oleh penurunan PAD. Pada triwulan laporan, pemerintah provinsi membukukan Rp4,42 triliun atau menurun -17,77% dari realisasi PAD tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,38 triliun.

2.3. Belanja Pemerintah Pusat

Pada triwulan IV 2021, realisasi belanja APBN secara persentase maupun nominal mengalami peningkatan. Pendapatan APBN menunjukkan hal yang sama, mengalami peningkatan realisasi baik secara persentase maupun nominal. Belanja APBN

di Provinsi Aceh pada periode laporan secara persentase mencatatkan realisasi sebesar 98,98% dari pagu Belanja Negara 2021 (secara nominal Rp48,47 triliun) meningkat dibanding triwulan IV 2020 yang terealisasi sebesar 98,24% dari pagu belanjanya (Rp47,08 triliun secara nominal). Realisasi pendapatan APBN hingga periode laporan tercatat secara persentase sebesar 97,30% dari pagu pendapatan APBN (secara nominal Rp5,75 triliun) atau meningkat dari persentase realisasi pada triwulan IV 2020 yang hanya sebesar 75,73% dari pagu pendapatan APBN 2020 (secara nominal Rp4,87 triliun).

Tabel 2. 4. Realisasi Belanja APBN di Aceh Pada Triwulan IV 2021

REALISASI BELANJA APBN TW-IV 2021		
	Belanja Pusat	98,98%
	Transfer	99,28%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (70,58% dari total Belanja APBN di Provinsi Aceh) mengalami penurunan secara persentase dan peningkatan secara nominal. Secara persentase, pada periode laporan realisasi tercatat sebesar 99,28% dari pagu Transfer ke Daerah 2021 (secara nominal Rp33,86 triliun) atau meningkat sebesar 0,58% (yoy) dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu yang terealisasi 99,29% dari pagu Transfer ke Daerah 2020 (secara nominal Rp33,66 triliun). Secara agregat, realisasi transfer ke daerah dan dana desa berada di nominal yang sama pada periode laporan maupun periode lalu. Peningkatan terjadi pada dana alokasi khusus fisik yang meningkat sebesar 39,58% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Tabel 2. 5. Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan IV 2021

REALISASI PENDAPATAN APBN TW-IV 2021		
	Pajak	90,80%
	PNBP	136,02%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Penerimaan Pajak (79,89% dari total Pendapatan Negara di Provinsi Aceh) mengalami peningkatan

pada persentase realisasi. Namun, pada nominal kontribusi menunjukkan penurunan. Secara persentase, Penerimaan Pajak pada triwulan IV 2021 berada pada 90,80% dari pagu Penerimaan Pajak 2021 (secara nominal Rp4,47 triliun) meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat hanya merealisasikan sebesar 68,28% dari pagu Penerimaan Pajak 2020 (secara nominal Rp3,97 triliun). Peningkatan Penerimaan Pajak secara nominal disumbang baik oleh Pajak Dalam Negeri maupun Pajak Perdagangan Internasional. Pada komponen Pajak Dalam Negeri, PPh Non Migas menjadi kontributor terbesar (51,23%) dengan total realisasi Rp2,27 triliun. Diikuti PPN yang memiliki kontribusi sebesar 44,04% dengan total realisasi Rp1,95 triliun. Pada komponen Pajak Perdagangan Internasional, bea masuk dan bea keluar menjadi kontributor terbesar. Realisasi bea keluar pada tahun 2021 sebesar Rp49,82 miliar, sedangkan bea masuk sebesar Rp1,37 miliar. Realisasi PPh Non Migas, PPN, Pajak Lainnya dan PPh Migas tercatat menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas perekonomian di Aceh mengalami penguatan setelah pada tahun sebelumnya aktivitas tersebut menurun akibat dampak pandemic COVID 19.

Tabel 2. 6. Data Realisasi APBA & APBK Provinsi Aceh Triwulan IV 2021

APBA & APBK PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan IV (Rp Miliar)		Presentase Realisasi Triwulan IV (%)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	PENDAPATAN	43.662,60	43.454,06	43.034,67	39.377,67	98,56%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.223,79	5.378,32	5.384,64	4.427,77	103,08%	82,33%
Transfer Pemerintah Pusat	37.741,64	37.320,51	36.807,53	34.616,72	97,52%	92,76%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	697,17	755,23	842,50	333,19	120,85%	44,12%
BELANJA	46.890,30	46.584,47	41.793,83	35.558,84	89,13%	76,33%
Belanja Daerah	36.469,04	36.918,75	31.752,08	27.282,64	87,07%	73,90%
Transfer	10.421,26	9.665,72	10.041,75	8.276,20	96,36%	85,62%
SURPLUS/DEFISIT	-3.227,70	-3.130,41	11.151,80	3.818,82	-345,50%	-121,99%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh

Tabel 2. 7. Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan IV 2021

BELANJA NEGARA (APBN) DI PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan IV (Rp Miliar)		Presentase Realisasi Triwulan IV (%)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	PENDAPATAN	6.439,27	5.753,74	4.876,24	5.598,24	75,73%
Pajak	5.816,28	4.926,44	3.971,46	4.472,98	68,28%	90,80%
PNBP	622,99	827,30	904,79	1.125,26	145,23%	136,02%
BELANJA	47.083,87	48.471,30	46.254,51	47.976,92	98,24%	98,98%
Belanja Pusat	13.176,58	14.360,88	12.586,83	14.112,43	95,52%	98,27%
Transfer ke Daerah	33.907,29	34.110,41	33.667,67	33.864,49	99,29%	99,28%
SURPLUS/DEFISIT APBN	-40.644,60	-42.717,56	-41.378,26	-42.378,69	101,81%	99,21%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh



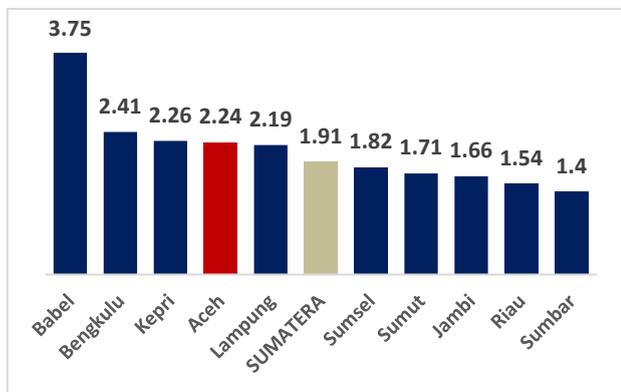
BAB III

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan IV 2021 inflasi Aceh mengalami peningkatan utamanya disebabkan oleh kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Lebih lanjut pada triwulan I 2022, laju inflasi Aceh diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh meningkatnya permintaan dalam menyambut hari raya Ramadan serta tren meningkatnya harga emas dunia sejalan dengan ketidakpastian global akibat covid-19 varian omicron.

3.1. Perkembangan Umum Inflasi

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 2,24% (yoy) atau lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,12% (yoy). Angka inflasi tersebut tercatat lebih tinggi dari inflasi Sumatera (1,91%, yoy) dan Nasional (1,87%, yoy). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, realisasi inflasi tersebut menempatkan Provinsi Aceh sebagai daerah inflasi tertinggi keempat di Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu dan Kepulauan Riau pada triwulan IV 2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah
Grafik 3.1. Laju Inflasi Prov. di Sumatera Tw IV 2021 (% yoy)

3.2. Analisis Perkembangan Inflasi

Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang

Kelompok Barang dan Jasa	Tw III 2021		Tw IV 2021	
	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	5,16	1,59	3,16	0,99
Pakaian dan Alas Kaki	0,5	0,04	0,64	0,05
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,31	0,24	1,74	0,32
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	1,73	0,08	2,43	0,11
Kesehatan	1,9	0,04	1,46	0,05
Transportasi	1,83	0,22	4,76	0,57
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,35	0,02	0,42	0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,58	0,01	0,68	0,01
Pendidikan	0,59	0,02	0,74	0,02

Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,72	0,06	0,86	0,07
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-2,07	-0,14	0,92	0,06
Inflasi Umum	2,12		2,24	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2021, laju inflasi Aceh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meningkatnya inflasi Aceh tersebut utamanya disebabkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,99% dan tingkat inflasi 3,16%. Selanjutnya, diikuti oleh kelompok transportasi dengan andil 0,57% dan tingkat inflasi sebesar 4,76%.

Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Tabel 3.2. Inflasi Kel, Makanan, Minuman, dan Tembakau

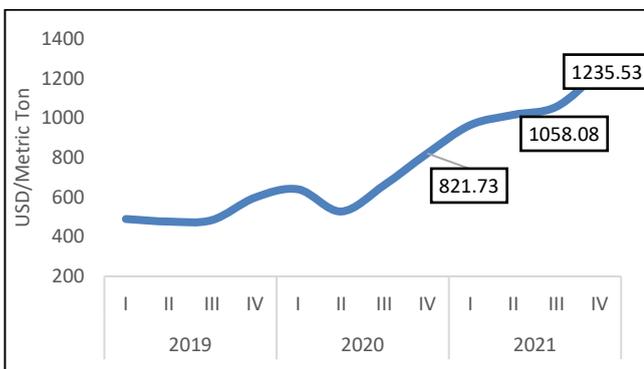
INFLASI 3,16% (yoy)		ANDIL 0,99%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Minyak Goreng	0,55	Cabai Merah	-0,23
Ikan Tongkol	0,35	Bawang Merah	-0,10
Ikan Tuna	0,25	Beras	-0,02
Ikan Dencis	0,10	Jeruk Nipis/Limau	-0,02
Jeruk	0,09	Telur Ayam Ras	-0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada periode laporan tercatat mengalami inflasi 3,16% (yoy) dengan andil sebesar 0,99%. Inflasi yang terjadi didorong oleh subkelompok makanan yang memiliki andil inflasi sebesar 0,55% (yoy). Komoditas utama menyumbang inflasi antara lain minyak goreng, ikan tongkol, ikan tuna, ikan dencis, dan jeruk.

Secara umum, peningkatan harga minyak goreng disebabkan oleh meningkatnya harga *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit. Pada grafik 3.2 ditampilkan rata-rata harga minyak kelapa sawit secara triwulanan. Pada triwulan IV 2021, harga minyak kelapa sawit berada pada level USD 1.235,53/metric ton. Harga tersebut meningkat dibandingkan dengan harga pada periode

sebelumnya yang berada pada 1.058,08/metric ton dan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada pada USD 821,73/metric ton. Kenaikan tersebut turut meningkatkan harga produk turunannya. Namun, pada awal tahun 2022, Pemerintah sudah menetapkan harga minyak goreng dengan harga; Rp. 14.000 untuk kemasan premium, Rp. 13.500 untuk kemasan sederhana, dan Rp. 11.500 untuk kemasan curah. Namun, di pasar masih tersedia minyak goreng dengan harga diatas HET sehingga membuat inflasi minyak goreng pada periode laporan masih terpantau tinggi.

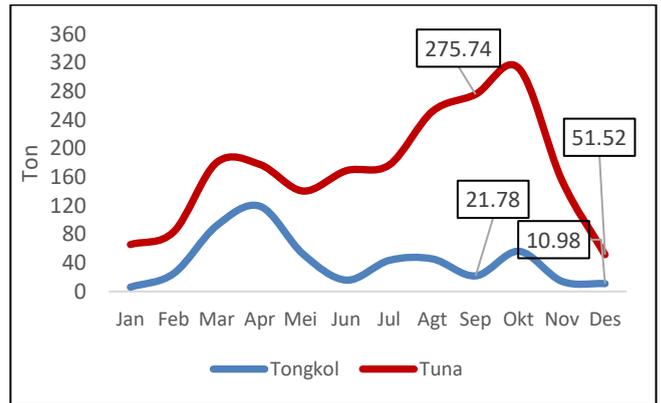


Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 3.2. Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit

Harga komoditas perikanan meningkat disebabkan oleh masih terdapatnya kendala cuaca dan gelombang laut yang kurang baik. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, terjadi penurunan produksi ikan yang didaratkan di UPTD Pelabuhan Perikanan Kutaraja tahun 2021 (Grafik 3.2). Produksi ikan tuna mengalami penurunan dari 704,70 ton pada triwulan III 2021 menjadi 519,27 ton pada triwulan laporan. Sementara itu, produksi ikan tongkol juga mengalami penurunan menjadi 81,34 ton pada triwulan laporan dari sebelumnya mencapai 110,85 ton pada triwulan III 2021. Lebih lanjut, berdasarkan kontak Liaison perikanan, pasokan ikan tuna dari nelayan sejak akhir 2021 hingga awal tahun 2022 sedang mengalami penurunan. Sedangkan, peningkatan harga jeruk secara umum disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari sentra produksi baik dari dalam Provinsi Aceh (Aceh Tengah dan Bener Meriah) maupun luar Aceh, akibat cuaca buruk yang menyebabkan gagal

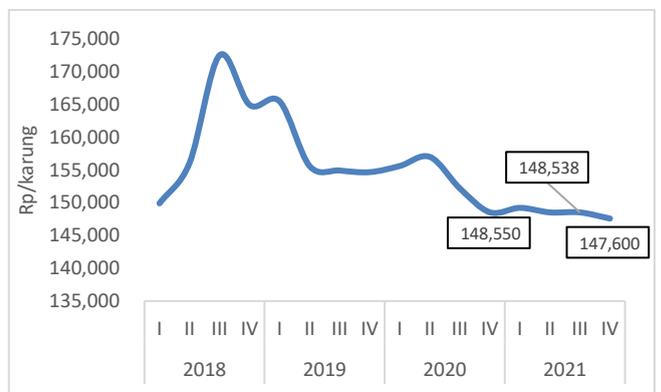
panen.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh

Grafik 3.3. Produksi Ikan yang didaratkan di UPTD Pelabuhan Perikanan Kutaraja tahun 2021

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau tertahan oleh deflasi yang terjadi pada komoditas cabai merah, bawang merah, beras, jeruk nipis/limau dan telur ayam ras. Penurunan harga beras disebabkan sentra-sentra produksi beras yang ada di Aceh utamanya di Pidie Jaya dan Aceh Utara sedang memasuki masa panen sehingga permintaan tercukupi.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.4. Perkembangan Harga Beras

Penurunan harga tersebut sejalan dengan dengan hasil SPH (Grafik 3.4) yang menyatakan bahwa rata-rata harga bawang merah pada periode laporan tercatat sebesar Rp147.600/Karung atau menurun dibandingkan dengan rata-rata harga pada periode yang sama tahun lalu di level Rp148.550/Kg dan juga menurun jika dibandingkan triwulan sebelumnya (Rp148.538/Kg).

Kel. Pakaian dan Alas Kaki

Tabel 3.3. Inflasi Kel, Pakaian dan Alas Kaki

INFLASI 0,64% (yoy)		ANDIL 0,05%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Gaun Anak	0,02	Baju Muslim Wanita	-0,04
Seragam Sekolah Anak	0,02	Blus Wanita	-0,01
Baju Muslim Anak	0,01	-	-
Sandal Karet Pria	0,01	-	-
Kemeja Panjang Katun Pria	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2021, inflasi kelompok pakaian dan alas kaki di Aceh tercatat sebesar 0,64% (yoy) dengan andil 0,048% lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,038%, yoy). Tekanan inflasi yang terjadi tersebut utamanya didorong oleh sub kelompok pakaian dengan andil inflasi sebesar 0,041% (yoy). Barang-barang penyumbang inflasi pada sub kelompok ini antara lain, gaun anak, seragam sekolah anak, baju muslim anak, sandal karet pria, dan kemeja panjang katun pria. Peningkatan harga produk pakaian tersebut terjadi seiring dengan adanya peningkatan permintaan dikarenakan mulai maraknya pesta pernikahan dan perayaan keagamaan seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial. Selain itu, beberapa daerah di Aceh menerapkan sekolah tatap muka terbatas yang berdampak pada kenaikan harga seragam sekolah anak. Di sisi lain, terjadi deflasi untuk barang-barang yang dikenakan oleh wanita antara lain, baju muslim wanita dan blus wanita.

Kel. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Secara tahunan, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 1,74% (yoy) dengan andil sebesar 0,32% untuk inflasi secara keseluruhan pada triwulan laporan lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,24%, yoy). Inflasi pada kelompok ini secara tahunan terutama didorong oleh subkelompok

pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan sewa rumah dengan andil sebesar 0,18% (yoy). Secara lebih detail, barang/jasa pemberi andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah sewa rumah, besi beton, tukang bukan mandor, kontrak rumah, dan semen.

Tabel 3.4. Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar

INFLASI 1,74% (yoy)		ANDIL 0,32%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Sewa Rumah	0,09	-	-
Besi Beton	0,08	-	-
Tukang Bukan Mandor	0,04	-	-
Kontrak Rumah	0,04	-	-
Semen	0,03	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan tarif jasa tukang bukan mandor dan barang konstruksi lainnya seperti besi beton dan semen seiring dengan masih berlanjutnya pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Aceh. Selain itu, peningkatan juga didorong oleh masih berlanjutnya proses pembangunan proyek yang dimiliki oleh pemerintah, seperti pembangunan proyek Jalan Tol Sigli – Banda Aceh seksi 2 Seulimun – Jantho (6 Km), seksi 5 Blang Bintang – Kuto Baro (8 Km) dan seksi 6 Kuto Baro - Baitussalam (5 Km), PLTA Peusangan, Bendungan Keureuto, serta jalur kereta api Aceh-Sumut. Lebih lanjut, berbagai proyek swasta utamanya pusat perbelanjaan yang sedang berlangsung juga turut meningkatkan permintaan akan jasa tukang bukan mandor dan barang untuk konstruksi. Selanjutnya, kenaikan upah tukang bukan mandor atau buruh bangunan mengikuti kenaikan upah minimum daerah atau sektoral.

Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Tabel 3.5. Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT

INFLASI 2,43% (yoy)		ANDIL 0,11%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Kulkas/Lemari Es	0,01	-	-
Sabun Detergen Bubuk/Cair	0,01	-	-
Upah Asisten Rumah Tangga	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2021, inflasi kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga di Aceh tercatat sebesar 2,43% (yoy) dengan andil terhadap inflasi keseluruhan sebesar 0,11% lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,08%, yoy). Inflasi pada kelompok ini secara tahunan terutama didorong oleh subkelompok barang dan layanan pemeliharaan rumah tangga rutin dengan andil inflasi sebesar 0,04% (yoy). Selain itu, inflasi juga disumbang oleh sub kelompok peralatan rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,03% (yoy). Secara lebih detil, barang atau komoditas penyumbang inflasi terbesar pada kelompok ini adalah kulkas/lemari es, sabun detergen bubuk/cair, dan upah asisten RT dengan andil masing-masing sebesar 0,01% (yoy).

Kel. Kesehatan

Pada triwulan IV 2021, inflasi kelompok kesehatan tercatat sebesar 1,46% (yoy) dengan andil untuk inflasi keseluruhan sebesar 0,03% lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,05%, yoy). Tekanan inflasi pada triwulan laporan disebabkan oleh subkelompok jasa rawat jalan dengan andil inflasi sebesar 0,02% (yoy). Secara lebih detil, komoditas penyumbang inflasi terbesar kelompok ini adalah tarif dokter spesialis dengan andil 0,03% (yoy) dan obat dengan resep dengan andil 0,01% (yoy). Harga obat-obatan tertentu khususnya untuk terapi COVID-19 mengalami kenaikan akibat lonjakan kasus di Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Aceh. Meskipun harga telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor Hk.01.07 / Menkes /4826 /2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Tabel 3.6. Inflasi Kel. Kesehatan

INFLASI 1,46% (yoy)		ANDIL 0,05%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tarif Dokter Spesialis	0,03	-	-
Obat Dengan Resep	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Transportasi

Tabel 3.7. Inflasi Kel. Transportasi

INFLASI 4,76% (yoy)		ANDIL 0,57%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Angkutan Udara	0,52	-	-
Sepeda Motor	0,05	-	-
Mobil	0,04	-	-
Pemeliharaan/Service	0,04	-	-
Pelumas/Oli Mesin	0,02	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok transportasi pada triwulan IV 2021 mengalami inflasi sebesar 4,76% (yoy) dengan andil 0,57% terhadap inflasi secara keseluruhan lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,22%, yoy). Inflasi yang terjadi tersebut utamanya didorong oleh subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 0,46% (yoy). Meningkatnya harga jasa angkutan penumpang disebabkan oleh meningkatnya tarif angkutan udara yang mendorong inflasi pada subkelompok jasa angkutan udara. Pada bulan triwulan IV 2021 jumlah penumpang yang tercatat di bandar udara SIM mencapai 92.520 orang atau mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,33% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 dengan 91.038 orang. Kenaikan tersebut turut menunjang kenaikan harga tiket pesawat udara pada periode tersebut. Selain itu, jumlah rute penerbangan yang ditawarkan masih terbatas yang menyebabkan peningkatan harga.

Pada periode laporan, inflasi juga didorong oleh

subkelompok pembelian kendaraan dengan andil inflasi sebesar 0,10% (yoy). Jenis kendaraan penyumbang inflasi yaitu sepeda motor dan mobil dengan andil masing-masing sebesar 0,05% (yoy) dan 0,04% (yoy). Harga kendaraan bermotor dapat dikatakan mengalami kenaikan secara rutin tiap tahunnya. Kenaikan dapat disebabkan karena adanya penambahan spek dan *features*, kenaikan bea balik nama (BBN) setiap tahunnya, faktor kenaikan biaya produksi, dan penyesuaian kurs. Menurut data Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), penjualan kendaraan baru seperti sepeda motor dan mobil di Aceh masih tinggi. Pada tahun 2021, total penjualan mobil mencapai 113.943 unit.

Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan secara tahunan pada triwulan IV 2021 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,42 (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan adalah sebesar 0,02%, sama dengan periode sebelumnya (0,02%, yoy).

Tabel 3.8. Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

INFLASI 0,42% (yoy)		ANDIL 0,02%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Laptop/ Notebook	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tekanan inflasi yang terjadi tersebut disebabkan oleh sub kelompok peralatan komunikasi dan informasi dengan andil inflasi sebesar 0,02% (yoy) terutama pada notebook/laptop yang mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,01% (yoy). Kenaikan harga barang ini masih dipicu oleh peningkatan permintaan akibat pandemi dimana notebook/laptop merupakan salah satu perangkat yang dibutuhkan untuk menunjang produktivitas atau kegiatan belajar dan bekerja dari rumah. Hal ini juga diperburuk oleh kelangkaan stok komponen *chip* semikonduktor global, *processor*, dan material lainnya yang berdampak pada meningkatnya harga laptop.

Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Pada triwulan IV 2021, inflasi kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya secara tahunan tercatat sebesar 0,68% (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan sebesar 0,009% lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,008%, yoy). Inflasi yang terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga dan budaya memiliki andil inflasi yang relatif kecil dan tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi utamanya didorong oleh subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah dengan andil inflasi sebesar 0,007% (yoy). Barang yang mengalami kenaikan harga yaitu buku tulis bergaris dengan andil inflasi sebesar 0,002% (yoy).

Tabel 3.9. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

INFLASI 0,68% (yoy)		ANDIL 0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Buku Tulis	0,002	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Pendidikan

Inflasi kelompok pendidikan secara tahunan pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 0,74% (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan adalah sebesar 0,02%, sama apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (0,02%). Inflasi utamanya terjadi pada subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini dengan andil inflasi sebesar 0,01% (yoy). Kenaikan biaya terjadi pada sekolah dasar (SD) dengan andil sebesar 0,01% (yoy).

Tabel 3.10. Inflasi Kel. Pendidikan

INFLASI 0,74% (yoy)		ANDIL 0,02%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
SD	0,01	-	-
Bimbingan Belajar	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Selain itu, inflasi juga didorong oleh subkelompok pendidikan lainnya dengan andil sebesar 0,01% (yoy) utamanya didorong oleh kenaikan biaya bimbingan belajar andil inflasi sebesar 0,01% (yoy).

Secara umum, kenaikan biaya pendidikan terjadi setiap tahunnya. Kenaikan rata-rata biaya pendidikan di Indonesia sebesar 10%-15% per tahun untuk keperluan operasional, pengembangan, dan lain-lain. Di tengah pandemi, biaya pendidikan tetap mengalami kenaikan karena kegiatan belajar mengajar yang tetap dilakukan meski secara daring.

Kel. Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran

Tabel 3.11. Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

INFLASI 0,86% (yoy)		ANDIL 0,07%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Nasi Dengan Lauk	0,03	-	-
Teh Siap Saji	0,02	-	-
Kopi Siap Saji	0,01	-	-
Mie	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada periode laporan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,86% (yoy) dengan andil sebesar 0,07% terhadap inflasi secara keseluruhan lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,06%, yoy). Inflasi terjadi pada subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman dengan andil sebesar 0,07% (yoy). Kenaikan terjadi pada nasi dengan lauk, teh siap saji, kopi siap saji, dan Mie. Peningkatan harga pada produk makanan olahan tersebut sejalan dengan peningkatan inflasi kelompok bahan makanan khususnya komoditas ikan, yaitu ikan tongkol, tuna, dan dencis. Kenaikan harga pada teh dan kopi siap saji lebih didorong oleh kenaikan harga bahan baku teh dan kopi. Berdasarkan data *Bloomberg*, harga kopi arabika dunia pada Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 144% (yoy).

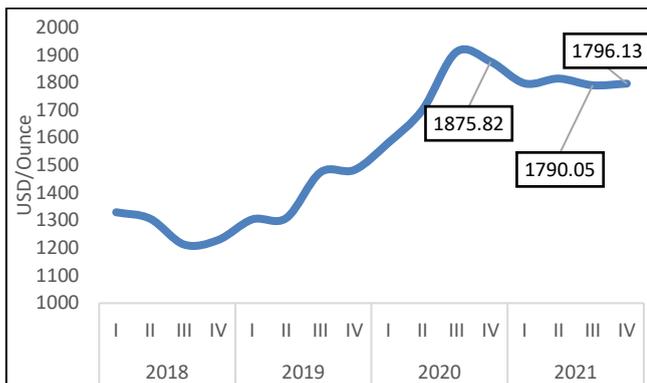
Kel. Perawatan Pribadi & Jasa

Tabel 3.12. Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

INFLASI 0,92% (yoy)		ANDIL 0,06%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Shampo	0,02	Emas Perhiasan	-0,02
Pasta Gigi	0,02	-	-
Sabun Mandi Cair	0,02	-	-
Bedak	0,01	-	-
Hand Body Lotion	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2021, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya secara tahunan mengalami inflasi sebesar 0,92% (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan sebesar 0,06% atau kembali meningkat dibanding periode sebelumnya yang sempat melambat (-0,14%, yoy). Inflasi utamanya terjadi pada subkelompok perawatan pribadi dengan andil inflasi sebesar 0,09% (yoy). Komoditas yang menyebabkan inflasi pada subkelompok ini adalah shampo, pasta gigi dan sabun mandi cair dengan andil inflasi masing-masing 0,02% (yoy). Lebih lanjut, subkelompok perawatan pribadi lainnya menunjukkan deflasi dengan andil sebesar -0,02% (yoy). Komoditas yang menyebabkan deflasi pada subkelompok ini adalah emas perhiasan yang memiliki andil sebesar -0,02% (yoy). Penurunan harga yang terjadi pada komoditas emas perhiasan sejalan dengan melandainya harga komoditas emas dunia yang didorong mulai meningkatnya kepastian ekonomi global yang tergambar dari mulai turunnya kasus pandemi COVID-19 di berbagai belahan dunia. Hal tersebut juga menggambarkan pulihnya ekonomi dengan menurunnya permintaan komoditas emas sebagai aset *safe haven*.



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 3.6. Perkembangan Harga Emas Dunia

Meskipun demikian, harga emas dunia pada triwulan III tidak serendah triwulan IV, seiring dengan hadirnya covid-19 varian baru, omicron. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2020, harga emas dunia saat ini berada di posisi yang lebih rendah. Data *Bloomberg* memperlihatkan rata-rata harga emas dunia (Grafik 3.6) pada triwulan IV berada pada level USD1.796,13/ounce. Harga tersebut naik dibandingkan dengan harga pada periode sebelumnya (USD1.790,05/ounce). Namun, menurun signifikan apabila dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 pada USD1.875,82/ounce. Selanjutnya, barang-barang pada kelompok perawatan pribadi dan jasa yang menyebabkan inflasi lainnya adalah bedak dan *hand body lotion* dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,01% (yoy).

3.3. Tracking Inflasi Triwulan I 2022

Secara *month-to-month* pada bulan Januari 2022 Provinsi Aceh mengalami inflasi 1,04% (mtm) sedangkan secara tahunan mengalami inflasi 2,50% (yoy). Angka inflasi Aceh pada bulan laporan (1,04%, mtm) tercatat terakselerasi setelah pada bulan sebelumnya tercatat lebih rendah (0,71%, mtm). Secara tahunan, inflasi pada Januari 2022 tercatat sebesar 2,50%, lebih rendah dibandingkan pada Januari 2021 yang berada pada angka 3,72% (yoy). Secara *year-to-date*, hingga Januari 2022 inflasi berada pada laju 1,04% dimana angka tersebut berada dibawah rentang target inflasi nasional, yaitu sebesar 3,0% ± 1%. Secara bulanan, faktor pendorong utama inflasi di Aceh

pada periode laporan berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dan kelompok perumahan, air, gas dan bahan bakar, terutama pada komoditas Ikan Tongkol (andil 0,15%), Bahan Bakar Rumah Tangga (andil 0,14%), Telur Ayam Ras (andil 0,09%), Sewa Rumah (andil 0,08%), dan Udang Basah (andil 0,08%).

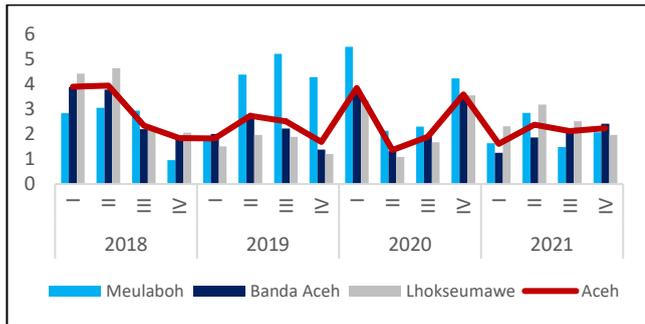
Pada bulan Maret 2022, secara bulanan Aceh diperkirakan akan kembali mengalami inflasi dibanding bulan Februari 2022 yang mengalami deflasi secara mtm. Perkiraan inflasi yang masih melandai tersebut didasari oleh pantauan Survei Pemantauan Harga (SPH yang menunjukkan penurunan harga untuk beberapa komoditas. Namun, masih terdapat potensi inflasi sebagai akibat persiapan bulan Ramadhan. Lebih lanjut, penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah akan semakin menunjang perlambatan inflasi. Kondisi cuaca pada awal bulan Maret 2022 memiliki potensi cuaca buruk berdasarkan data BMKG yang dapat berakibat pada hasil tangkapan ikan nelayan. Kendati demikian, meningkatnya tingkat infeksi covid-19 varian omicron pada awal tahun 2022 dapat meningkatkan risiko dimulainya kembali pembatasan sosial yang akan berimbas pada inflasi.

3.4. Inflasi Spasial

Apabila dilihat secara spasial, pada Desember 2021 inflasi terjadi di seluruh kota pantauan di Provinsi Aceh. Secara tahunan, Kota Banda Aceh menjadi kota yang mengalami inflasi paling tinggi, yakni 2,41% (yoy), diikuti kota Meulaboh (2,07%, yoy) dan kota Lhokseumawe (1,97%, yoy). Sejalan dengan hal tersebut, secara bulanan terjadi inflasi di seluruh kota pantauan di Provinsi Aceh. Secara bulanan, inflasi tertinggi terjadi di Meulaboh dengan laju inflasi 0,81% (mtm), Banda Aceh (0,74%, mtm) dan Lhokseumawe (0,59%, mtm).

Komoditas utama penyumbang inflasi bulanan pada bulan Oktober di Meulaboh adalah ikan tongkol (0,49%), ikan dencis (0,33%), ikan kembung (0,14%), kangkung (0,09%) dan telur ayam ras (0,07%). Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi adalah cabai merah (-0,25%), udang

basah (-0,04), dan ikan kakap merah (-0,01%).



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.7. Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh (%), yoy

Selanjutnya, penyumbang inflasi bulanan di Kota Banda Aceh adalah ikan tongkol (1,32%), angkutan udara (1,21%), telur ayam ras (0,29%), ikan dencis (0,28%) dan daging ayam ras (0,20%). Sementara komoditas penyumbang deflasi di Banda Aceh pada Desember 2021 adalah cabai merah (-0,76%), makanan ringan (-0,13%) dan udang basah (-0,08%). Selanjutnya, penyumbang inflasi bulanan di Kota Lhokseumawe adalah ikan tongkol (0,46%), udang basah (0,18%), beras (0,15%), angkutan udara (0,15%) dan ikan tuna (0,14%). Komoditas cabai merah dan bawang merah menjadi penahan inflasi di Kota Lhokseumawe dengan andil deflasi berturut-turut sebesar -0,33% dan -0,05%.

Inflasi Aceh pada triwulan I 2022 diperkirakan akan meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh harga komoditas volatile food yang mulai meningkat sejalan dengan meningkatnya permintaan sebagai akibat menyambut bulan Ramadhan. Selain itu, harga emas diperkirakan berangsur meningkat sejalan dengan ketidakpastian global akibat covid-19 varian omicron. Selain itu, terdapat potensi kembali dilakukan pembatasan sosial sebagai efek dari covid-19 varian omicron.

3.5. Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh akan terus berupaya melakukan pengendalian harga, baik melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam *High level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) triwulan I 2021, telah disepakati beberapa program kerja prioritas yang akan menjadi fokus pengendalian inflasi sepanjang tahun 2021 antara lain:

1. Penguatan basis data terintegrasi
2. Optimalisasi program sistem resi gudang
3. Operasi pasar dan sidak pasar
4. Pemantauan produksi komoditas utama & pengembangan kluster pangan
5. Penguatan koordinasi TPID-satgas pangan untuk memitigasi praktek penimbunan
6. Revitalisasi aset daerah yang dapat mendukung pengendalian inflasi

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga, tercatat berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh triwulan II, meliputi:

- a. Penyelenggaraan *High Level Meeting* TPID Provinsi Aceh pada 31 Maret 2021. Rapat Koordinasi *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh ini dilakukan dalam rangka evaluasi laju inflasi Aceh terkini terutama menjelang Ramadhan sekaligus mengevaluasi berbagai program kerja pengendalian inflasi.
- b. Penyelenggaraan *High Level Meeting* TPID tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. HLM TPID Kota Banda Aceh dilaksanakan pada 21 Juni 2021 dan HLM TPID Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan pada 28 Juni 2021. Pelaksanaan HLM tersebut merupakan penguatan koordinasi utamanya dalam menyambut hari raya Idul Adha. Selanjutnya telah dilakukan *High Level Meeting* di beberapa Kabupaten/Kota non-IHK yaitu HLM TPID Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksanaan HLM pada kota non-IHK bertujuan untuk meningkatkan *awareness* dan merumuskan program-program pengendalian inflasi.
- c. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas bawang merah antara Kota Banda Aceh melalui Bitata Food

- dan Kelompok Tani di Kabupaten Pidie. Saat ini sedang dilakukan penjajakan KAD untuk komoditas daging ayam ras melalui PT. Kelola Pangan Indonesia dengan Rumah Potong Hewan (RPH) di kawasan Jawa Timur.
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Satgas Pangan dalam rangka ketersediaan stok dan stabilitas harga bahan pangan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, 30 April 2021. Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Dirreskrimsus Polda Aceh, Kepala Dinas Pangan Aceh, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, dan sejumlah *stakeholder* penting lainnya. Satgas Pangan juga melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional dan kunjungan ke gudang BULOG pada 6 Mei 2021 untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pangan.
 - e. Penyelenggaraan rapat penguatan peran TPID di Aceh dalam pengendalian inflasi telah dilaksanakan untuk meningkatkan peran TPID di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan TPID dari 23 Kabupaten/Kota. Pada kegiatan tersebut turut dihadiri wakil sekretaris Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
 - f. Peningkatan produksi (IP 400 seluas 30 Ha), Gapoktan Cot Malem Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Peningkatan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan pada 5 Kabupaten dengan luas 1.900 Ha ditambah area penyangga seluas 1.900 Ha, dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (APBN) dan Pengawasan Mutu, serta Penyediaan dan Peredaran Benih/bibit Hortikultura (APBA) oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
 - g. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan melalui Pasar Mitra Tani Aceh (PMT) serta Pelaksanaan Pasar Murah menjelang Ramadhan dan Idul Fitri oleh Dinas Pangan Aceh.
 - h. Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah dan Pemanfaatan teknologi yang mendukung sisi hulu dan hilir pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi oleh Dinas Peternakan Aceh.
 - i. Penyelenggaraan Pasar Murah/Operasi Pasar dalam rangkaantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri serta koordinasi dengan BULOG terkait ketersediaan bahan pangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
 - j. Optimalisasi Data Jembatan Timbang untuk mendata pasokan barang yang masuk dan keluar dari Aceh oleh Dinas Perhubungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran sektor transportasi terhadap pengendalian inflasi Aceh. Tahapan yang dilakukan antara lain: 1) melakukan koordinasi dengan BPTD Wilayah 1 Aceh, 2) melakukan survey ke Jembatan Timbang dan 3) melakukan pengumpulan data.
 - k. Penyelenggaraan Bazaar Rumah Ikan Higienis, Safari Gemar Ikan, dan Kampanye Gemar Makan Ikan oleh Dinas Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh bekerjasama dengan kelompok binaan Dinas menyelenggarakan pasar murah produk ikan segar maupun produk olahan hasil perikanan.
 - l. Melakukan penjualan langsung bahan pangan pokok melalui RPK yang dilakukan oleh Bulog bekerjasama dengan masyarakat yang memiliki warung, penjualan langsung ke distributor terutama komoditas gula, penjualan langsung ke pasar umum, dan Gerakan Stabilisasi Harga Pangan (GSHP).
 - m. Penyelenggaraan Toko Tani Indonesia Center (TTI-C) di Provinsi Aceh, TTI-C menjual berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau dan diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi pangan kepada masyarakat. Hingga saat ini telah tersedia sebanyak 172 TTI yang tersebar di 12 Kab/Kota di Aceh.
 - n. Melakukan berbagai upaya lainnya dalam

rangka menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga, antara lain mengintensifkan monitoring cuaca dan perkembangan harga bahan pangan pokok di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis/PIHPS.

Selanjutnya, TPID Provinsi Aceh telah melaksanakan berbagai kegiatan di triwulan III, meliputi:

- a. Penyelenggaraan *High Level Meeting* TPID Aceh Singkil pada 20 Agustus 2021. Rapat Koordinasi *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh Singkil ini dilakukan dalam rangka evaluasi laju inflasi Aceh serta mengevaluasi berbagai program kerja pengendalian inflasi.
- b. Penyelenggaraan Pasar Murah/Operasi Pasar dalam rangka antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) lainnya untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam membeli barang yang murah dan terjangkau. Kegiatan ini dilaksanakan di 23 Kabupaten/Kota sepanjang bulan Agustus dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan BULOG terkait ketersediaan bahan pangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
- c. Optimalisasi Data Jembatan Timbang untuk mendata pasokan barang yang masuk dan keluar dari Aceh oleh Dinas Perhubungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran sektor transportasi terhadap pengendalian inflasi Aceh. Tahapan yang dilakukan antara lain: 1) melakukan koordinasi dengan BPTD Wilayah 1 Aceh, 2) melakukan survey ke Jembatan Timbang dan 3) melakukan pengumpulan data.

Pada triwulan IV, TPID Provinsi Aceh juga telah melaksanakan berbagai kegiatan, meliputi:

- a. Penyelenggaraan *High Level Meeting* TPID Kota Subulussalam pada 7 Oktober 2021. Rapat Koordinasi *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh Singkil ini dilakukan dalam rangka evaluasi laju inflasi

Aceh serta mengevaluasi berbagai program kerja pengendalian inflasi.

- b. Penyelenggaraan *Capacity Building* TPID se-Provinsi Aceh pada 10 November 2021. *Capacity Building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Aceh ini dilakukan dalam rangka penguatan peran TPID Aceh dalam pengendalian inflasi serta untuk meningkatkan kapasitas para anggota TPID

Lebih lanjut, untuk menekan laju inflasi dalam jangka menengah, maka telah disusun *Roadmap* (peta jalan) Pengendalian Inflasi Daerah Aceh tahun 2019-2021 dengan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dengan rincian program sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga
 - Penyediaan komoditas pangan strategis murah melalui optimalisasi Toko Tani Indonesia Center (TTI-C) dan pasar/bazar murah terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
 - Perbaikan manajemen pengelolaan kilang padi (permodalan, pemasaran, dan penyediaan stok).
 - Penyusunan neraca pangan.
 - Penguatan kolaborasi dengan Satgas Pangan dalam menjaga stabilisasi harga.
 - Pengawasan penyaluran LPG bersubsidi (3 Kg) dan program konversi LPG.
 - Pengembangan PIHPS Produsen dan optimalisasi penggunaannya.
 - Diversifikasi konsumsi bahan makanan pokok melalui sosialisasi secara masif, khususnya untuk produk olahan ikan dan daging beku.
2. Ketersediaan Pasokan
 - Peningkatan produksi:
 - i. Optimalisasi bantuan benih dan sarana produksi lainnya.
 - ii. Program peningkatan populasi ternak melalui kegiatan sapi induk wajib bunting (SIWAB), kegiatan Bedah Miskin Rakyat Sejahtera (Bekerja), kegiatan pengembangan kawasan peternakan.
 - iii. Diseminasi dan informasi mengenai

musim dan lalu lintas ikan kepada nelayan.

- Pemanfaatan Sarana Sistem Rantai Dingin; Gudang Beku Terpadu/*Integrated Cold Storage* (ICS) Lampulo, Idi, Aceh Selatan, Simeuleu, dan Sabang.
- Pengembangan 17 Gapoktan PUPM di beberapa Kabupaten di Aceh.
- Pengenalan SRG kepada pelaku usaha dan pengawasan pengelola gudang SRG.

3. Kelancaran Distribusi

- Kerja sama perdagangan antar daerah, baik antar Kab/Kota di Aceh maupun dengan provinsi lain, dalam rangka pemenuhan kebutuhan komoditas pangan strategis.
- Melakukan fasilitasi kerja sama antar produsen maupun pedagang lintas daerah.
- Optimalisasi perdagangan antar pulau dan meningkatkan kelancaran arus distribusi.
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung kelancaran distribusi komoditas pangan strategis, baik menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara.

- Pemberian subsidi transportasi alternatif.

4. Komunikasi Efektif

- Perbaikan kualitas data sebagai dasar kebijakan:
 - i. Penyusunan neraca pangan Kab/Kota sebagai dasar untuk menjaga stok pangan dan mendorong terjalannya kerja sama perdagangan antar daerah.
 - ii. Inventarisasi komoditas utama surplus dan defisit pada Kab/Kota di Aceh.
 - iii. Tersedianya informasi harga pangan strategis di 23 Kab/Kota untuk komoditas bahan pangan strategis.
- Optimalisasi penyampaian informasi harga pangan strategis di berbagai lokasi di Kab/Kota melalui berbagai media.
- Mendukung kebijakan *administered prices*, termasuk pengawasan tarif angkutan udara.
- Melakukan peningkatan kapasitas anggota TPID.
- Komunikasi yang efektif di berbagai media d.r. membentuk persepsi positif masyarakat.

Perkembangan Harga dan Pasokan Minyak Goreng

Komoditas minyak goreng menjadi salah satu penyumbang inflasi dengan andil sebesar 0,55% pada periode laporan. Harga minyak goreng di Aceh pada triwulan IV 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hingga mencapai Rp 21,250 per liter. Data Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan oleh BI menunjukkan bahwa harga minyak goreng di Aceh cenderung stabil pada periode 2018 hingga triwulan III 2021.

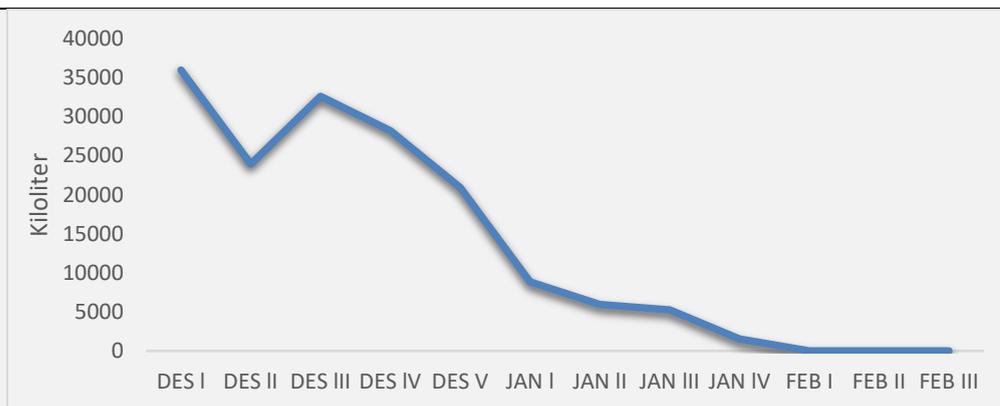


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.7. Data SPH Minyak Goreng di Aceh, 2018-2021

Secara umum, peningkatan harga minyak goreng disebabkan oleh meningkatnya harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia yang turut meningkatkan harga produk turunannya. Hal ini berimbas pada harga minyak goreng dalam negeri yang mulai menanjak pada akhir tahun 2021. Sebagai akibat naiknya harga minyak goreng, pada akhir tahun 2021 Pemerintah melakukan stabilisasi harga melalui penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan harga sebagai berikut; Rp. 14.000 untuk kemasan premium, Rp. 13.500 untuk kemasan sederhana dan Rp. 11.500 untuk kemasan curah. Hal ini dilakukan pemerintah melalui skema subsidi pada salah satu komoditas sembako tersebut.

Sejak Januari 2022, terpantau melalui PIHPS bahwa harga minyak goreng kemasan di Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh belum menunjukkan harga penurunan. Harga tersebut masih stabil di kisaran harga Rp 21.750/kg. Menelaah lebih lanjut, pasokan minyak goreng ke pasar di Banda Aceh (Ulee Kareng dan Al Mahirah) mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama pada Februari 2022. Minyak goreng masih dipasok dari Kota Medan. Selanjutnya, di pasar modern (Suzuya) juga terjadi kelangkaan stok diakibatkan produsen belum mengirimkan stok. Namun, pada akhir bulan Februari terpantau bahwa harga minyak goreng sudah mulai turun seiring dengan stok minyak goreng sudah mulai memasuki pasar.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.8. Data Pasokan Minyak Goreng di Aceh, 2022

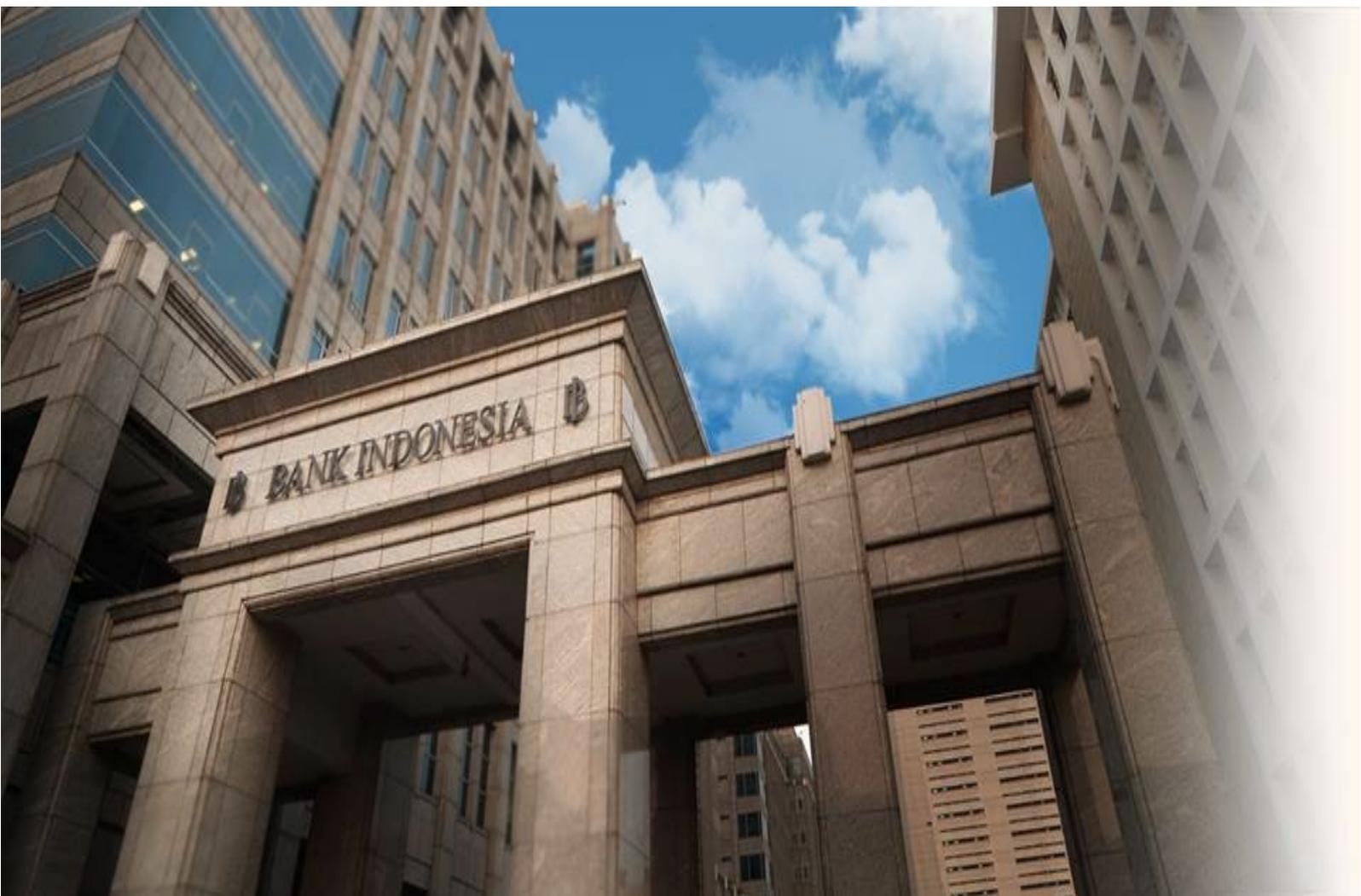
Namun, FGD antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dengan KPwBI Riau menyimpulkan bahwa seharusnya tidak terjadi kelangkaan. Hal ini disebabkan oleh faktor proses distribusi dari pabrik ke ritel yang membutuhkan waktu, sehingga terjadi kekosongan stok di daerah. Lebih lanjut, pada triwulan I 2022, produksi CPO berada pada posisi yang lebih rendah karena *low season* dan tidak terjadi puncak panen di akhir 2021. Namun hal tersebut tidak seharusnya mengakibatkan kelangkaan minyak goreng.

Dalam guna mengatasi minyak goreng, Bank Indonesia telah melakukan rapat bersama dengan TPID untuk mengimplementasikan strategi 4K. Usulan Bank Indonesia mengenai minyak goreng disampaikan sebagai berikut:

- Ketersediaan Pasokan
 - Mengawal realisasi kuota minyak goreng 2000 ton yang telah dialokasikan pemerintah pusat untuk Provinsi Aceh
 - *Long term strategy*: mendorong perkembangan industri minyak goreng di Aceh
- Keterjangkauan Harga
 - Melakukan operasi pasar dengan menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) Pemerintah Pusat per 1 Februari 2022.
- Kelancaran Distribusi
 - Pelaksanaan sidak pasar bekerjasama dengan Satgas Pangan untuk mengantisipasi praktik penimbunan oleh produsen maupun distributor di pasar-pasar utama Banda Aceh
- Komunikasi Efektif
 - Melakukan himbauan melalui pers rilis melalui berbagai platform media cetak/elektronik terkait belanja bijak dan mencegah *panic buying* masyarakat 6 liter untuk konsumsi rumah tangga tiap pekannya

Melalui strategi-strategi tersebut, diharapkan praktik penimbunan stok tidak terjadi di Provinsi Aceh. Serta, harga minyak goreng di Provinsi Aceh dapat segera mengikuti HET yang telah di tetapkan Pemerintah. Hal ini semata-mata dilakukan agar kebutuhan konsumsi masyarakat tetap aman. Lebih lanjut, problematika minyak goreng harus dengan cepat diselesaikan mengingat waktu yang sudah mendekati bulan Ramadhan.

--000--



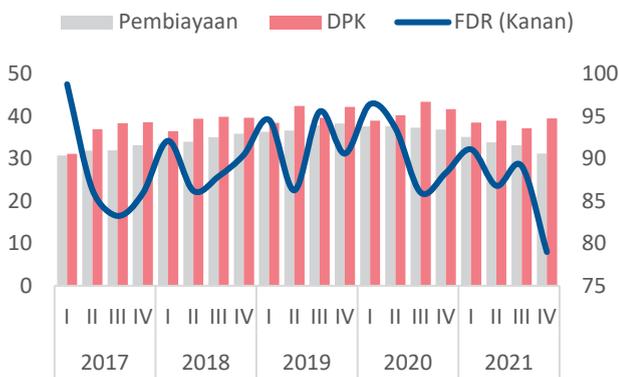
BAB IV

PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 tetap terjaga. Meskipun penyaluran pembiayaan masih mengalami kontraksi, namun terdapat peningkatan dana pihak ketiga dan kualitas pembiayaan yang tergambar dari penurunan NPF. Selain itu, terdapat penurunan pertumbuhan pembiayaan berdasarkan lokasi proyek yang sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

4.1. Kinerja Perbankan

Aktivitas perbankan di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 masih terpantau terkontraksi namun membaik dan dalam kondisi yang tetap terjaga. Masih belum meredanya pandemi COVID-19 menekan kinerja berbagai kegiatan usaha yang berdampak pada kinerja sektor perbankan. Perlambatan tercermin dari beberapa indikator seperti penurunan pertumbuhan penyaluran pembiayaan/kredit berdasarkan lokasi bank. Selanjutnya, terjadi peningkatan nilai dana pihak ketiga (DPK) dan kualitas penyaluran pembiayaan/kredit yang tercermin dari rasio *Non-Performing Loan/Financing* (NPL/NPF) yang tetap dalam kondisi terjaga.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4. 1. Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh

Pada triwulan laporan, perbankan di Provinsi Aceh tercatat mengalami kontraksi. Namun, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kualitas pembiayaan di Provinsi Aceh mulai mengalami perbaikan. Pembiayaan perbankan di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 (berdasarkan lokasi bank) tercatat sebesar Rp31,20 triliun, terkontraksi 15,30% (yoy), atau lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi pada laju 11,15% (yoy). *Financing to Deposit Ratio* (FDR)¹ perbankan di Provinsi Aceh berada pada level 78,99% atau menurun dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 89,15%. Penurunan rasio FDR lebih disebabkan karena terjadi peningkatan

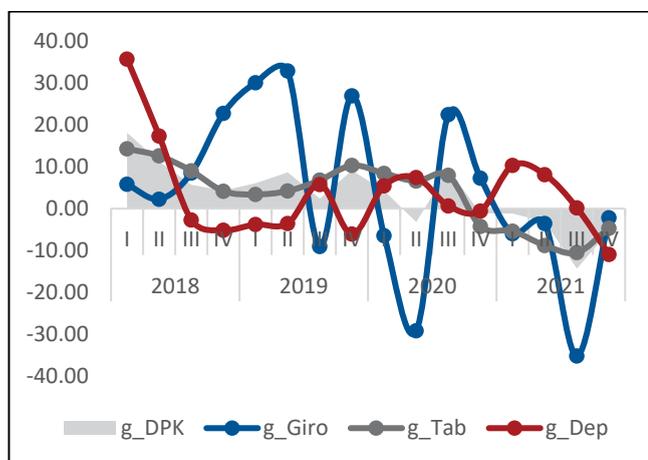
nilai DPK perbankan di Provinsi Aceh. Pada triwulan laporan, DPK tercatat sebesar Rp39,50 triliun atau terkontraksi 5,29% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi pada laju 14,28%(yoy). Aset perbankan pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar Rp52,25 triliun atau terkontraksi 10,13% (yoy), lebih baik dari triwulan III 2021 yang berada pada laju -15,83% (yoy) dengan nilai aset sebesar Rp50,47 triliun. Lebih lanjut, proporsi aset perbankan berdasarkan kelompok bank pada triwulan IV 2021 masih didominasi oleh aset yang dimiliki oleh Bank Pemerintah (BPD & Persero) yaitu sebesar 59,32% dari keseluruhan aset perbankan sedangkan sisanya sebesar 40,68% dimiliki oleh Bank Swasta. Hingga triwulan laporan, 100% aset di perbankan Aceh dimiliki oleh Bank Syariah. Peralihan aset tersebut sejalan dengan proses migrasi data sehubungan dengan implementasi qanun LKS ditahun 2022.

Berdasarkan data, pembiayaan yang disalurkan di Aceh tidak hanya dilakukan oleh perbankan di Aceh. Hal tersebut terkonfirmasi dari nominal penyaluran pembiayaan lokasi proyek yang lebih besar dari nominal penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi bank. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan laporan di Aceh mencapai Rp48,28 triliun. Sementara penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi bank tercatat sebesar Rp31,20 triliun. Pembiayaan berdasarkan lokasi proyek melanjutkan tren pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, pada triwulan IV 2021 tercatat pada laju 15,95% (yoy) sedangkan pada triwulan sebelumnya tumbuh dengan laju 2,92% (yoy).

¹FDR merupakan rasio intermediasi, yaitu rasio antara total pembiayaan (lokasi bank) dibagi dengan total DPK.

4.2. Intermediasi Perbankan

4.2.1 Kenaikan DPK Jenis Giro dan Tabungan Menjadi Faktor Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK)

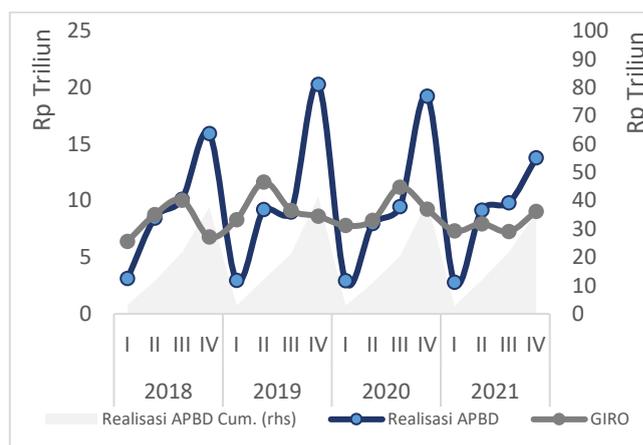


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4. 2. Perkembangan DPK (% yoy)

Penghimpunan DPK masih berkontraksi dengan laju 5,47% (yoy) namun tidak lebih dalam dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (-14,29%).

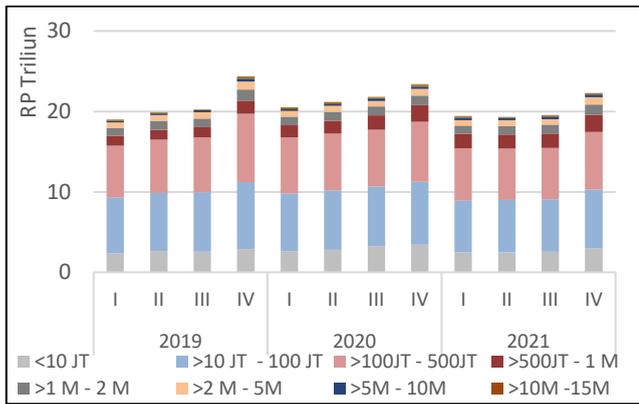
Secara nominal, DPK pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar Rp39,50 triliun, menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp41,79 triliun. Penurunan terbesar dikontribusikan oleh deposito yang berkontraksi 10,94% (yoy) dengan pangsa 20,64%, atau menurun dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,19% (yoy). Selanjutnya, pada jenis tabungan yang memiliki pangsa sebesar 56,44% dari total DPK juga mengalami kontraksi sebesar 4,65%(yoy) Sedangkan pada jenis giro yang memiliki pangsa sebesar 22,91% dari total DPK masih berkontraksi sebesar 2,16% (yoy) namun mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 35,11% (yoy). Berdasarkan kepemilikan DPK, DPK pemerintah menjadi faktor penurunan DPK pada triwulan IV 2021. DPK pemerintah berkontraksi 9,94% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 22,06% (yoy).



Sumber: Laporan Bank Umum & DJPbn Prov Aceh, diolah

Grafik 4. 3. Realisasi Belanja APBD & Perkembangan Giro

Giro tercatat masih mengalami kontraksi 2,16% (yoy), namun meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan giro milik pemerintah. Secara nominal, giro tercatat meningkat sebesar Rp1,78 triliun menjadi Rp9,05 triliun pada triwulan laporan. Peningkatan terjadi utamanya pada giro milik pemerintah sebesar Rp660,65 miliar pada triwulan laporan atau sebesar -6,58% (yoy) naik dari triwulan sebelumnya sebesar -43,10% (yoy). Peningkatan juga disebabkan oleh realisasi pendapatan yang bersumber dari dana transfer (TKDD) pada triwulan IV yang secara nominal lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Realisasi TKDD sampai dengan triwulan IV tercatat sebesar Rp33,86 triliun atau sebesar 99,28% dari pagu yang ada. Selanjutnya giro korporasi juga mengalami pertumbuhan pada triwulan laporan. Giro korporasi tercatat meningkat pada laju 17,68%(yoy) setelah triwulan sebelumnya mampu tumbuh 5,78%(yoy). Penurunan hanya terjadi di giro milik perseorangan dengan nilai Rp228,84 miliar pada triwulan laporan atau berkontraksi sebesar 57,31%(yoy).



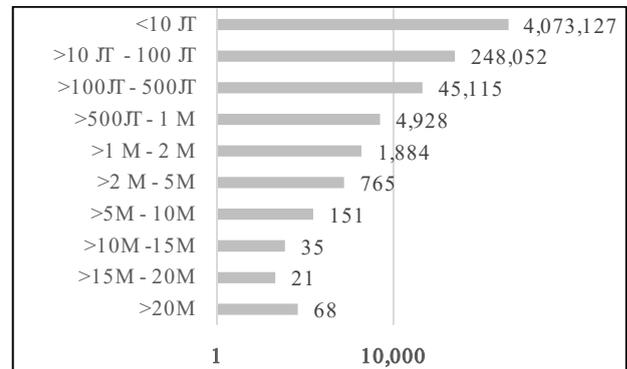
Sumber: Laporan Bank Umum diolah

Grafik 4.4. Perkembangan Nilai Tabungan (Rp Triliun)

Pada DPK jenis tabungan terkontraksi sebesar 4,65% (yoy) pada triwulan IV 2021 mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya yang disebabkan oleh pertumbuhan dari kelompok nilai tabungan antara Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta. Secara nominal, tabungan pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar Rp22,29 triliun atau meningkat Rp2,77 triliun dari triwulan sebelumnya yang berada pada posisi Rp19,52 triliun. Laju pertumbuhan tabungan masih mengalami kontraksi sebesar 4,65% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 10,48% (yoy). Peningkatan tabungan didorong oleh kelompok nilai tabungan antara Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta yang naik sebesar Rp825,8 miliar dan kenaikan pada kelompok nilai tabungan antara Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta sebesar Rp785,8 miliar dari triwulan sebelumnya. Peningkatan tabungan sejalan dengan kenaikan indeks penghasilan saat ini pada survei konsumen Bank Indonesia triwulan IV sebesar 100,30 dibandingkan dengan Triwulan III sebesar 78,90.

Perlambatan DPK jenis deposito utamanya disebabkan oleh perlambatan pada deposito milik pemerintah. Deposito pemerintah pada triwulan IV 2021 mengalami kontraksi sebesar 15,26% (yoy), bergerak melambat daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,83% (yoy). Sementara deposito korporasi secara *year on year* mengalami kontraksi lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Deposito korporasi terkontraksi sebesar 23,12% (yoy) pada triwulan IV 2021, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang terkontraksi

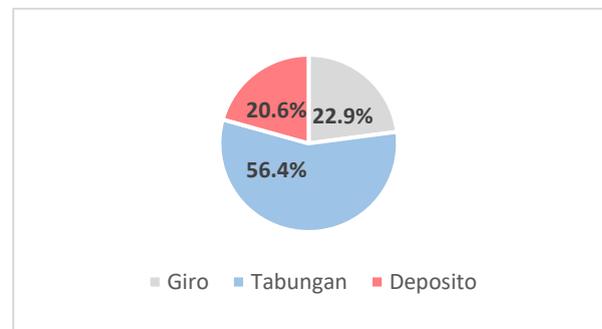
26,09%(yoy). Deposito perseorangan mengalami kontraksi sebesar 5,15% (yoy) pada triwulan IV 2021, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 9,88% (yoy).



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.5. Jumlah Rekening per Saldo

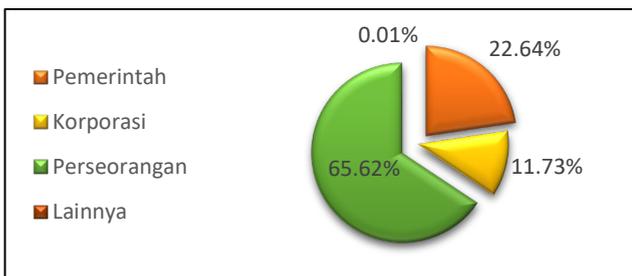
Hingga triwulan IV 2021, terdapat 4,37 juta pemegang rekening di Aceh. Nilai tersebut mengalami penurunan 851.080 kreditur dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,22 juta pemegang rekening. Penurunan pemilik rekening diperkirakan karena proses konversi dari bank konvensional menjadi syariah sebagai tindak lanjut dari penerapan Qanun LKS. Hal ini terjadi karena pemilik rekening atau nasabah yang belum mengalihkan dananya dari konvensional ke syariah yang mengakibatkan ada pergerakan dana tercatat keluar Provinsi Aceh mengingat seluruh kantor konvensional di Aceh ditutup dan dipindahkan ke unit kerja terdekat di luar Aceh. Dari keseluruhan jumlah rekening, pemegang rekening dengan saldo dibawah Rp10 juta mendominasi dengan porsi 93,12% dari total nasabah, sedangkan pemegang rekening dengan saldo diatas Rp20 miliar berjumlah 68 nasabah.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.6. Proporsi DPK Berdasarkan Jenis (%) Berdasarkan proporsinya, DPK di Provinsi Aceh

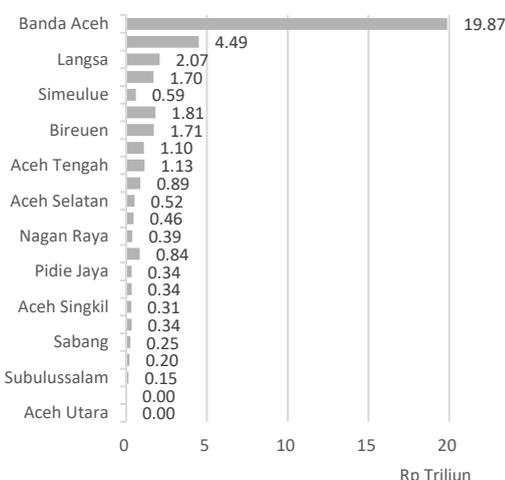
mayoritas berupa tabungan (56,4%). Sedangkan jenis deposito dan giro masing-masing memiliki porsi berturut-turut sebesar 20,6% dan 22,9%. DPK berdasarkan jenis tabungan seluruhnya berada pada perbankan syariah. Selaras dengan tabungan, DPK jenis deposito dan giro secara keseluruhan berada pada perbankan syariah. Berdasarkan kepemilikan, mayoritas dana pihak ketiga berasal dari perseorangan dengan kontribusi sebesar 65,62%. DPK yang berasal dari pemerintah dan korporasi berturut-turut memiliki proporsi sebesar 22,64% dan 11,73%.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4. 7. Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)

Secara spasial, penghimpunan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Aceh belum tersebar secara merata dan masih terkonsentrasi di wilayah ibu kota provinsi. Kota Banda Aceh menyerap 50,30% dari total DPK di Aceh atau setara dengan Rp19,87 triliun. Setelah ibu kota provinsi, wilayah Kabupaten/Kota yang mendominasi penghimpunan DPK diantaranya adalah Lhokseumawe (Rp4,49 triliun), Langsa (Rp2,07 triliun) dan Aceh Barat (Rp1,70 triliun).

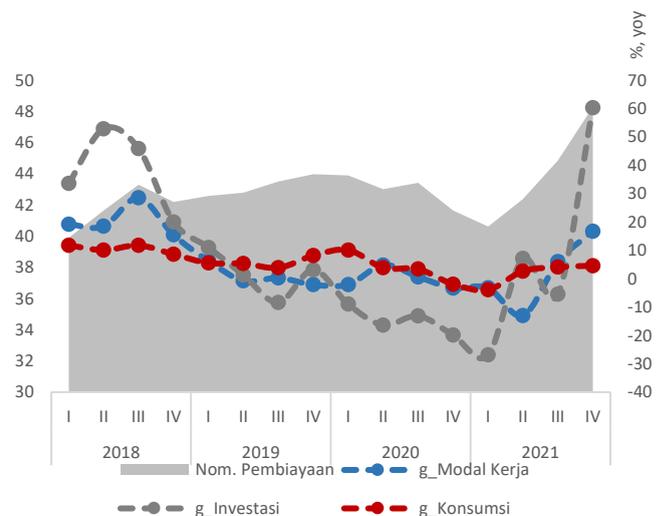


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4. 8. Penghimpunan DPK Spasial (Rp Triliun)

4.2.2. Perbaikan Penyaluran Pembiayaan Didorong Pertumbuhan Pembiayaan Modal Kerja dan Konsumsi

Secara umum, pertumbuhan pembiayaan di Provinsi Aceh berdasarkan lokasi proyek mengalami pertumbuhan sebesar 15,95% (yoy) pada triwulan IV 2021. Laju tersebut melanjutkan tren pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,92% (yoy). Perbaikan utamanya didorong oleh penyaluran pembiayaan dengan jenis penggunaan modal kerja dan konsumsi.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.9. Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Proyek dan Jenis Penggunaan

Perbaikan pertumbuhan pembiayaan pada triwulan IV 2021 didorong oleh meningkatnya penyaluran pembiayaan modal kerja dan konsumsi. Pembiayaan modal kerja, dengan pangsa sebesar 31,58%, pada triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 16,75% (yoy) setelah sebelumnya hanya tumbuh 6% (yoy). Pertumbuhan juga terjadi pada penyaluran pembiayaan konsumsi dan investasi. Konsumsi yang mendominasi penyaluran pembiayaan dengan pangsa 55,11% pada triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 4,56% (yoy) setelah sebelumnya hanya tumbuh 4,07% (yoy). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sisi konsumsi rumah tangga dan pemerintah berturut-turut yang terakselerasi di triwulan IV 2021 dengan laju 6,85% (yoy) dan 17,51% (yoy). Pada pembiayaan jenis penggunaan investasi, pada

triwulan laporan tumbuh sebesar 60,25% (yoy) atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III 2021 yang berkontraksi sebesar 5,49% (yoy). Peningkatan pembiayaan investasi juga terkonfirmasi dari laju pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi di wilayah Aceh yang tumbuh sebesar 0,29% (yoy), menguat dibandingkan triwulan III 2021 yang berkontraksi sebesar 1,45%(yoy). Secara keseluruhan, perbaikan pembiayaan pada triwulan laporan didorong utamanya oleh pembiayaan modal kerja pada lapangan usaha *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan serta sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi. Selain itu, terjadi peningkatan pembiayaan konsumsi dengan penggunaan multiguna.

Peningkatan kinerja pada pembiayaan modal kerja didorong oleh penyaluran pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan *share* sebesar 14,21% dari total pembiayaan investasi pada periode laporan. Perbaikan penyaluran pembiayaan modal kerja pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian didorong oleh pertumbuhan sebesar 457,94% (yoy) pada lapangan usaha tersebut pada triwulan IV 2021. Akselerasi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian yang mampu tumbuh signifikan di triwulan IV 2021 di laju 12,64%(yoy), setelah pada triwulan sebelumnya hanya mampu tumbuh 9,12%(yoy). Sedangkan pada lapangan usaha utama pertanian dan perikanan, pembiayaan modal kerja masih mengalami penurunan. Pembiayaan modal kerja pada lapangan usaha pertanian pada periode laporan berkontraksi sebesar 13,88% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi 7,90% (yoy), utamanya disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan pada perkebunan kelapa sawit. Pembiayaan modal kerja di triwulan IV 2021 pada lapangan usaha perikanan bergerak meningkat pada level 172,09% setelah pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh 12,19% (yoy), utamanya disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan pembiayaan pada sub lapangan usaha budidaya biota laut.

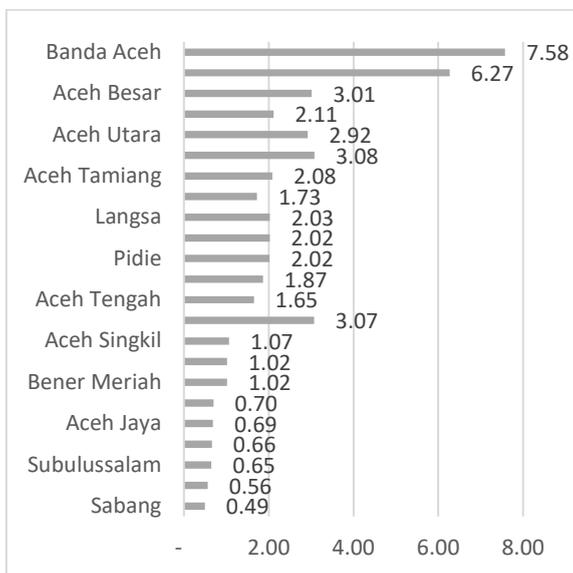
Pembiayaan konsumsi mengalami pertumbuhan didorong oleh perayaan HBKN yang cenderung lebih longgar dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembiayaan konsumsi yang pada umumnya merupakan pembiayaan rumah tangga terpantau mengalami pertumbuhan sebesar 4,56% (yoy) pada periode laporan, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,07% (yoy). Hal ini utamanya didorong oleh pertumbuhan pada pembiayaan multiguna (selain KPR dan Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Peningkatan pembiayaan konsumsi juga sejalan dengan perbaikan kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tercatat tumbuh sebesar 6,85% (yoy) pada PDRB triwulan IV 2021 atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 3,04%(yoy).

Selanjutnya, akselerasi pada pembiayaan investasi sebesar 60,25% (yoy) disebabkan oleh peningkatan pembiayaan/kredit di lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Peningkatan terjadi pada penyaluran pembiayaan/kredit pada sub lapangan usaha perusahaan tenaga panas bumi. Peningkatan pembiayaan tersebut juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan pada triwulan IV 2021 di level 12,64%(yoy).

Berdasarkan lapangan usahanya, pertumbuhan pembiayaan yang terjadi pada triwulan laporan disebabkan oleh tumbuhnya pembiayaan pada lapangan usaha *real estate* dan transportasi. Perbaikan penyaluran pembiayaan pada lapangan usaha *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan didorong oleh pertumbuhan sebesar 848,20% (yoy) pada lapangan usaha tersebut pada triwulan IV 2021. Selain itu untuk sektor pertambangan dan penggalian, pembiayaan mampu tumbuh sebesar 300,75%(yoy), pembiayaan tersebut disalurkan pada sub lapangan usaha perusahaan tenaga panas bumi dan pertambangan batu bara, penggalian gambut, dan gasifikasi batubara. Selain itu, pada lapangan usaha utama pertanian dan perdagangan, pembiayaan kembali mengalami kontraksi untuk sektor pertanian. Pembiayaan pada lapangan

usaha pertanian pada periode laporan terkontraksi cukup dalam sebesar 30,38% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 7,47% (yoy), utamanya didorong oleh penurunan pembiayaan pada perkebunan kelapa sawit. Sedangkan pembiayaan di triwulan IV 2021 pada lapangan usaha perdagangan melanjutkan tren pertumbuhan pada level 19,56%, setelah pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh 11,30% (yoy), utamanya didorong oleh pertumbuhan pembiayaan pada perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan.



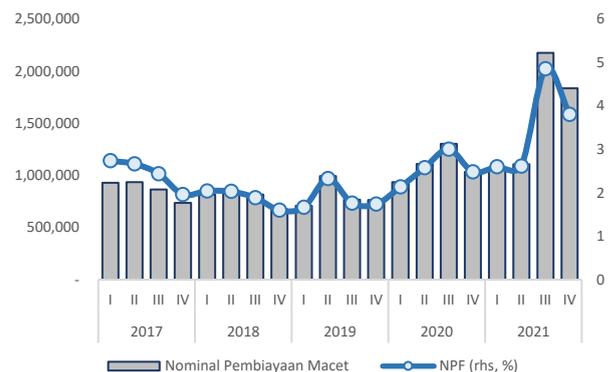
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4. 10. Penyaluran Pembiayaan Spasial (Rp Triliun)

Secara spasial, penyaluran pembiayaan/kredit berdasarkan lokasi proyek di Aceh masih belum merata. Hal tersebut terlihat dari terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mendominasi setengah dari total pembiayaan yang tersalurkan. Kabupaten/Kota tersebut diantaranya adalah Banda Aceh sebesar Rp7,58 triliun (15,69%), Aceh Tenggara Rp6,27 triliun (12,98%), Aceh Timur Rp3,08 triliun (6,37%), Aceh selatan Rp3,07 triliun (6,36%), dan Aceh Besar Rp3,01 triliun (6,24%). Penyaluran pembiayaan di Aceh masih terkonsentrasi di Kabupaten/kota yang berada di wilayah timur yang cenderung memiliki basis industri yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah barat. Namun terdapat perkembangan

Aceh Selatan menjadi salah satu Kabupaten di wilayah barat yang berkembang dalam hal pertumbuhan pembiayaan.

Kualitas pembiayaan dengan lokasi proyek di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya utamanya didorong dari penurunan NPF pada semua jenis penggunaan pembiayaan baik modal kerja, konsumsi, dan investasi. Penurunan kualitas tersebut tercermin dari penurunan rasio NPF menjadi 3,80% pada periode laporan setelah sebelumnya berada pada 4,85%. Penurunan rasio NPF tersebut terjadi pada semua jenis pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi. Peningkatan NPF pada modal kerja, investasi dan konsumsi tercatat mengalami penurunan masing-masing menjadi 10,29% dan 1,19% setelah sebelumnya 11,51% dan 3,12% dan 1,07%.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

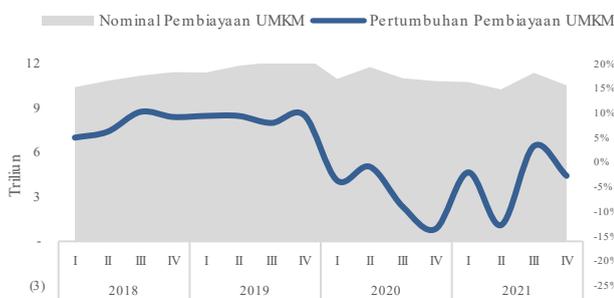
Grafik 4. 11. Perkembangan NPF Perbankan Aceh

Pada penyaluran pembiayaan berdasarkan lapangan usaha, sektor perikanan menjadi faktor penurunan rasio pada periode laporan. Secara rasio, terdapat penurunan menjadi 3,82% pada NPF di lapangan usaha perikanan, setelah sebelumnya tercatat 10,18%. Hal ini didorong oleh penurunan NPL/NPF secara nominal yang cukup signifikan pada sub lapangan usaha penangkapan udang laut. Kemudian penurunan pada sub lapangan kegiatan perfilman, radio, televisi, dan hiburan lainnya menjadi pendorong penurunan NPF pada jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya setelah sebelumnya sebesar 7,62% menjadi 3,98%.

4.2.3. Penyaluran Pembiayaan Kepada UMKM sedikit menurun, Namun Risiko Pembiayaan mulai bergerak membaik

Penyaluran pembiayaan kepada UMKM² pada triwulan IV 2021 mengalami penurunan. Pada periode laporan tercatat pertumbuhan pembiayaan UMKM oleh perbankan mengalami kontraksi sebesar 2,71% (yoy), menurun dibandingkan triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 3,29% (yoy). Sedangkan secara proporsi, kredit UMKM tercatat 21,83% dari total pembiayaan di triwulan IV 2021 atau turun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 25,37%.

Penurunan penyaluran terjadi di beberapa lapangan usaha, utamanya sektor perdagangan besar dan eceran. Pembiayaan pada UMKM perdagangan besar dan eceran terkontraksi 2,72% (yoy) pada periode laporan, setelah pada triwulan III 2021 terkontraksi pada level 0,46% (yoy). Selanjutnya, pembiayaan UMKM pertanian, perburuan, dan kehutanan tercatat terkontraksi 5,55%(yoy), setelah sebelumnya tumbuh pada laju 8,53% (yoy).



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4. 9. Perkembangan Pembiayaan UMKM

Berdasarkan kualitas pembiayaan UMKM, rasio NPF pada debitur UMKM mengalami penurunan pada triwulan IV 2021. Rasio NPF pada periode laporan tercatat sebesar 5,63%, atau menurun dari triwulan III 2021 yang sebesar 7,20%. Perbaikan kualitas pembiayaan pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menjadi faktor utama penurunan rasio NPF kepada kategori debitur UMKM. perdagangan besar dan eceran

dengan proporsi pembiayaan UMKM sebesar 48,8% memiliki rasio NPF pada triwulan IV 2021 sebesar 4,00% atau membaik signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 7,94%. Selain itu, pada pembiayaan UMKM lapangan usaha pertanian dengan proporsi pembiayaan UMKM sebesar 15,4%, terjadi perbaikan rasio NPF menjadi 4,50% pada periode laporan setelah sebelumnya tercatat sebesar 5,12%. Secara spasial, penyaluran pembiayaan/kredit UMKM di Aceh masih terkonsentrasi di Kota/Kabupaten yang terletak di wilayah pantai timur Sumatera dengan penyaluran pembiayaan/kredit tertinggi berada di Banda Aceh Rp1,43 triliun (13,58%), Aceh Utara sebesar Rp0.73 triliun (6,91%) dan Bireun Rp0.73 triliun (6,88%).



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4. 10. Pembiayaan UMKM Secara Spasial (Rp Triliun)

Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan UMKM dengan menetapkan target proporsi pembiayaan UMKM kepada perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/12/PBI/2012. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan

² Penyaluran kredit/pembiayaan UMKM oleh perbankan di Provinsi Aceh

kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan *Loan to Funding Ratio* sebagaimana diatur dalam PBI No.17/11/PBI/2015. Sementara itu, ditingkat regional KPw Bank Indonesia juga turut mendorong UMKM dengan melaksanakan program pengembangan UMKM di masing-masing daerah baik melalui pembinaan, pendampingan, maupun klaster.

4.3. Kinerja Korporasi Keuangan dan Korporasi Non-Keuangan

4.3.1. Sumber Kerentanan Korporasi

Kinerja korporasi di Aceh dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kinerja korporasi pada triwulan IV 2021 mengalami pertumbuhan, hal ini tercermin pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Provinsi Aceh dengan beberapa korporasi di wilayah kerja yang menunjukkan peningkatan kinerja korporasi. Hal ini ditunjukkan melalui Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang menjadi indeks kinerja korporasi pada triwulan IV 2021 berada pada 26,98, setelah pada periode sebelumnya berada pada 5,07.

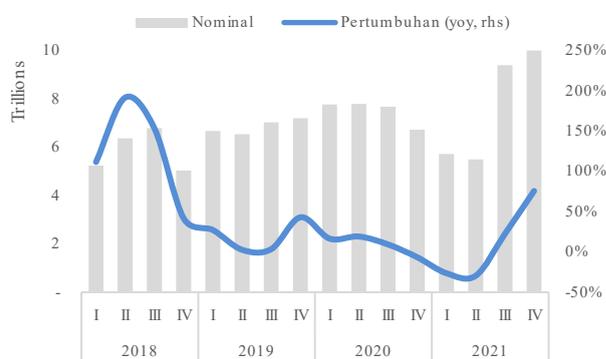
Faktor eksternal secara umum dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dalam dan luar negeri. Ekonomi nasional serta regional menggambarkan kondisi ekonomi dalam negeri. Sementara kondisi luar negeri dipengaruhi oleh keadaan geoekonomi serta harga komoditas ekspor Provinsi Aceh yang diperdagangkan di pasar dunia utamanya komoditas batubara, kelapa sawit dan kopi. Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan IV 2021 berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional secara *year on year*. Perbaikan ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap produk/output dari korporasi.

Sementara itu, dampak dari penyebaran COVID-19 yang signifikan terhadap perekonomian menjadi salah satu hal yang masih berpotensi menjadi sumber kerentanan korporasi dan dapat mempengaruhi kegiatan ekspor-impor. Kendati

demikian, program vaksinasi dan UU Ciptaker diharapkan bisa menjadi katalis pemulihan ekonomi ke depannya.

4.3.2. Penyaluran Pembiayaan Korporasi

Kinerja penyaluran pembiayaan kepada korporasi di Provinsi Aceh mulai mengalami perbaikan dan mencatatkan angka pertumbuhan pada triwulan IV 2021. Tercatat penyaluran pembiayaan kepada korporasi pada periode laporan sebesar Rp11,81 triliun. Dengan nominal penyaluran tersebut, pembiayaan kepada korporasi tumbuh sebesar 75,22% (yoy) atau membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 22,34% (yoy). Sedangkan kualitas penyaluran tercatat berada pada rasio 9,04% atau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada 12,44%. Penurunan rasio NPF, kualitas penyaluran saat ini masih berada di atas batas yang ditentukan (<5%) sehingga menjadi kerentanan dari kualitas pembiayaan korporasi.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

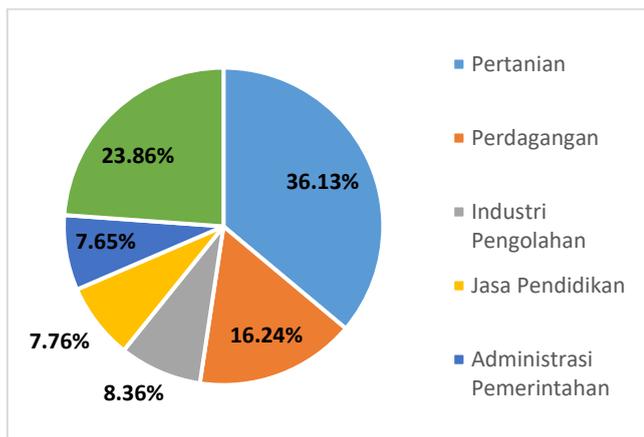
Grafik 4. 114. Penyaluran Pembiayaan/kredit Korporasi
Melihat proporsi pembiayaan korporasi berdasarkan lapangan usaha, pembiayaan kepada korporasi di Aceh didominasi oleh lapangan usaha real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan (27,10%) dan pertambangan dan penggalian (20,23%). Penyaluran pembiayaan pada korporasi secara keseluruhan menyumbang 24,47% dari total pembiayaan yang disalurkan di Provinsi Aceh. Sedangkan kualitas penyaluran pembiayaan macet secara nominal yang berada pada kategori kolektabilitas 3 sampai 5 sebesar Rp1.068,37 miliar. Terdapat peningkatan kualitas penyaluran pada

korporasi akibat penurunan NPF utamanya pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

4.4. Kinerja Pembiayaan Rumah Tangga

4.4.1. Sumber Kerentanan Rumah Tangga

Pada penyaluran pembiayaan kepada rumah tangga, sumber kerentanan terletak pada kinerja perekonomian, kondisi ketenagakerjaan dan penghasilan. Penghasilan rumah tangga di Provinsi Aceh relatif belum terdiversifikasi. Hal tersebut tergambar dari jumlah tenaga kerja di Aceh yang mayoritas bekerja di lapangan usaha pertanian (36,13%). Sehingga, tekanan pada lapangan usaha tersebut mengakibatkan rumah tangga di Aceh terpapar risiko yang cukup tinggi.



Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

Grafik 4.125. Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (%)

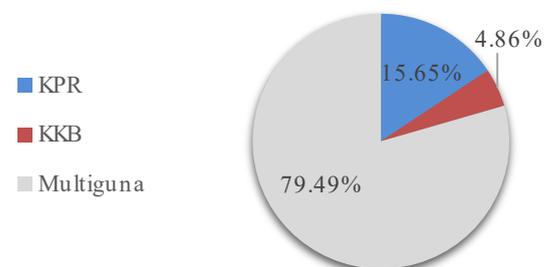
Berdasarkan hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja menunjukkan peningkatan dari 58,70 poin menjadi 77,70 poin pada triwulan laporan, masih lebih rendah dibandingkan pada triwulan I 2020 (sebelum pandemi) yang mencapai 82,67 poin. Angka yang masih berada di bawah 100 tersebut menunjukkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap ketersediaan lapangan kerja. Beban

ekonomi yang dirasakan beberapa industri dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) beberapa karyawan akibat dampak pandemi terjadi di Provinsi Aceh.

Lebih lanjut, Indeks Penghasilan terpantau masih berada di bawah 100, yaitu tercatat sebesar 90,50 pada triwulan IV 2021. Indeks pada triwulan IV 2021 tercatat meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 74,87. Indeks di bawah 100 mencerminkan masih belum terbentuk tingkat optimisme rumah tangga di Aceh terhadap adanya peningkatan penghasilan akibat ketidakpastian keadaan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, indeks kondisi ekonomi³ masih berada pada level di bawah 100 walaupun mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Oleh karena itu, rumah tangga di Aceh pada periode laporan cenderung rentan dan masih berisiko.

4.4.2. Penyaluran Pembiayaan Kepada Rumah Tangga

Komposisi pembiayaan kepada rumah tangga di Provinsi Aceh secara umum masih sama dengan posisi pada periode sebelumnya yang masih didominasi oleh pembiayaan/kredit untuk jenis multiguna. Persentase multiguna mencapai 79,49% dari total pembiayaan rumah tangga atau setara dengan Rp18,97 triliun. Kemudian diikuti oleh Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp3,73 triliun (15,65%) dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB) Rp1,16 triliun (4,86%).



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.136. Proporsi Pembiayaan Rumah Tangga (%)

Berlawanan dengan perbaikan pertumbuhan

³ Rata-rata dari total indeks penghasilan, ketersediaan lapangan kerja & pengeluaran konsumen

penyaluran secara agregat, penyaluran pembiayaan kepada rumah tangga tercatat mengalami perlambatan setelah sebelumnya pada triwulan III 2021 tumbuh 4,12% (yoy), menjadi tumbuh 1,15% (yoy). Perlambatan pertumbuhan pembiayaan rumah tangga disebabkan oleh penurunan pembiayaan kendaraan bermotor yang berkontraksi sebesar 9,51% (yoy), dibanding sebelumnya sebesar 5,75%(yoy).

Penurunan pembiayaan pada KPR terjadi untuk rumah dengan tipe menengah (tipe 21 hingga 70; memiliki proporsi terbesar 72,96% dari total pembiayaan KPR) yang berkontraksi sebesar 1,85% (yoy) setelah sebelumnya hanya tumbuh 2,96% (yoy). Selain itu, KPR dengan tipe besar (proporsi 16,62% dari KPR) juga mengalami kontraksi yang cukup signifikan sebesar 11,06%(yoy) setelah sebelumnya tumbuh sebesar 18,15%(yoy)

Penurunan juga terjadi pada Kredit Kendaraan Bermotor yang didorong pada pembiayaan mobil dan kendaraan tipe besar. Pembiayaan kepemilikan kendaraan tipe mobil pada triwulan IV 2021 yang menjadi mayoritas pembiayaan pada KKB berkontraksi sebesar 10,79% (yoy) lebih besar dibandingkan periode sebelumnya yang berkontraksi sebesar 8,88%. Kontraksi pada pembiayaan kendaraan bermotor masih berdampak melemahnya daya beli masyarakat serta lembaga keuangan yang cenderung selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Kendati demikian, insentif fiskal melalui pajak mobil baru (PPnBM) 0% yang telah diterapkan sejak awal Maret 2021 nampaknya mulai memberikan dampak perbaikan terhadap penjualan mobil. Sepanjang tahun 2021, jumlah penjualan mobil baru di Aceh tercatat 113.943 unit meningkat dibandingkan dengan penjualan Tahun 2020 yang tercatat terjual 104.734 unit.

Dari sisi kualitas penyaluran pembiayaan kepada rumah tangga, secara keseluruhan mengalami peningkatan. Hingga periode laporan, rasio kualitas pembiayaan rumah tangga yang macet dibandingkan dengan total pembiayaan rumah tangga tercatat sebesar 1,11% setelah sebelumnya berada pada rasio 1,37%. Penurunan rasio NPF

terjadi pada seluruh pembiayaan rumah tangga (KPR, KKB dan multiguna) dengan nominal pembiayaan pada kategori kolektabilitas 3-5 mencapai Rp264,64 milyar.

4.5. Langkah Peningkatan Akses Keuangan UMKM

4.5.1. Persebaran UMKM Prov. Aceh Berdasarkan Lapangan Usaha

Berdasarkan data laporan bank umum, pembiayaan UMKM berdasarkan sektor di Provinsi Aceh masih didominasi oleh dua sektor yaitu perdagangan sebesar 48,8% serta pertanian sebesar 15,4%. Hal ini diperkuat dengan kinerja penyaluran KUR di Provinsi Aceh yang relatif belum terdiversifikasi. Hal tersebut tergambar dari jumlah pembiayaan KUR pada triwulan IV 2021 berdasarkan sektor yang masih didominasi oleh perdagangan sebesar Rp 1,05 triliun dan pertanian sebesar Rp 684 miliar. Guna memperkecil *gap* antara komposisi pelaku usaha perdagangan dan pertanian dengan sektor lainnya dalam akses keuangan, Bank Indonesia Provinsi Aceh telah melaksanakan program penguatan UMKM melalui program Wirausaha Bank Indonesia (WUBI yang pada bulan desember telah dilakukan proses seleksi. Selain itu, Bank Indonesia Provinsi Aceh juga menginisiasi program *sharing factory* dengan melakukan pendampingan pembentukan koperasi Wirausaha Unggul Bersama Indonesia (WUBI) dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas produk UMKM di Provinsi Aceh. Implementasi konsep *sharing factory* diharapkan mampu mengakselerasi proses sertifikasi produk UMKM dan kapasitas produksi yang dihasilkan melalui penggunaan fasilitas produksi bersama. Upaya peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dilakukan dengan pendampingan kepada kelompok tani/klaster komoditas *volatile foods* dan beberapa komoditas potensial ekspor yang ada di Provinsi Aceh. Pendampingan dilakukan secara end to end mulai dari hulu hingga hilir mencakup pendampingan dan *business matching* pembiayaan kepada petani.

4.5.2. Total Penjualan Dalam Negeri

Pada triwulan laporan, tercatat penjualan dalam negeri UMKM secara umum mengalami peningkatan. Berdasarkan *sampling* yang dilakukan kepada 10 UMKM baru binaan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, peningkatan penjualan secara umum disebabkan oleh mulai membaiknya kondisi perekonomian masyarakat semenjak persebaran pandemi COVID-19 dengan mulai dilonggarkannya pembatasan sosial serta berbagai upaya peningkatan penjualan produk lokal seperti penyelenggaraan berbagai promosi perdagangan seperti Dubai Expo, Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), serta Event Promosi Budaya dan Pariwisata Indonesia "Lilla Bali". Secara nominal, penjualan dalam negeri UMKM binaan pada periode laporan menunjukkan peningkatan dari sebelumnya sebesar Rp. 4.01miliar menjadi 4.87 miliar dengan kenaikan Rp0,86 miliar dari triwulan sebelumnya.

4.5.3. Total Pinjaman dan Plafon

Pada triwulan IV-2021, total pinjaman yang diperoleh UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya. Secara umum, total pengajuan pinjaman oleh UMKM se-Provinsi Aceh berdasarkan lokasi proyek mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Rp11,38 triliun menjadi Rp10,54 triliun. akan tetapi, dengan program penguatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sampai dengan triwulan laporan, total *outstanding* pinjaman UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia Provinsi Aceh meningkat dari Rp1,65 menjadi sebesar Rp1,70 miliar rupiah.

4.5.4. Langkah KPw BI Aceh dalam meningkatkan akses keuangan UMKM binaan

Dalam rangka meningkatkan akses keuangan UMKM binaan, Bank Indonesia Provinsi Aceh telah melakukan berbagai upaya yang terdiri atas proses edukasi dan pendampingan. Bank Indonesia Provinsi Aceh telah melakukan kegiatan pendampingan dan pelatihan secara langsung yang

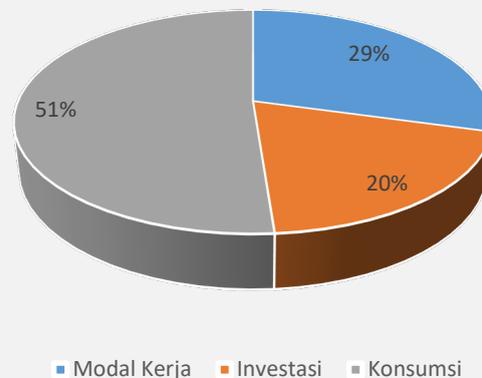
pelaksanaannya bekerja sama dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar dan dikemas ke dalam program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia Provinsi Aceh juga bersinergi dengan OJK Perwakilan Aceh dalam pelaksanaan pelatihan pencatatan transaksi keuangan kepada 25 konsultan pendamping UMKM yang ada di Provinsi Aceh dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM di Provinsi Aceh. Pelatihan juga dilanjutkan dengan pelaksanaan pendampingan pencatatan transaksi keuangan UMKM dalam rangka asistensi implementasi materi pelatihan. Dengan adanya asistensi, diharapkan UMKM yang mengalami permasalahan terkait dengan pencatatan keuangan dapat terfasilitasi dan meningkatkan knowledge dan awareness terkait dengan pencatatan keuangan. Dengan adanya pencatatan keuangan, akan mempermudah assessment perbankan terhadap kinerja UMKM dan diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM.

Pengembangan Industri Pengolahan di Aceh Dalam Rangka Mendorong Pembiayaan UMKM

Transformasi UMKM menjadi penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian domestik, tercermin pada jumlah unit usaha yang banyak, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan kontribusi yang besar terhadap PDB. UMKM juga memiliki ketahanan yang tinggi dalam menghadapi berbagai krisis sebelumnya, meskipun krisis Covid-19 saat ini memberikan tekanan yang luar biasa besar. Ketahanan UMKM yang tinggi tersebut selama ini berperan sebagai bantalan perekonomian karena kemampuannya untuk bertahan pada periode tekanan dan dapat tumbuh kembali lebih cepat dan tinggi pasca tekanan.

Pengembangan *end-to-end* UMKM Bank Indonesia dilakukan melalui pilar kebijakan korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan, guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif. Penguatan korporatisasi dilakukan pada aspek kelembagaan UMKM untuk mendorong terciptanya ekosistem usaha yang terintegrasi dan mendorong peningkatan skala ekonomi usaha.

Data penyaluran pembiayaan berdasarkan penggunaan di Provinsi Aceh pada triwulan IV Tahun 2021 masih didominasi oleh kredit yang bersifat konsumsi sebesar 55,11%, disusul modal kerja sebesar 31,38%, dan investasi sebesar 20,95%. Angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan masih belum bersifat produktif.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4. 147. Data penyaluran Pembiayaan Tw IV Tahun 2021

Posisi pembiayaan UMKM di kuartal IV Tahun 2021 mengalami penurunan yang diindikasikan dengan adanya penurunan posisi pembiayaan. *Outstanding* pembiayaan UMKM di triwulan IV menurun sebesar 10,54 triliun dari triwulan sebelumnya sebesar 11,38 triliun. Sektor yang paling banyak menyerap penyaluran pembiayaan pada kuartal IV adalah sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 48,8% diikuti oleh pertanian sebesar 15,4%.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4. 158. Perkembangan Pembiayaan UMKM

Guna memperkecil gap antara komposisi pembiayaan pelaku usaha perdagangan besar dan eceran dengan sektor lainnya, diperlukan pengembangan pada lapangan usaha lainnya salah satunya adalah industri pengolahan. Pengembangan industri pengolahan dapat meningkatkan serapan tenaga kerja sekaligus meningkatkan pembiayaan UMKM. Dengan adanya industri pengolahan, akan menjadi stimulus pengembangan UMKM dibawahnya sebagai industri pendukung.

Pengembangan industri pengolahan kopi di Aceh akan mendorong peningkatan skala ekonomi usaha melalui korporatisasi petani, dan UMKM pendukung sehingga tercipta ekosistem usaha yang saling terintegrasi. Peningkatan skala ekonomi juga akhirnya berpengaruh kepada peningkatan penyaluran pembiayaan kepada UMKM untuk modal kerja melalui beberapa program seperti penyaluran KUR serta program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Berbagai program yang menysasar UMKM seperti ini memiliki peluang untuk diintegrasikan seperti menindaklanjuti penerima bantuan BPUM untuk dapat mengakses program KUR sehingga penyaluran pembiayaan kepada UMKM akan lebih massif dengan risiko yang lebih terukur yang pada gilirannya diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah transformasi penggunaan pembiayaan dari yang bersifat konsumtif menuju pembiayaan bersifat produktif seperti investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mewujudkan ekosistem usaha yang integrasi dan mendorong pembiayaan UMKM.

--000--



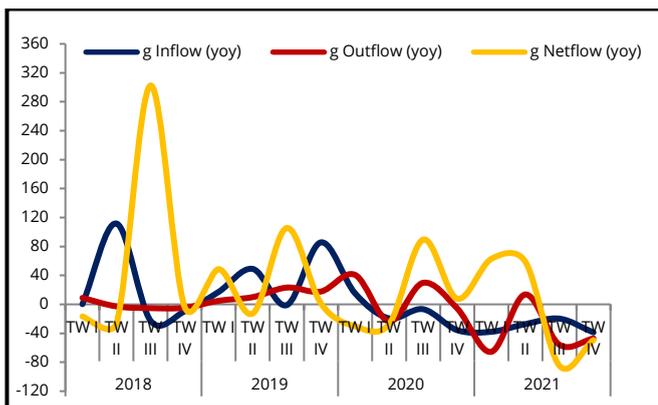
BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Selama triwulan IV 2021, perkembangan sistem pembayaran konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan sesuai dengan pola historisnya dimana *net outflow* pada triwulan IV lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III. Kemudian, sistem pembayaran nontunai baik nilai besar ataupun ritel mengalami perlambatan secara tahunan yang mengindikasikan konsumsi masyarakat masih tertahan ditengah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Di sisi lain, penggunaan uang elektronik *chip based* maupun *server based* terus mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Terkait dengan Bansos Non Tunai, Pemerintah menambah intensitas penyaluran Program Sembako pada Desember 2021 sebagai respons untuk melindungi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

5.1. Sistem Pembayaran Tunai

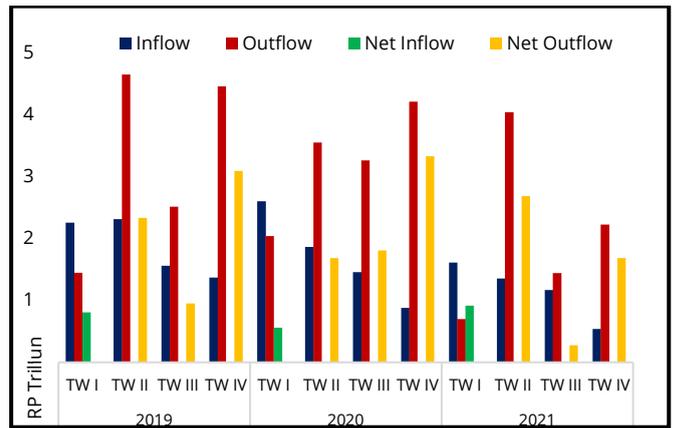
Pada triwulan IV 2021, posisi pengedaran uang kartal di Bank Indonesia mengalami *net outflow*¹. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami *net outflow* sebesar Rp1,69 triliun dengan total *inflow* sebesar Rp0,54 triliun dan total *outflow* sebesar Rp2,23 triliun. Kondisi ini selaras dengan data historis 3 tahun terakhir yang menunjukkan *net outflow* selalu terjadi pada triwulan IV dan lebih tinggi daripada *net outflow* triwulan III. *Net outflow* pada triwulan laporan mengimplikasikan bahwa *demand* masyarakat terhadap uang kartal lebih besar dibanding masuknya uang kartal dari masyarakat dan perbankan ke Bank Indonesia. Meskipun terjadi *net outflow* pada triwulan laporan, realisasi tersebut lebih kecil dibanding dengan triwulan II di tahun yang sama. Pertumbuhan *net outflow* yang lebih rendah tersebut salah satunya disebabkan oleh konsumsi yang masih tertahan akibat lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi pada triwulan III 2021.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1. Pertumbuhan *Inflow* dan *Outflow* (% , yoy)

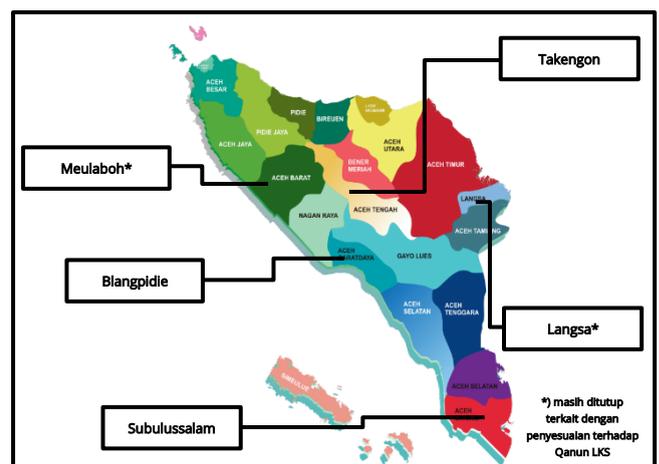
Pertumbuhan aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) ke Bank Indonesia pada triwulan laporan turun sebesar -38,86% (yoy) menjadi sebesar Rp0,54 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp0,88 triliun. Di sisi lain, pertumbuhan aliran uang kartal dari Bank Indonesia menuju perbankan dan masyarakat (*outflow*) pada triwulan pelaporan tercatat mengalami peningkatan secara triwulanan sebesar 54,02% (qtq) menjadi Rp2,23 triliun, namun mengalami perlambatan sebesar -47,19% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp4,22 triliun.



Sumber: Sistem Informasi Layanan Kas Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2. *Netflow* Kas (Rp Triliun)

Penurunan kebutuhan uang yang terjadi pada triwulan laporan sesuai dengan pola transaksi menggunakan uang tunai oleh masyarakat yang turut menurun setelah *outbreak* COVID-19 pada triwulan III yang masih dirasakan hingga triwulan laporan. Meskipun terjadi penurunan *outflow*, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 diperkirakan tetap tumbuh positif sebesar 4,48% (yoy). Di sisi lain, pandemi yang melanda hingga periode laporan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan berbagai metode transaksi secara digital. Hal ini ditunjukkan oleh nominal dan volume transaksi menggunakan uang elektronik *chip based* ataupun *server based* yang terakselerasi cukup tinggi pada triwulan IV 2021. Kemudian, program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah yang terus berlanjut diharapkan dapat menjadi *game changer* dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang sempat berkontraksi akibat pandemi.



Gambar 5.3. Kas Titipan Bank Indonesia

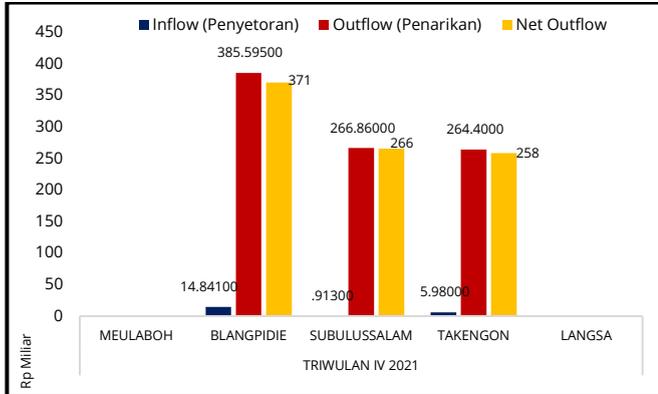
Selain menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia juga berupaya untuk memenuhi

¹ Aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) lebih kecil

dari pada aliran uang kartal dari Bank Indonesia ke sistem perbankan dan masyarakat (*outflow*)

kebutuhan uang rupiah di masyarakat melalui pembukaan Kas Titipan. Kas Titipan merupakan kegiatan penyediaan uang rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada kantor bank umum untuk mencukupi persediaan kas perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu.

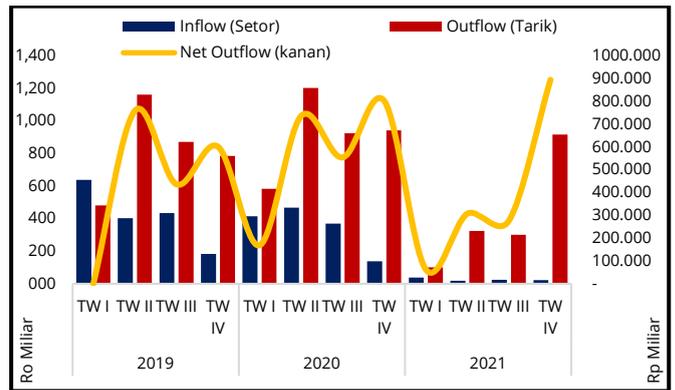
Pada tahun sebelumnya, terdapat 5 (lima) kantor kas titipan di Provinsi Aceh yaitu di Blangpidie, Meulaboh, Subulussalam, Takengon, dan Langsa. Namun beberapa Kas Titipan mengalami penutupan pada triwulan IV tahun 2020, yaitu di Meulaboh (ditutup November 2020), Takengon (ditutup November 2020), Langsa (ditutup Desember 2020), dan Blangpidie (ditutup Desember 2020). Penutupan tersebut dikarenakan adanya proses konsolidasi dan transisi Bank Pengelola Kas Titipan sehubungan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mewajibkan perbankan yang beroperasi di Aceh seluruhnya harus berbentuk syariah, dengan masa transisi paling lama tiga tahun atau pada 2021. Setelah selesai masa transisi oleh perbankan, terdapat beberapa Kas Titipan yang kembali dibuka pada selama tahun 2021, yaitu Kas Titipan Blangpidie yang kembali beroperasi pada Agustus 2021 dan Kas Titipan Takengon pada November 2021.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.4. Transaksi Inflow Outflow per Kas Titipan

Secara agregat, Kas Titipan pada triwulan laporan di Provinsi Aceh mengalami *net outflow* sebesar Rp895,12 miliar. Jumlah tersebut berasal dari tiga Kas Titipan di Subulussalam, Blangpidie, dan Takengon. Aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) sebesar Rp21,73 miliar atau mengalami penurunan sebesar -7,73% (qtq). Sementara *outflow* mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 205,09% (qtq) ke Rp916,86 miliar. Secara tahunan, *inflow* kas titipan mengalami penurunan sebesar -84,37% (yoy) dan *outflow* mengalami penurunan sebesar -2,62% (yoy).

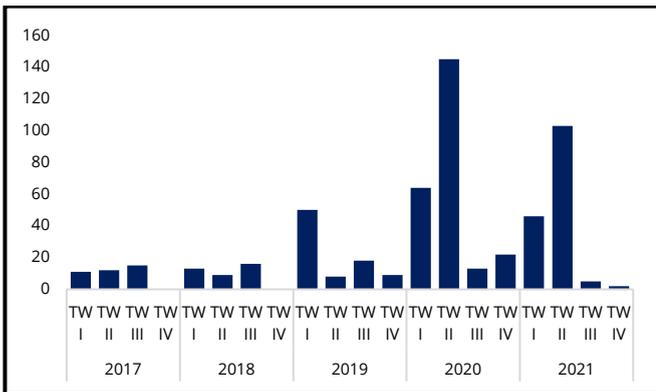


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5. Transaksi Kas Titipan Triwulanan

Di samping itu, untuk tetap menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat (*clean money policy and fresh for circulation*) serta meningkatkan kualitas uang beredar di masyarakat selama masa pandemi COVID-19, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Aceh melaksanakan beberapa kebijakan terkait layanan sistem pembayaran tunai. *Pertama*, melakukan karantina terhadap uang penyetoran perbankan selama 14 hari kerja serta melakukan sterilisasi terhadap uang tersebut sebelum diolah dan diedarkan kembali ke masyarakat. *Kedua*, melakukan penyesuaian terhadap jadwal penyetoran dan penarikan uang perbankan. *Ketiga*, melaksanakan operasi terpisah (*split operation*) atas layanan perbankan untuk mengantisipasi apabila terdampak gangguan operasional akibat pandemi. *Keempat*, memberikan imbauan kepada perbankan untuk mematuhi protokol kesehatan yang harus diterapkan selama masa pandemi serta mengoptimalkan penukaran uang kepada masyarakat melalui perbankan. *Kelima*, mengajak masyarakat melakukan transaksi secara non tunai untuk memitigasi penularan melalui tatap muka. Kebijakan tersebut selaras dengan upaya penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah dan telah dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan layak edar.

Temuan uang yang diragukan keasliannya (palsu) pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah temuan pada triwulan IV 2021 sebanyak dua lembar, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu lima lembar. Jika ditinjau dari sisi pecahan, uang Rupiah dengan pecahan Rp100.000,- menjadi pecahan yang mendominasi hasil temuan.



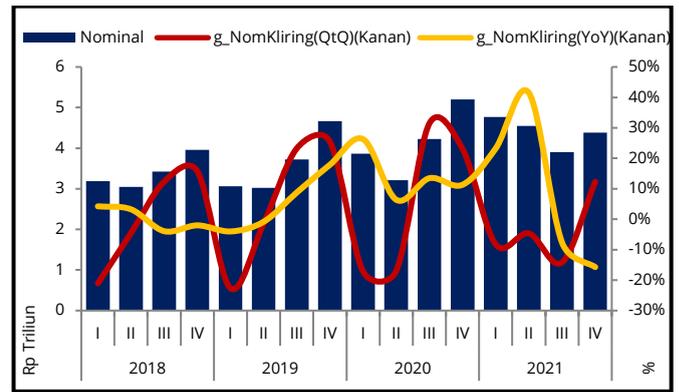
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.6. Temuan Uang Palsu (Lembar)

5.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri mengalami tren yang beragam. Secara agregat, transaksi pembayaran non tunai mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat secara triwulanan, baik volume ataupun nominal transaksi nilai besar dan ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia mengalami peningkatan. Dari sisi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), secara agregat mengalami perlambatan baik secara triwulanan ataupun tahunan. Di sisi lain, tren peningkatan terjadi pada penggunaan Uang Elektronik baik *server based* ataupun *chip based*. Meskipun demikian, kelancaran sistem pembayaran tetap dapat menunjang pemulihan aktivitas ekonomi Provinsi Aceh yang diperkirakan mengalami peningkatan dari 2,82% (yoy) pada triwulan III 2021 menjadi 4,48% (yoy) pada triwulan IV 2021.

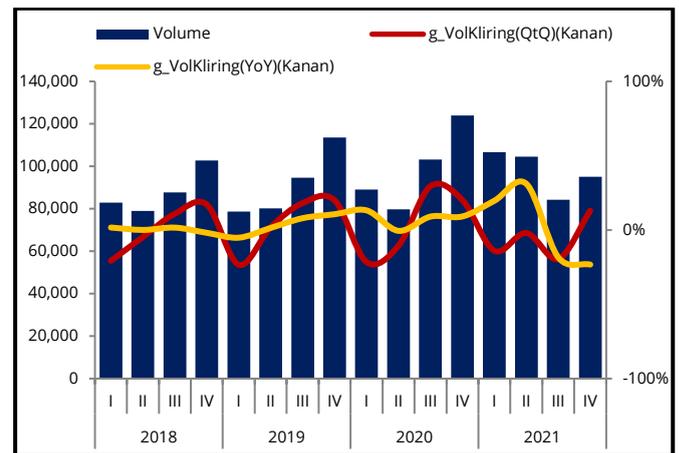
Memasuki triwulan keempat tahun 2021, transaksi sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, namun mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Nilai penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI tercatat sebesar Rp4,38 triliun atau menurun sebesar 0,16% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp5,20 triliun.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.7. Nominal SKNBI

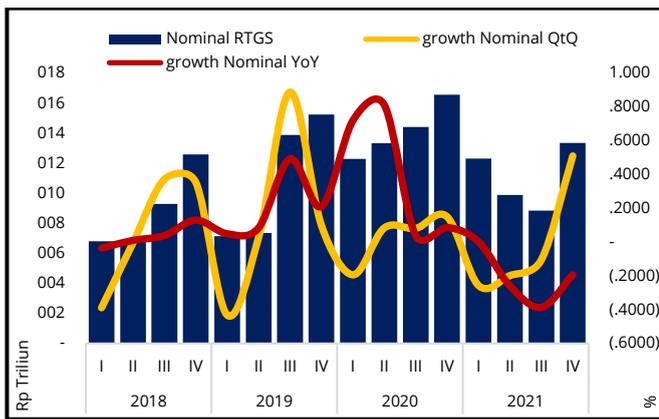
Di sisi volume transaksi tercatat sebesar 95.090 Data Keuangan Elektronik (DKE) pada triwulan laporan. Secara tahunan, volume transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan sebesar -23,27% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 123.932 DKE.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.8. Volume SKNBI

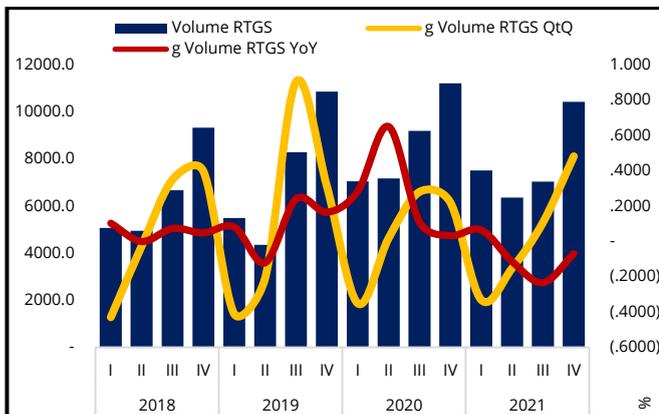
Sementara itu, perkembangan sistem pembayaran nilai besar tercermin dalam perkembangan data *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Pada periode laporan, transaksi BI-RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp13,36 triliun, atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 51,04% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan secara tahunan, transaksi BI-RTGS menunjukkan tren penurunan sebesar -19,40% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp16,58 triliun.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.9. Nominal BI-RTGS

Sebagaimana yang terjadi pada nominal transaksi, volume transaksi juga menunjukkan tren perlambatan secara tahunan. Pada triwulan laporan, volume transaksi mengalami penurunan sebesar -6,99% (yoy) menjadi sebanyak 10.433 transaksi.



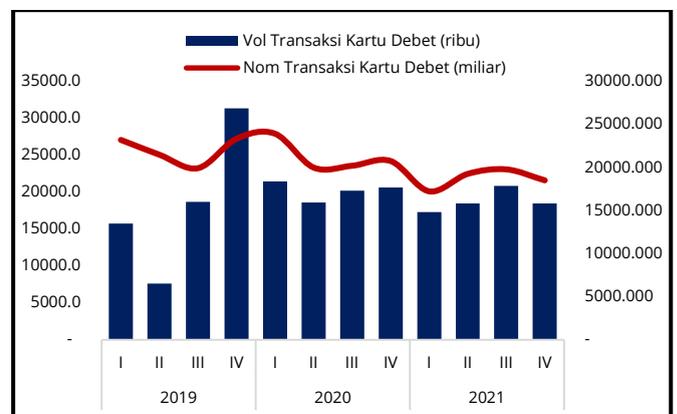
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.10. Volume BI-RTGS

Perkembangan transaksi nilai besar maupun ritel melalui SKNBI dan BI-RTGS mengalami perlambatan secara tahunan pada triwulan laporan. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh COVID-19 *outbreak* pada triwulan III 2021 yang masih memberikan dampak pada tertahannya transaksi masyarakat di triwulan IV 2021. Meskipun demikian, transaksi nilai besar dan nilai ritel mengalami pemulihan pada triwulan keempat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pemulihan tersebut utamanya didorong oleh realisasi penyerapan anggaran pemerintah daerah, organisasi, ataupun korporasi yang cenderung tinggi pada triwulan keempat di setiap tahunnya.

Selanjutnya, transaksi non tunai menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) baik kartu kredit, kartu ATM debit, serta Uang Elektronik (UE) mengalami perkembangan yang beragam. Perkembangan transaksi kartu kredit dan kartu ATM debit

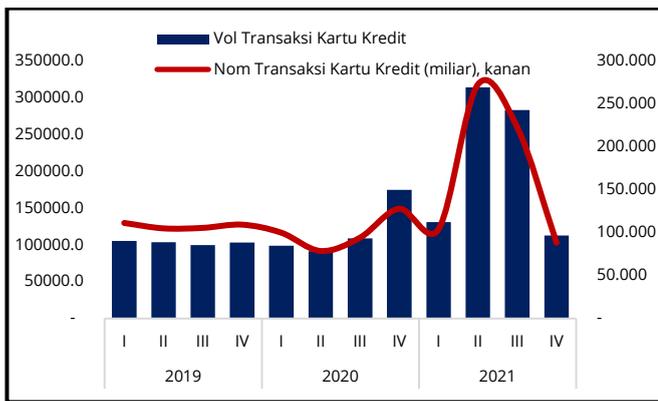
menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Volume transaksi kartu ATM debit mengalami penurunan sebesar -11,52% (qtq) dari triwulan sebelumnya. Secara tahunan, volume transaksi juga mengalami penurunan sebesar -10,64% (yoy) menjadi 18,45 juta transaksi. Selaras dengan volume transaksi, nominal transaksi ATM debit juga mengalami perlambatan sebesar -10,81% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Transaksi ATM debit mayoritas digunakan untuk penarikan tunai dan transfer interbank/intrabank. Intensitas penarikan tunai melalui ATM debit tersebut berpengaruh terhadap pergerakan jumlah *inflow-outflow* yang mana pada triwulan laporan ini mengalami *net outflow*.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.11. Transaksi ATM Debit

Kemudian, volume transaksi kartu kredit mengalami penurunan sebesar -35,64% (yoy) dari 174.777 transaksi. Secara nominal, transaksi kartu kredit juga mengalami penurunan menjadi Rp88,15 miliar atau melambat sebesar -31,02% (yoy), dimana pada periode yang sama tahun sebelumnya mencatatkan nominal transaksi sebesar Rp127,79 miliar. Melambatnya pertumbuhan transaksi kartu kredit pada triwulan IV 2021 disinyalir karena pola transaksi masyarakat yang semakin masif menggunakan Uang Elektronik sebagai basis untuk bertransaksi secara *online*. Selama triwulan IV 2021, terdapat 221.489 kartu kredit yang digunakan untuk bertransaksi di Provinsi Aceh dengan tujuan transaksi didominasi untuk keperluan transaksi *online*. Jumlah tersebut melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dimana jumlah kartu kredit yang digunakan untuk bertransaksi mencapai 327.688 kartu.



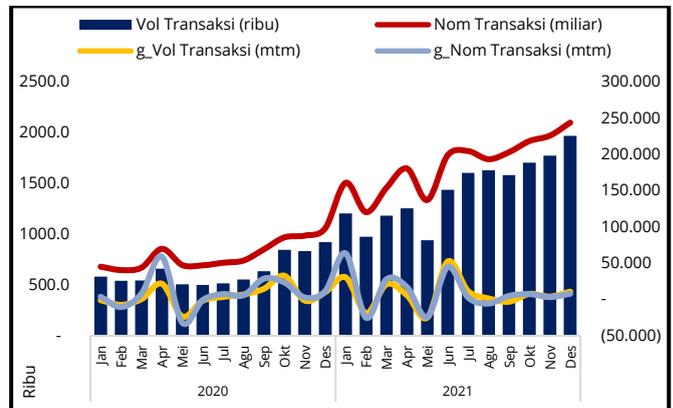
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.12. Transaksi Kartu Kredit

Deselerasi transaksi kartu debit dan kartu kredit yang terjadi pada triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat seperti berbelanja dan motif transaksi ekonomi lainnya masih tertahan akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda. Berbagai kebijakan stimulus pemerintah yang terus dilanjutkan dari sisi fiskal maupun moneter diharapkan mampu menjadi sentimen positif di masyarakat. Dari sisi fiskal, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan melanjutkan program bantuan sosial, subsidi token listrik, relaksasi PPnBM, dan program fiskal lainnya. Dari sisi moneter, Bank Indonesia mendorong konsumsi masyarakat dengan mempertahankan BI-7DRR tetap pada 3,5% sejak Februari hingga Desember 2021 dan pelonggaran *Loan to Value* (LTV) hingga 100%. Berbagai kebijakan tersebut untuk memitigasi kontraksi ekonomi sehingga berbagai aktivitas dan kegiatan masyarakat dapat terus berputar menggerakkan roda perekonomian.

Seiring dengan meningkatnya *awareness* masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE stabil mengalami peningkatan pada triwulan laporan dibanding dengan triwulan sebelumnya dan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perkembangan transaksi UE secara nominal pada triwulan IV 2021 sebesar Rp688,94 miliar atau naik sebesar 14,48% (qtq) dan 152,98% (yoy). Dari sisi volume, transaksi UE juga terakselerasi sebesar 13,14% (qtq) dan 109,48% (yoy) atau mencapai 5,45 juta transaksi selama triwulan IV 2021. Tren transaksi UE yang relatif terus meningkat ditengarai oleh semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun *merchant*. Pengimplementasian berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan instrumen UE juga diiringi dengan

peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik *chip based* ataupun *server based*. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat melalui *platform e-commerce* selama masa pandemi. Selama triwulan IV tahun 2021, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah mencapai Rp425,67 miliar dan 4.376.153 volume transaksi.

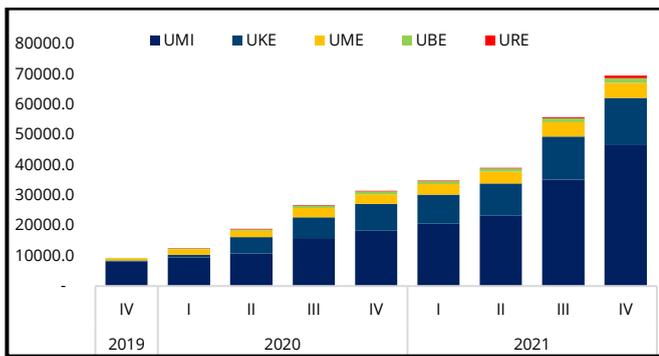


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13. Perkembangan Transaksi UE

Kemudian, transaksi uang elektronik berbasis server (*server based*) juga mengalami kenaikan di Provinsi Aceh. Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) mengalami peningkatan yang terlihat dari perkembangan jumlah *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless* untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19. Hal ini juga mengimplikasikan bahwa *demand* masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

Hingga triwulan IV 2021, terdapat 69.740 *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran non-tunai. Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 121,4% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar 31.504 *merchant*. Secara triwulanan, jumlah *merchant* meningkat sebesar 25,1% (qtq) dari posisi triwulan III tahun 2021 sebanyak 55.757 *merchant*. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 46.572 *merchant* (66,78%).



Sumber: PT PTEN, diolah

Grafik 5.14. Pertumbuhan Merchant QRS

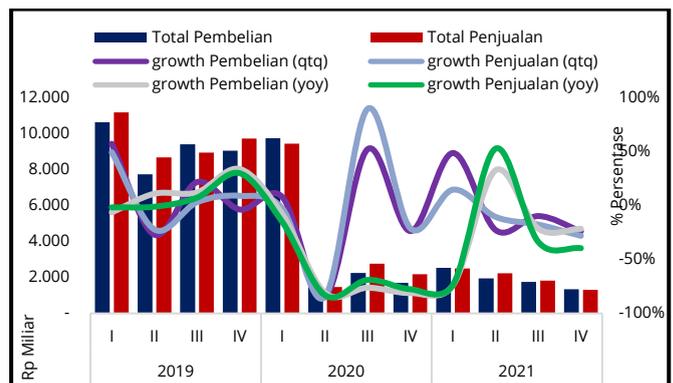
5.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang rendah dan stabil guna mendukung terciptanya iklim stabilitas moneter, Bank Indonesia memandang perlunya regulasi yang mengatur pasar keuangan termasuk pasar keuangan valuta asing (valas). Kewenangan di bidang sistem pembayaran, memungkinkan Bank Indonesia berperan sebagai regulator yang menjamin terciptanya pasar keuangan valas yang sehat, profesional, dan menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Hingga triwulan IV 2021, terdapat 16 (enam belas) KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh yang melayani pembelian maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 8 (delapan) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sedangkan 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Pada triwulan laporan, transaksi KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Transaksi KUPVA mengalami perlambatan sebesar -26,18% (qtq) menjadi Rp2,65 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp3,58 miliar. Pada sisi yang lain, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, transaksi juga mengalami penurunan dari Rp3,88 miliar atau sebesar -31,79% (yoy). Ditinjau dari sisi jenis transaksi, pembelian UKA mengalami penurunan sebesar -24,04% (qtq) menjadi Rp1,33 miliar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp1,76 miliar. Secara tahunan, pembelian UKA juga mengalami penurunan sebesar -21,73% (yoy) dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp1,70 miliar. Di sisi lain, transaksi penjualan UKA selama triwulan laporan tercatat sebesar

Rp1,31 miliar atau menurun -28,24% (qtq) dibandingkan penjualan triwulan sebelumnya sebesar Rp1,83 miliar. Sedangkan dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, penjualan UKA mengalami turut menurun sebesar -39,67% (yoy) dari Rp2,17 miliar. Secara tahunan, total transaksi baik pembelian maupun penjualan UKA mengalami penurunan sebesar -31,79% (yoy) dikarenakan akses wisatawan asing ke Indonesia yang masih sangat terbatas dalam rangka penekanan angka penyebaran COVID-19.



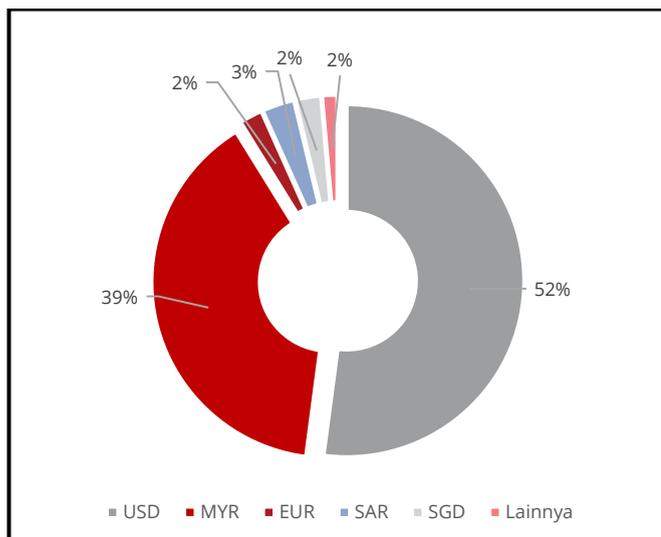
Sumber: LKPBU, diolah

Grafik 5.15. Transaksi KUPVA BB

Secara umum, masih terbatasnya transaksi KUPVA BB di Provinsi Aceh ditengarai oleh kebijakan penanganan pandemi yang masih berlangsung, yaitu pembatasan mobilitas penduduk untuk bepergian dari dan ke luar negeri. Pintu masuk wisatawan asing melalui Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda juga masih ditutup untuk rute mancanegara hingga triwulan laporan. Sejak *outbreak* COVID-19 di Provinsi Aceh pada bulan Maret 2020, pemerintah membatasi kedatangan WNA dan membatasi penduduk untuk bepergian ke luar negeri. Hal itu menyebabkan pembelian UKA yang biasanya dipasok dari WNA yang datang atau WNI yang bepergian ke luar negeri menurun drastis. Kontraksi usaha penukaran valuta asing masih akan terjadi selama kebijakan pembatasan mobilitas dari dan ke luar negeri masih berlaku. Namun, program vaksinasi COVID-19 yang terus berjalan hingga saat ini, diharapkan dapat menjadi *game changer* dan sentimen positif dalam memulihkan kegiatan usaha penukaran valas di berbagai daerah.

Ditinjau dari jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 52,08% dan Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 39,14%. Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor ekspor impor, pariwisata, pendidikan, dan remitansi TKA yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Provinsi Aceh.

Di samping itu, Bank Indonesia telah melaksanakan kegiatan *market intelligence* guna melakukan pemetaan para pedagang valuta asing yang tidak berizin. Bank Indonesia terus mendorong masyarakat yang ingin menjalankan usaha penukaran valuta asing untuk terlebih dahulu mengajukan proses perizinan ke Bank Indonesia. Hal ini sebagai wujud pengawasan Bank Indonesia terhadap kegiatan usaha penukaran valuta asing yang memiliki potensi digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.



Sumber: LKPBU, diolah

Grafik 5.16. Disagregasi Transaksi UKA

5.4. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan kondisi dimana setiap masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Tingkat inklusi keuangan yang tinggi akan mendukung pasar keuangan yang semakin dalam dan bervariasi, sehingga dapat menurunkan risiko sistemik dan kerentanan terhadap gejolak (*shock*) dalam perekonomian.

Inklusi keuangan juga mampu berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat lebih mudah mengakses produk dan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, dan investasi yang berujung pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Guna mendukung percepatan peningkatan inklusi keuangan, maka kehadiran lembaga keuangan formal di seluruh daerah di Aceh merupakan hal yang harus diperhatikan. Layanan lembaga keuangan formal dimaksud terdiri dari layanan perbankan termasuk ketersediaan mesin ATM dan agen bank serta layanan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti pegadaian, asuransi, koperasi dan lembaga

pembiayaan.

Tabel 5.1. Rasio Ketersediaan Layanan Lembaga Keuangan Formal

No.	Wilayah	Rasio Jumlah Layanan Lembaga Keuangan Formal per 1.000 Penduduk Daerah
1	Kota Banda Aceh	1,74
2	Kota Lhokseumawe	0,80
3	Kota Sabang	0,61
4	Kota Langsa	0,58
5	Aceh Barat	0,46
6	Aceh Besar	0,36
7	Aceh Tengah	0,36
8	Aceh Tamiang	0,34
9	Aceh Barat Daya	0,33
10	Aceh Selatan	0,29
11	Aceh Jaya	0,26
12	Pidie Jaya	0,25
13	Bener Meriah	0,25
14	Nagan Raya	0,24
15	Bireuen	0,23
16	Pidie	0,23
17	Kota Subulussalam	0,20
18	Aceh Singkil	0,20
19	Aceh Tenggara	0,19
20	Simeuleu	0,18
21	Aceh Timur	0,17
22	Gayo Luwes	0,16
23	Aceh Utara	0,14

Sumber: OJK dan BPS (diolah)

Data hingga triwulan laporan menunjukkan bahwa ketersediaan layanan lembaga keuangan formal di Kab/Kota dalam Provinsi Aceh masih bervariasi. Masyarakat di Kota Banda Aceh memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya, sedangkan wilayah dengan akses paling rendah adalah Kabupaten Aceh Utara. Ke depan, Bank Indonesia, OJK, dan Pemerintah akan terus bersinergi untuk meningkatkan ketersediaan lembaga keuangan formal di Aceh, dalam mendukung terciptanya inklusi dan literasi keuangan masyarakat yang baik.

Dalam mendukung inklusi keuangan, Bank Indonesia juga turut berperan aktif pada proses penyaluran implementasi Bantuan Sosial Non tunai (BSNT) dan Program Elektronifikasi Pembayaran. Peranan Bank Indonesia dalam Program BSNT yang terdiri atas Program

Sembako² dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mendukung kelancaran penyaluran bantuan secara non tunai. Dukungan diwujudkan dengan menyediakan infrastruktur, sistem, dan mekanisme pembayaran bantuan sosial. Di sisi lain, Bank Indonesia berupaya mendorong masyarakat untuk bermigrasi menggunakan sarana pembayaran non tunai dengan melakukan percepatan elektronifikasi sistem pembayaran di daerah baik sifatnya *People to Government (P to G)*, *Government to People (G to P)*, *People to People (P to P)*, dan *Government to Government (G to G)*.

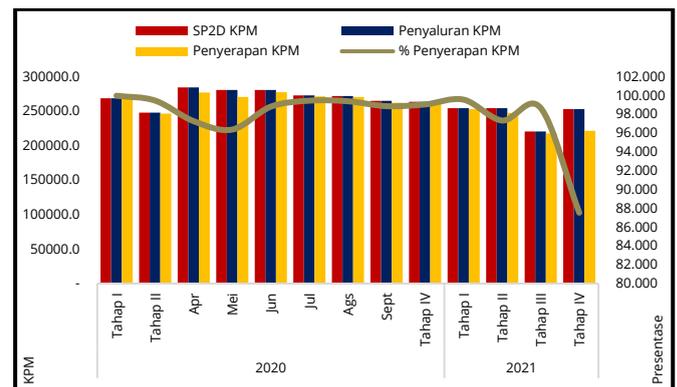
Penyaluran Program Sembako dan PKH

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan transformasi penyaluran bantuan sosial, dari tunai menjadi non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Jenis bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Oleh Pemerintah, bantuan akan disalurkan kepada masyarakat yang menjadi penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan implementasi penyaluran BSNT, Bank Indonesia juga senantiasa melakukan sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan, penyaluran bantuan PKH Tahap IV tahun 2021 telah disalurkan 100% kepada KPM. Jumlah KPM penerima pada tahap IV sebanyak 253.081 KPM.

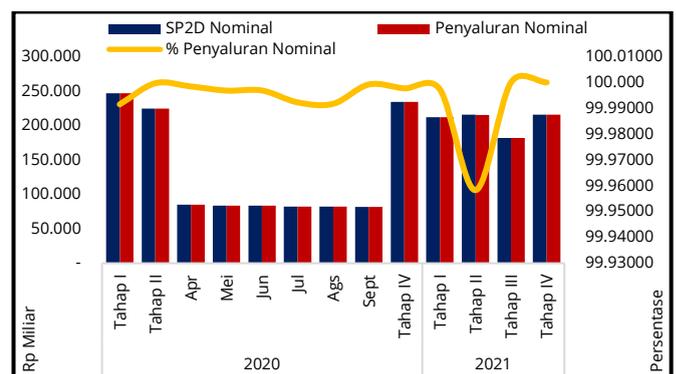
Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap IV sebanyak 221.538 atau sebesar 87,54%.



Sumber: Himbara, diolah

Grafik 5.17. Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)

Di sisi nominal, jumlah bantuan per tahap yang disalurkan selalu berfluktuasi menyesuaikan dengan data KPM yang dimutakhirkan secara berkala oleh Kemensos RI. Pada triwulan keempat, nominal bantuan yang disalurkan sebesar Rp215,6 miliar atau lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu Rp181,3 miliar. Persentase nominal penyaluran PKH telah mencapai 100%.



Sumber: Himbara, diolah

Grafik 5.18. Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)

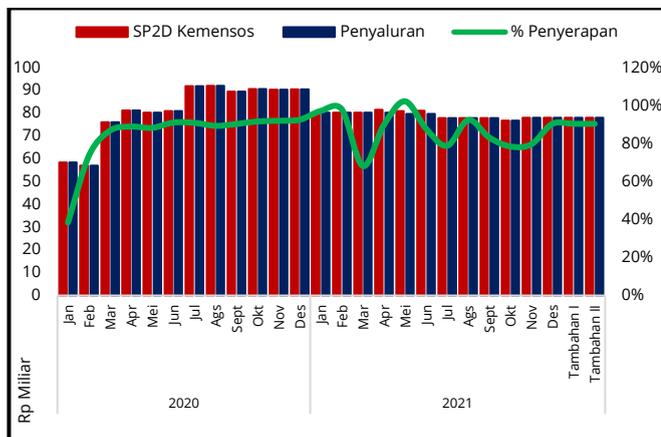
Sementara itu, penyaluran bantuan Program Sembako telah diperluas ke seluruh Kab/Kota di Provinsi Aceh. Nilai bantuan program sembako yang diterima masyarakat pada awalnya ditetapkan sebesar Rp150.000/bulan/KPM. Namun berdasarkan keputusan Presiden dalam rapat terbatas penanggulangan pandemi COVID-19, nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp200.000/bulan/KPM hingga triwulan laporan. Khusus untuk bantuan Program Sembako bulan November dan Desember, penyaluran diberikan oleh Himbara dan BSI sekaligus pada bulan Desember 2021.

Hingga akhir triwulan IV 2021, akumulasi penyerapan program sembako di Provinsi Aceh telah mencapai

penyaluran tetap menggunakan kartu kombo yang diberikan kepada KPM.

² Sejak Januari 2020, Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) berganti nama menjadi Program Sembako. Mekanisme

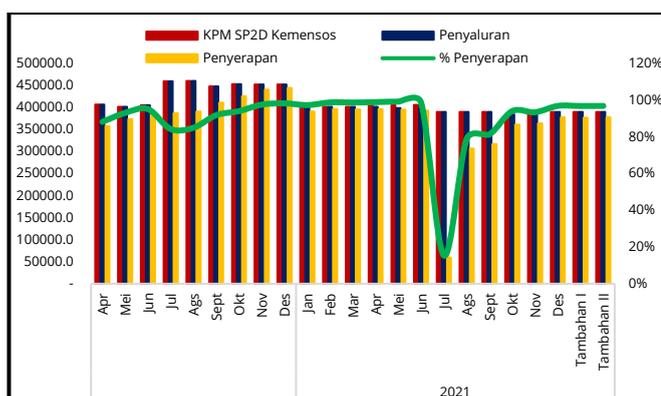
Rp996,01 miliar atau persentase penyerapan mencapai 90,39% dari total dana yang disalurkan sebesar Rp1,1 triliun. Dalam rangka membantu meringankan dampak pandemi COVID-19, pada bulan Desember 2021 Pemerintah memberikan tambahan 2 (dua) bulan bantuan Program Sembako. Harapannya keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan konsumsi ditengah pandemi COVID-19 yang masih melanda.



Sumber: Himbara, diolah

Grafik 5.19. Perkembangan Program Sembako (Nominal)

Sementara itu, jumlah KPM program sembako relatif stabil. Jumlah KPM posisi Oktober sebanyak 383 ribu, November dan Desember sebanyak 389 ribu KPM. Persentase serapan KPM setiap bulan juga mengalami peningkatan. Posisi akhir Desember, jumlah KPM yang telah menyerap bantuan mencapai 96,72% atau sebanyak 377 ribu KPM.



Sumber: Himbara, diolah

Grafik 5.20. Perkembangan Program Sembako (KPM)

Elektronifikasi Sistem Pembayaran

Elektronifikasi sistem pembayaran merupakan serangkaian upaya untuk mengubah pembayaran yang dilakukan secara tunai menjadi non tunai. Elektronifikasi menjadi bagian program strategis Bank Indonesia bertujuan untuk mendorong transaksi keuangan secara elektronik agar mampu meningkatkan keuangan inklusif

yang terarah, efisien, dan sinergis sekaligus mendukung percepatan ekonomi digital di Indonesia.

Sasaran utama program elektronifikasi adalah penciptaan ekosistem non tunai yang terintegrasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah, transaksi pembayaran ritel dan nilai besar, transaksi fasilitas dan transportasi umum, serta elektronifikasi di destinasi pariwisata. Instrumen yang dapat digunakan bisa meliputi Uang Elektronik (*server* dan *chip based*), kartu kredit, dan kartu ATM debit.

Pada triwulan laporan, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan akseptasi masyarakat dan *stakeholders* terhadap berbagai fitur pembayaran non tunai. Bank Indonesia memfasilitasi pelaku UMKM ataupun *stakeholders* lainnya dengan PJSP dalam rangka akuisisi *merchant* untuk implementasi QRIS. Bersama dengan Pemko Banda Aceh, Bank Indonesia bersinergi dalam upaya elektronifikasi transaksi di masyarakat ataupun pemerintah daerah. Pada Desember 2021, telah diimplementasikan Pasar S.I.A.P (Sehat Inovatif Aman Pakai) QRIS Al-Mahirah Lamdingin yang di-*launching* oleh Walikota Banda Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerjasama Pemko Banda Aceh, Bank Indonesia Provinsi Aceh, dan PT Bank Aceh Syariah sebagai bentuk sinergi dan tindak lanjut dari kerjasama Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan piloting program SIAP QRIS dalam rangka meningkatkan penggunaan pembayaran non tunai QRIS di Pasar Rakyat. potensi akuisisi QRIS pada Pasar Al-Mahirah Lamdingin mencapai 500 merchant dan selanjutnya akan dilakukan perluasan elektronifikasi pembayaran dari sisi retribusi sewa kios di pasar tersebut.

Selanjutnya yaitu program elektronifikasi Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Peunayong telah diimplementasikan pada triwulan laporan. Beberapa program ke depan juga turut dirancang guna memperluas akses masyarakat terhadap pembayaran digital seperti elektronifikasi Parkir Tepi Jalan Umum di berbagai titik Kota Banda Aceh dengan menggunakan QRIS. Sebagai upaya dalam mewujudkan hal tersebut, telah dilakukan *capacity building* kepada 200 juru parkir bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh agar nantinya masyarakat dapat melakukan pembayaran retribusi parkir secara non tunai melalui QRIS yang dibawa oleh juru parkir di berbagai titik Kota Banda Aceh.

Kemudian, Bank Indonesia juga melakukan serangkaian koordinasi bersama dengan Pemerintah Provinsi, Kota,

dan Kabupaten dalam rangka pembentukan Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan TP2DD merupakan amanat Keputusan Presiden No 3 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dimana seluruh Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia wajib membentuk TP2DD selambat-lambatnya pada 4 Maret 2022. Per Oktober 2021, telah terbentuk seluruh TP2DD pada seluruh tingkat Kabupaten, Kota, dan Provinsi di wilayah Aceh. Sebagai bentuk apresiasi telah dilakukan seremonial pembentukan seluruh TP2DD di wilayah Aceh pada 24 November 2021. Harapannya pembentukan TP2DD akan menjadi katalis di daerah untuk perluasan elektronifikasi sarana/fasilitas umum, termasuk pendapatan daerah baik pajak dan retribusi.

Bank Indonesia selalu aktif mendorong masyarakat agar memanfaatkan penggunaan UE dan QRIS sebagai instrumen dan kanal pembayaran melalui program *on boarding* dan akuisisi QRIS bekerja sama dengan PJSP di daerah serta menyelenggarakan Festival Ekonomi Digital 2021. Serangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transaksi elektronifikasi di Provinsi Aceh agar berkembang dengan baik.

Terkait infrastruktur, masih terdapat beberapa daerah termasuk dalam area titik buta (*blankspot area*) yang belum terjangkau teknologi informasi, termasuk pemanfaatan kanal pembayaran yang masih terbatas. Ke depan, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah serta PJSP akan terus melakukan upaya kongkrit dan terkoordinasi untuk mewujudkan elektronifikasi sistem pembayaran yang terintegrasi. Di sisi elektronifikasi sistem pembayaran ritel masyarakat umum, Bank Indonesia terus mendorong pemanfaatan transaksi melalui penggunaan instrumen UE dan APMK serta kanal pembayaran QRIS melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan program *on-boarding*.



BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan aspek kemiskinan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh berada pada urutan keempat sedangkan kemiskinan berada pada peringkat pertama.

6.1. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2021 tercatat 6,30%, mengalami penurunan dibandingkan TPT periode yang sama tahun sebelumnya (6,59%). Sementara itu, jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 2,52 juta orang. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja periode Agustus 2020. Namun jika dibandingkan dengan periode Februari 2021, angka TPT di Provinsi Aceh tidak mengalami perubahan.

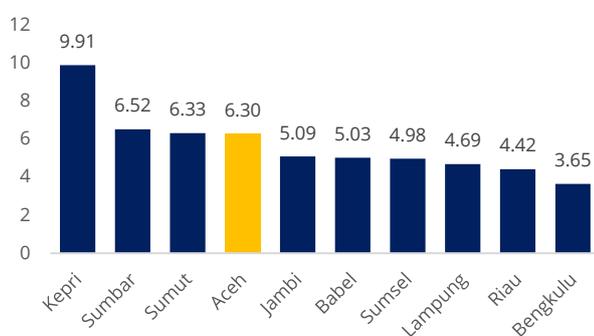
Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi penyerapan tenaga kerja adalah Jasa Pendidikan, Administrasi Pemerintahan, dan Perdagangan

Tabel 6. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

	TINGKAT PENGANGGURAN %	
	Agustus 2020	6,59
Agustus 2021	6,30	

Sumber: Data BPS, diolah

Penurunan TPT disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang telah mulai bekerja. Jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami kenaikan sebesar seribu orang. Adapun jumlah pengangguran berkurang sebanyak 8 (delapan) ribu orang. Jika dibandingkan dengan daerah lain, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh menduduki peringkat ke-empat tertinggi di Sumatera setelah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6. 1. Tingkat Pengangguran di Sumatera (%)

Perkembangan ketenagakerjaan yang tercermin dari ketersediaan lapangan kerja cenderung mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tercermin dari hasil *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh pada triwulan III 2021 yang menunjukkan adanya kenaikan penyerapan tenaga kerja terutama pada lapangan usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan usaha Industri Pengolahan.

Hal tersebut sejalan dengan survei konsumen yang juga dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen terhadap tingkat ketersediaan lapangan kerja terus menunjukkan perbaikan.

Kedepannya, arah perbaikan ini diperkirakan terus berlanjut sejalan dengan hasil Survey Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja terus mengalami peningkatan di triwulan IV 2021 dan awal tahun 2022.

Tabel 6. 2. Perkembangan TPT

PENGANGGURAN	2020	2021
	Agustus	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)		
Bekerja	2.360	2.361
Pengangguran	167	159
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
Persentase TPAK (%)	65,10	63,78
Tingkat Pengangguran Terbuka		
TPT (%)	6,59	6,30

Sumber: Data BPS, diolah

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan beserta sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar yaitu masing-masing 36,13% dan 16,24%. Selanjutnya sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 8,36% yang diikuti oleh sektor Jasa Pendidikan sebesar 7,76%. Penyerapan tenaga kerja terbesar kelima berada pada sektor Administrasi Pemerintahan (7,65%).

Tabel 6.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

SEKTOR	Agustus 2021 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	36,13
Perdagangan Besar & Eceran	16,24
Industri Pengolahan	8,36
Jasa Pendidikan	7,76
Adm. Pemerintahan	7,65
Konstruksi	5,96
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,18
Lainnya	12,86

Sumber: Data BPS, diolah

Tenaga kerja di Provinsi Aceh saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir SMA. Tenaga kerja di Provinsi Aceh pada triwulan laporan memiliki kesamaan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya, yaitu masih didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan terakhir setingkat SMA. Namun demikian, persentase pekerja dengan pendidikan terakhir SMA mengalami kenaikan dari 31,44% pada Agustus 2020 menjadi 31,55% pada Agustus 2021.

Tenaga kerja dengan pendidikan terakhir lulusan universitas menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dari 12,95% menjadi 14,21%. Hal ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 6.4. Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

Pendidikan Tertinggi	Agustus 2020	Agustus 2021
Sekolah Menengah Atas	31,44	31,55
Sekolah Dasar ke Bawah	26,95	25,68
Sekolah Menengah Pertama	19,68	19,21
Universitas	12,95	14,21
SMA Kejuruan	4,83	4,11
Diploma I/II/III	4,15	4,11

Sumber: Data BPS, diolah

Bila dilihat berdasarkan status pekerjaannya, pekerja Buruh/Karyawan/Pegawai menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar yaitu sekitar 35,57%. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di level 34,28%. Adapun pekerja dengan status Berusaha Sendiri mengalami peningkatan menjadi 22,97% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 21,60%.

Tabel 6.5. Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan

Status Pekerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021
	Porsi (%)	Porsi (%)
Buruh/Karyawan/Pegawai	34,28	35,57
Berusaha Sendiri	21,60	22,97
Pekerja Keluarga/tak dibayar	14,44	13,34
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja	14,38	12,59
Pekerja bebas pertanian	5,62	6,33
Pekerja bebas nonpertanian	5,84	5,46
Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar	3,83	3,74

Sumber: Data BPS, diolah

Nilai Tukar Petani⁴ pada akhir triwulan IV 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2021, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat sebesar 103,74 atau meningkat 1,51% dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 102,19. NTP pada triwulan laporan yang melampaui 100 menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap hasil produksi lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani. Peningkatan NTP utamanya bersumber dari subsektor perkebunan rakyat dan perikanan.

Tabel 6.6. Nilai Tukar Petani

NILAI TUKAR PETANI (NTP)	
Triwulan III 2021	102,19
Triwulan IV 2021	103,74

Sumber: Data BPS, diolah

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 104,71 atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 103,10. NTUP menggambarkan

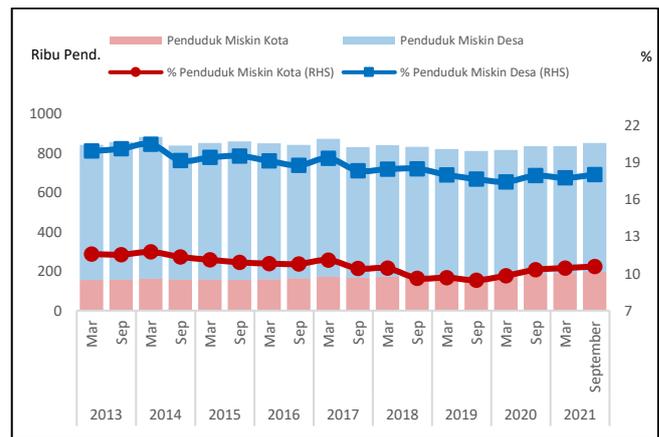
⁴ Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

kerugian yang diperoleh petani dari selisih antara indeks harga pengeluaran yang terkait dengan keperluan produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) dengan indeks harga yang diterimanya. NTUP di atas 100 menunjukkan bahwa petani berada dalam posisi surplus.

6.2. Kemiskinan

Posisi persentase kemiskinan berdasarkan data terakhir yakni September 2021, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu dari 15,43% menjadi 15,53%. Peningkatan persentase penduduk miskin tersebut didorong oleh peningkatan yang terjadi baik di pedesaan ataupun di perkotaan. Penduduk miskin di pedesaan secara persentase pada periode laporan mengalami peningkatan 0,26% menjadi 18,04% setelah pada periode sebelumnya tercatat secara persentase sebesar 17,78%. Selain itu, terjadi peningkatan persentase kemiskinan pada daerah perkotaan yang naik 0,12%. Pada periode laporan, persentase kemiskinan perkotaan 10,58% setelah sebelumnya hanya 10,46%.

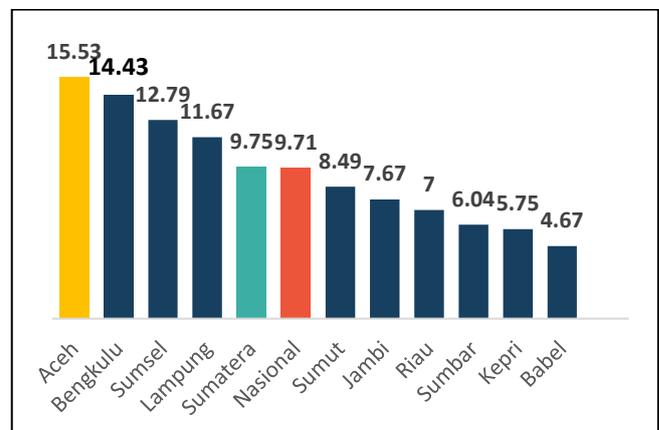
Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada September 2021 sebanyak 850,26 ribu jiwa, meningkat dibandingkan dengan periode September 2020 yaitu sebanyak 833,91 ribu jiwa atau naik 1,96% (yoy). Jumlah penduduk miskin di desa meningkat 0,89% (yoy) dari sejumlah 649,02 ribu jiwa pada periode sebelumnya menjadi 654,79 ribu jiwa. Peningkatan juga terjadi di perkotaan, pada September 2021 tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 195,47 ribu jiwa atau meningkat 5,70% (yoy) dari periode sebelumnya yang hanya 184,89 ribu jiwa.



Sumber: Data BPS, diolah

Grafik 6. 2. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota

Ketidakpastian ekonomi karena pandemi yang masih berlanjut masih menjadi faktor penghambat pemulihan ekonomi. Hal tersebut juga diperkirakan menjadi salah satu hambatan perbaikan angka kemiskinan di Aceh. Berdasarkan hasil survey konsumen Bank Indonesia, Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan masih di bawah 100 per September 2021, yang mana menandakan masyarakat masih pesimis akan pendapatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, faktor struktural seperti kebijakan atau program yang masih belum menasar kepada akar masalah kemiskinan menjadi salah satu penyebab terhambatnya penanggulangan kemiskinan di Aceh. Dari 10 provinsi di Sumatera, Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dengan tingkat kemiskinan pada September 2021 mencapai 15,53%. Persentase ini lebih tinggi dibanding rerata tingkat kemiskinan di Sumatera (9,75%) dan Nasional (9,71%).



Sumber: Data BPS, diolah

Grafik 6. 3. Penduduk Miskin di Sumatera (%)

Berdasarkan hasil survey di Provinsi Aceh, pada periode September 2021, garis kemiskinan meningkat sebesar 5,48% (yoy), atau naik Rp28.731,- per kapita per bulan. Pada September 2021, garis kemiskinan secara total sebesar Rp552.939,- per kapita per bulan. Kontribusi komponen makanan sebesar Rp418.296,- per kapita per bulan dan komponen bukan makanan sebesar Rp134.643,- per kapita per bulan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan (75,65%) masih mendominasi dibandingkan dengan peranan komoditas bukan makanan (24,35%) yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna, cakalang, cabai merah, dan kue basah. Persoalan kemiskinan tidak hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi yang juga perlu diperhatikan seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1 dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (tingkat keparahan) yang disebut dengan (P2).

Tabel 6.7. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan

KEMISKINAN (%)		
SEP 2020	15,43	▲
SEP 2021	15,53	
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)		
SEP 2020	2,85	▲
SEP 2021	2,95	
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)		
SEP 2020	0,83	▼
SEP 2021	0,81	

Sumber: Data BPS, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2021 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sedikit mengalami

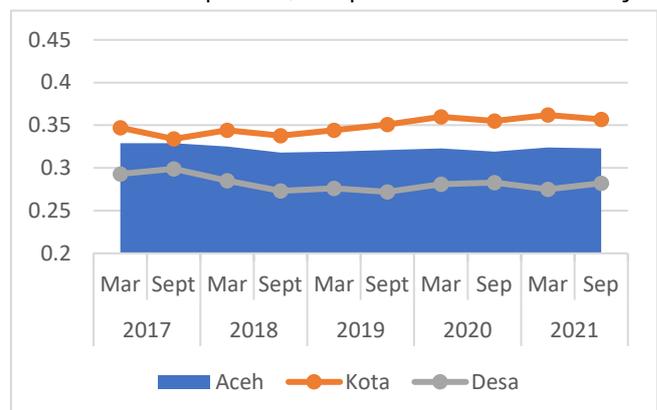
penurunan. P1 mengalami peningkatan dari 2,85% pada September 2020 menjadi 2,95% pada September 2021. Berbeda dengan P1, P2 sedikit mengalami penurunan setelah sebelumnya berada pada 0,83% pada September 2020 menjadi 0,81% pada periode laporan. Meningkatnya nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin berkurang dan menjauhi garis kemiskinan, namun kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin kecil.

Tabel 6.8. Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)

Daerah	2020		2021	
	SEP		SEP	
	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	1,61	0,38	1,70	0,45
Pedesaan	3,46	1,05	3,59	0,99
Gabungan	2,85	0,83	2,95	0,81

Sumber: Data BPS, diolah

Dalam pengukuran ketimpangan kemiskinan, digunakan indikator Rasio Gini⁵. Berdasarkan daerah, Rasio Gini pada perkotaan pada September 2021 berada pada 0,357, sedangkan pada pedesaan berada pada 0,282. Terjadi peningkatan rasio di perkotaan pada periode September 2021 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal tersebut mendorong secara keseluruhan Rasio Gini Provinsi Aceh mengalami peningkatan menjadi 0,323 pada September 2021 setelah berada pada 0,319 pada tahun sebelumnya.



Sumber: Data BPS, diolah

Grafik 6.4. Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah

⁵Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1.

Semakin besar nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.



BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 3,42%-4,22%(yoy) atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (2,79%, yoy). Kondisi tersebut utamanya diperkirakan oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Laju inflasi tahun 2022 diperkirakan berada pada rentang sasaran inflasi nasional sebesar $3 \pm 1\%$, dengan perkiraan peningkatan inflasi didorong oleh komponen *volatile food* dan *administered prices*.

7.1. Prospek Makroekonomi

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 3,42%-4,22% (yoy), lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang tumbuh 2,79%(yoy). Hal ini didorong oleh optimisme akan aktivitas ekonomi pasca vaksinasi massal serta sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja ekonomi diperkirakan didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit rumah tangga, dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB). Sedangkan dari sisi Lapangan Usaha (LU), LU pertanian, pertambangan dan penggalian, serta konstruksi diyakini akan menjadi pendorong laju pertumbuhan dari sisi LU.

Meningkatnya pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Langkah pemerintah yang sudah mulai melakukan vaksinasi massal mulai awal tahun 2021 dan berlanjut pada 2022, diperkirakan dapat mendorong aktivitas dan mobilitas masyarakat dan diikuti oleh tingkat belanja yang lebih tinggi. Selain itu, berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Aceh pada Februari 2022 mengindikasikan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Provinsi Aceh pada beberapa bulan terakhir dan didukung oleh optimisme perekonomian secara nasional. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Februari 2022 tercatat sebesar 107,9. Lebih lanjut, perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren yang positif. Nilai Tukar Petani pada Februari 2022 adalah sebesar 107,81 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 106,77 dan meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 98,76.

Kinerja komponen konsumsi pemerintah pada 2022 diperkirakan lebih rendah dibandingkan

tahun sebelumnya, berdasarkan informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, terdapat penurunan pagu anggaran baik anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN. Berdasarkan Qanun No.1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022, rencana anggaran belanja Aceh 2022 sebesar 16,17 triliun rupiah lebih rendah jika dibandingkan anggaran belanja pada tahun 2021 yang sebesar 16,76 triliun rupiah. Defisit anggaran juga diperkirakan meningkat menjadi 2,82 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 2,58 triliun rupiah pada tahun 2021. Di sisi lain, pada tahun 2022 diperkirakan intensitas serta nominal *refocusing* tidak setinggi pada tahun 2021 sehingga diperkirakan mendorong kinerja pada 2022. Selain itu, diperkirakan akan ada proyek *multiyear* milik pemerintah yang masih berlanjut di 2022 (pembangunan JTTS).

Kinerja investasi pada 2022 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh, target realisasi investasi mengalami kenaikan sebesar 9,77% menjadi 7,3 triliun rupiah dari sebelumnya 6,55 triliun rupiah di tahun 2021. Realisasi investasi pada 2022 diperkirakan didorong oleh proyek PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya, pabrik pupuk NPK oleh PT Pupuk Iskandar Muda, PLTA 1 dan 2 di Peusangan, Jalan tol trans sumatera (JTTS) ruas Banda Aceh – Sigli, Pabrik CPO di Aceh Barat Daya (baru diresmikan PT Mon Jambe) serta Kawasan Industri/Berikat di Krueng Raya yang sedang dalam tahap konstruksi. Meskipun demikian, terdapat beberapa potensi kendala yang dapat menghambat realisasi investasi pada 2022, antara lain; 1. Penguasaan lahan dalam bentuk HGB terlalu singkat (1 atau 3 tahun) sehingga menghambat perusahaan untuk mendapatkan pinjaman modal/kredit dari Perbankan (*unbankable*), 2. Munculnya varian baru COVID-19 berpotensi mempersulit kedatangan kontraktor dari luar negeri (India), 3. Terlambatnya penandatanganan *power purchase agreement*

(PPA) menahan investor PLTA memulai konstruksinya.

Sementara itu, ekspor luar negeri secara keseluruhan tahun 2022 diperkirakan mengalami sedikit kontraksi jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2021 yang tumbuh sebesar 41,24% (yoy). Hal ini diperkirakan didorong oleh normalisasi harga komoditas ekspor utama Aceh seperti batu bara, kopi, dan minyak kelapa sawit. Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh Bank Dunia, harga batu bara pada 2022 berpotensi mengalami penurunan menjadi \$ 120/ton dari \$140/ton pada tahun 2021. Harga kopi arabika juga diprediksi mengalami penurunan menjadi \$4,20/kg dari \$4,30 /kg pada tahun 2021. Lebih lanjut, harga CPO diproyeks mengalami penurunan menjadi \$1.075/ton dari \$1.100/ton pada tahun 2021.

Dari sisi LU, perkiraan akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 utamanya disebabkan oleh positifnya kinerja LU Pertanian, Konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Secara umum proyeksi kinerja positif pada LU tersebut disebabkan oleh membaiknya perekonomian dunia serta normalisasi aktivitas masyarakat sejalan dengan langkah pemerintah melakukan vaksinasi masal COVID-19 di tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022.

Dari sisi kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang berkontraksi sebesar -0,34% (yoy), perkiraan sektor sawit yang meningkat (dari target produksi nasional). Lebih lanjut, secara umum kinerja pertanian dan perikanan, diperkirakan akan lebih baik dengan asumsi faktor cuaca berangsur membaik di 2022. Berdasarkan informasi dari *BMKG Climate Outlook 2022*, Pada semester I tahun 2022, ENSO El (Nino/La Nina) diprediksikan akan tetap berada pada fase La Nina moderate, dan kembali Netral pada Semester II. Sementara itu IOD (*Indian Ocean Dipole*) diprediksikan akan berada pada kondisi Netral pada periode tersebut. Dalam fase ENSO fase netral, tidak akan terlalu

dampak buruk terhadap sektor pertanian namun kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Suhu Muka Laut (SML) Indonesia pada awal tahun 2022 kondisi SML di wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah diprediksikan normal, sehingga diperkirakan akan berdampak positif terhadap tangkapan ikan. Lebih lanjut, akumulasi curah hujan tahunan cenderung sedikit lebih basah dibanding dengan normalnya namun tidak sebasah curah hujan tahun 2020.

Selanjutnya, Lapangan Usaha Konstruksi diperkirakan akan mengalami perbaikan di 2022, setelah sebelumnya mengalami kontraksi pada tahun 2021 sebesar -0.46% (yoy). Perkiraan peningkatan kinerja LU didorong oleh realisasi konstruksi proyek-proyek strategis yang ada di Aceh. Jalan tol trans sumatera (JTTS) Seksi Sigli-Banda Aceh dan Binjai-Langsa masuk dalam target penyelesaian di tahun 2022. Hal ini menjadi faktor pendorong utama mengingat investasi BUMN di sektor konstruksi masuk dalam nilai investasi tiga terbesar di Provinsi Aceh. Perkiraan peningkatan realisasi belanja modal pemerintah di 2022 setelah sempat tertahan di tahun lalu karena beberapa isu dan kendala menjadi faktor pendorong pertumbuhan Lapangan Usaha konstruksi.

Sementara itu dari sisi Transportasi dan Pergudangan, diperkirakan akan melanjutkan peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun tidak sebesar realisasi pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mampu tumbuh sebesar 19,51% (yoy). Kinerja yang diperkirakan positif pada 2022 tersebut sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan tren infeksi COVID-19 yang masih melandai pada beberapa bulan terakhir di Aceh. Berdasarkan data *google mobility index*, sampai dengan minggu kedua Bulan Februari, mobilitas masyarakat pada sektor retail dan rekreasi mengalami peningkatan sebesar 11% dibandingkan dengan *baseline*, mobilitas masyarakat pada sektor pusat perbelanjaan dan farmasi mengalami peningkatan sebesar 31% dibandingkan *baseline*. Meskipun demikian, terjadi penurunan mobilitas masyarakat pada

stasiun transit sebesar -9% dibandingkan baseline. Dari sisi angkutan udara, tren peningkatan penerbangan domestik diperkirakan akan masih berlanjut di tahun 2022, meskipun demikian terdapat risiko penghambat yaitu penyebaran COVID-19 varian *Omicron*. Selain itu dari sisi pergudangan, dengan meningkatnya *trend* belanja *online* dan pengiriman kargo diperkirakan dapat mendongkrak industri kargo dan pergudangan. Hal ini juga terkonfirmasi dari laporan salah satu pelaku bisnis pengiriman kargo dan pergudangan yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut di tahun 2022.

7.2. Prospek Inflasi

Secara keseluruhan tahun 2022, laju inflasi Aceh diperkirakan pada masih berada rentang sasaran inflasi nasional sebesar $3\pm 1\%$ (yoy). Secara disagregasi, inflasi diperkirakan akan lebih didorong oleh komoditas *volatile food* dan *administered prices*. Dari sisi komoditas *volatile food*, faktor cuaca diperkirakan masih akan pengaruh terhadap komoditas pangan terutama perikanan yang konsisten menyumbang inflasi di Aceh.

Dari sisi *administered prices*, Pemerintah telah menetapkan rata-rata kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022 sebesar 12 persen. Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi sejak Sabtu (25/12/2021). Harga gas elpiji nonsubsidi dinaikkan sebesar 7,5 persen berkisar antara Rp 1.600-Rp 2.600 per kilogram. Selanjutnya, terdapat rencana penyesuaian tarif dasar listrik yang akan naik besaran Rp18.000 hingga Rp101.000 per bulan, sesuai golongan. Selain itu, adanya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diperkirakan akan berdampak terhadap realisasi inflasi kedepannya. Mulai April 2022, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan naik dari 10% yang saat ini berlaku menjadi 11%. Dari sisi *core inflation*, diperkirakan akan stabil sejalan dengan perkiraan harga emas yang akan mengalami

sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada awal tahun 2022, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh melakukan Survei Pendorong Inflasi Tahun 2022. Survei Faktor Pendorong Inflasi (SFPI) 2022 Provinsi Aceh telah dilaksanakan pada periode 20 s.d. 31 Januari 2022 kepada 36 responden dengan komposisi Lapangan Usaha: 72,22% LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 13,89% LU Perdagangan Besar dan Eceran; 8,33% Industri Pengolahan; dan 5,56% Real Estate. Berdasarkan survei tersebut, diperoleh hasil bahwa kenaikan harga bahan baku memberikan pengaruh signifikan terhadap kenaikan harga jual oleh para responden. Kenaikan harga bahan baku yang paling banyak dirasakan oleh responden pada kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir beserta pangasanya adalah sebagai berikut: Bahan Mentah (Sayuran, Daging, Kayu, Minyak, Batubara, dsb.) sebesar 34,38%, Bahan Baku Pendukung (Packaging, Kardus, dsb.) sebesar 23,96%; Sarana Pertanian (Pupuk, Bibit, Mulsa, Obat, dsb.) sebesar 22,91%, dan Komponen Rakitan (*Spare Parts, Chip, Baut, dsb.*) sebesar 11,46%. Di samping itu, seluruh responden menyatakan bahwa kelompok bahan-bahan baku tersebut akan cenderung mengalami kenaikan pada periode 6 (enam) bulan mendatang. Responden meyakini bahwa kenaikan harga-harga bahan baku dipengaruhi oleh kurangnya stok/persediaan (29,09%), gangguan distribusi dan bencana alam (20,00%), kenaikan ongkos kirim/logistik (18,18%), pengaruh cuaca (14,55%), dan kenaikan harga komoditas global (8,18%).

7.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

1. Mendorong pengembangan dan implementasi *green economy* dalam pembangunan

berkelanjutan di Aceh. *Green Economy* adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, atau juga dapat diartikan sebagai aktivitas perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Adapun pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau mencakup penerapan *Good Agricultural Practices*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan, serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai nilai, dukungan kemitraan dan pemodal, optimalisasi komoditas dengan Indikasi Geografis, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan di Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala, dan karet.

- 2. Percepatan realisasi belanja pemerintah terutama belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.** Belanja modal diperkirakan memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian sehingga percepatan realisasi belanja modal menjadi hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Diperlukan langkah kebijakan yang ketat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mempercepat pelaksanaan belanja di daerah, antara lain melalui: penerapan kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan output di daerah, melakukan monitoring posisi kas dan simpanan pemda di perbankan, dan memberlakukan sistem *reward/punishment*. *Reward* dilakukan melalui Dana Insentif Daerah yang diberikan ke daerah berprestasi berdasarkan kinerja keuangan termasuk total penyerapan belanja daerah. *Punishment* diberlakukan melalui kebijakan konversi Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum terhadap daerah dengan jumlah simpanan tidak wajar.
- 3. Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMI**

yang ada di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Program. Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang terdampak COVID-19 dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2022.

- 4. Mempercepat capaian target program vaksinasi masal tahap pertama, kedua, dan vaksin booster.** Cakupan vaksinasi dosis 1 di provinsi Aceh, sampai dengan akhir Januari 2022, telah mencapai 83,54 persen. Angka ini setara dengan 3,37 juta peserta vaksin dari target yang ditetapkan sebanyak 4,03 juta orang. Sementara untuk vaksinasi dosis 2 telah tercapai 37,27 persen dari target. Untuk mengantisipasi penyebaran varian *omicron*, disiplin protokol kesehatan mutlak diperlukan, lebih lanjut untuk meningkatkan kekebalan masyarakat, perlu untuk mendorong vaksinasi tahap ketiga atau vaksin *booster*.
- 5. Mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan.** Potensi pada sektor hulu yang dimiliki Aceh bisa dioptimalkan untuk mendorong sektor industri pengolahan sebagai sektor yang aman untuk dibuka, memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan *multiplier effect* yang besar. Pemetaan pohon industri dari masing-masing komoditas unggulan serta kajian teknis mengenai potensi dari tiap pohon industri mutlak dibutuhkan agar tidak terjadi *jumping* lapangan usaha dari LU pertanian, perikanan dan kehutanan ke LU perdagangan besar dan eceran, tanpa melalui penambahan nilai yang dapat diberikan oleh LU industri pengolahan. Hal ini penting agar provinsi Aceh tidak kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa diciptakan oleh industri pengolahan.
- 6. Mendorong model bisnis *sharing factory* dalam**

rangka mendorong UMKM dan Industri. Kawasan industri yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti KI Ladong berpotensi untuk diarahkan menjadi *sharing factory* yang mana bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM-UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang berdaya saing. *Sharing factory* berpotensi membantu para pelaku UMKM yang tidak memiliki modal kerja tinggi untuk mengembangkan usahanya karena semua fasilitas dasar akan disediakan oleh pengelola sentra industri. Model *sharing factory* juga sudah diterapkan di beberapa daerah dan mampu meningkatkan kualitas produk dan kapasitas UMKM.

7. **Memperkuat peran Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di setiap daerah** untuk mendukung ekosistem keuangan digital di Aceh. Di tengah pandemi COVID-19, transaksi non tunai/digital diharapkan dapat menjaga *demand* masyarakat, sehingga roda perekonomian dapat terus bergerak. Melalui transaksi non tunai/digital, diharapkan risiko penularan COVID-19 melalui uang kartal dapat dicegah. Ekosistem non tunai/digital di lingkungan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan penerapannya melalui Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dengan sinergi pemda, BI, perbankan, serta pihak terkait lainnya.
8. **Memperkuat peran Satgas percepatan investasi atau *Regional Investment Relations Unit (RIRU) Aceh***. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diperlukan keterlibatan investasi swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal ini, peran Satgas percepatan investasi menjadi penting dan perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi proyek *clean and clear*, mengikuti *event* promosi investasi, memetakan calon investor potensial, serta memperkuat peran media dalam memperkenalkan proyek-proyek investasi kepada calon investor.

Inflasi

Pada tahun 2022, tekanan inflasi diperkirakan akan mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk itu, diperlukan lebih dari TPID Aceh untuk dapat mengantisipasi inflasi pada 2022. Pada awal 2022, TPID Provinsi Aceh dan 23 Kabupaten/Kota telah merumuskan peta jalan (*roadmap*) pengendalian inflasi untuk jangka waktu 2022-2024. Perlu komitmen dari seluruh pihak untuk dapat mengimplementasikan peta jalan tersebut. Adapun program pengendalian inflasi Aceh masih mengacu pada *framework* 4K, antara lain:

1. **Keterjangkauan Harga melalui stabilisasi harga pangan strategis didukung oleh program-program**, pemantauan dan pencatatan harga bahan pangan pokok (sembako dan komoditas ikan), optimalisasi program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) untuk komoditas beras, pelaksanaan pasar murah (terutama menjelang HBKN), pelaksanaan sidak pasar, dan menetapkan harga eceran tertinggi (komoditas bahan pangan) melalui penyusunan Qanun (Perda),
2. **Ketersediaan Pasokan melalui dua program strategis yaitu peningkatan produksi pangan lokal dan importasi produk pangan**. Peningkatan produksi pangan lokal terutama produksi hortikultura penyumbang inflasi (bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit, produksi komoditas peternakan penyumbang inflasi (daging sapi, daging ayam, dan telur ayam), Peningkatan produksi/tangkapan/budidaya komoditas perikanan penyumbang inflasi. Peningkatan produksi juga didukung oleh pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian; pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan kanal pengendalian banjir (Aceh Tamiang), korporatisasi klaster petani pangan, dan Pengaturan jadwal tanam komoditas pangan. Selanjutnya, diperlukan juga impor komoditas yang sulit diproduksi secara lokal seperti

bawang putih dan gula pasir.

3. **Kelancaran Distribusi melalui dua program strategis yaitu, penguatan dan perluasan kerjasama antar daerah (KAD), serta meningkatkan infrastruktur perdagangan.** Program strategis pertama, dijabarkan menjadi inisiasi KAD di setiap kab/kota baik intra provinsi maupun antar provinsi, Peningkatan transaksi KAD, Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/ Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI), pelaksanaan Pasar Lelang (Komoditas lokal dan Ekspor). Selanjutnya, program strategis kedua dijabarkan melalui, peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan yaitu melalui pemanfaatan tol laut, fasilitasi UMKM pangan binaan dengan *e-commerce*, dan optimalisasi pemanfaatan *Cold Storage* untuk komoditas perikanan.
4. **Komunikasi Efektif melalui tiga program strategi yaitu, memperbaiki kualitas data dan laporan, peningkatan kapasitas dan koordinasi Provinsi dan Kab/Kota, dan mengendalikan ekspektasi inflasi.** Perbaikan kualitas dan laporan dicapai melalui penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kab/kota, serta peningkatan kualitas dan kuantitas laporan TPID baik Provinsi dan Kab/Kota. Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan koordinasi dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota, pelaksanaan *High Level Meeting* TPID, dan pelaksanaan *Capacity Building* TPID. Terakhir, pengendalian ekspektasi inflasi dilakukan melalui program rilis pers/media terkait perkembangan harga dan ketersediaan pasokan.

DAFTAR ISTILAH

Administered prices	Salah satu disgregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental

Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perceived risk	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Volatile food	Salah satu disgregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
Yoy	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Achris Sarwani

KOORDINATOR PENYUSUN

Yon Widiyono

TIM PENULIS

Muhammad Irfan Octama

Muhammad Harun Al Rasyid

Angga Lesmana

Fery Febriansyah

Mochammad Julian Rudyanto

Garry Rahmadhian Sutiasa

Raksaka Ardy Damara

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

JL. Cut Mutia No.15, Banda Aceh

Telp. (0651) 32320 ext. 8205 | Fax. (0651) 34116

Softcopy dapat diunduh pada tautan:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>